



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2023

LAPORAN TAHUNAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KETAHANAN EKONOMI

MODAL UTAMA MEMBANGUN NEGERI

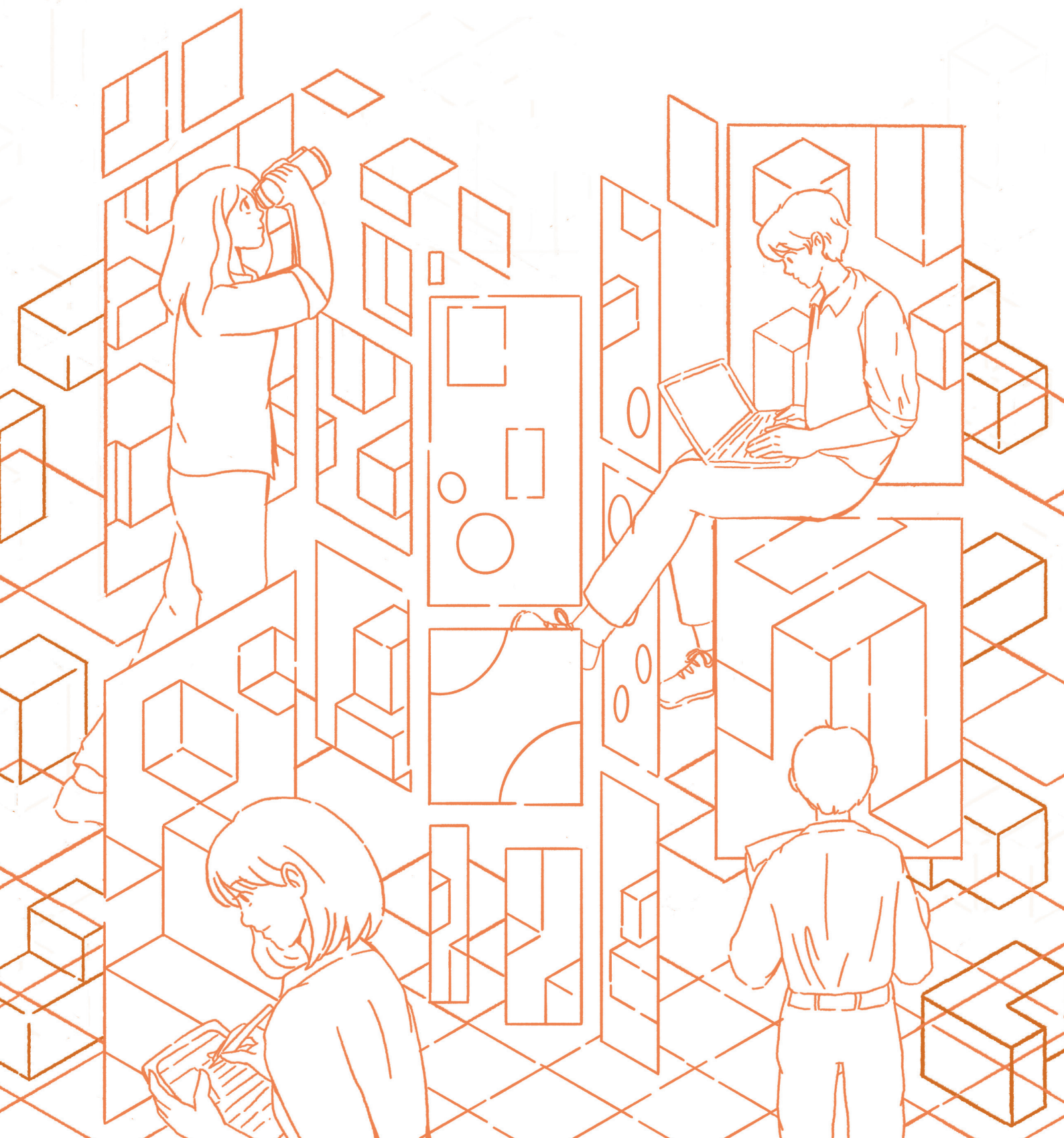


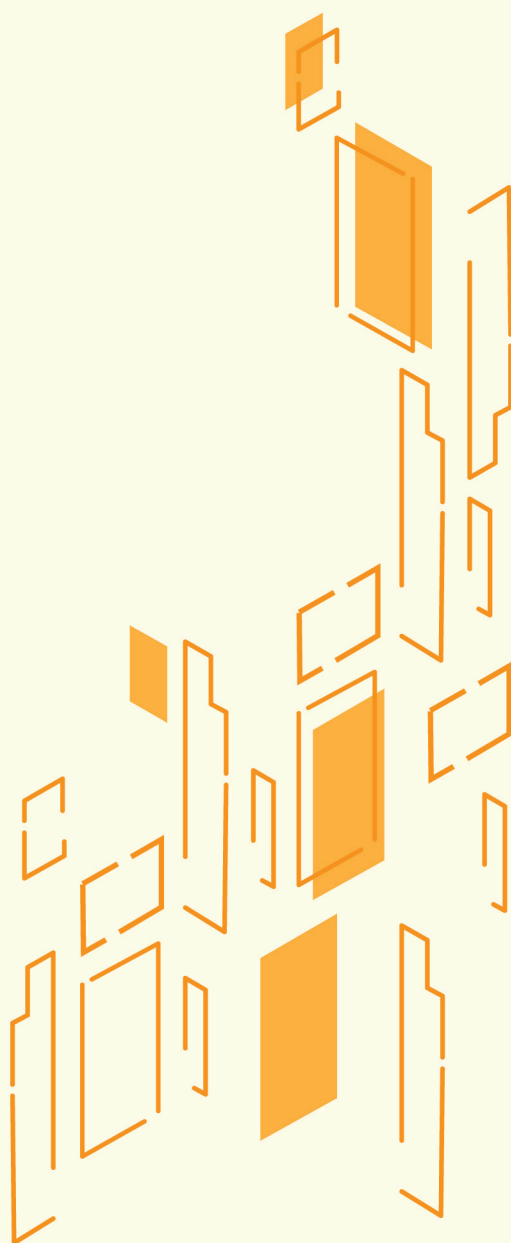
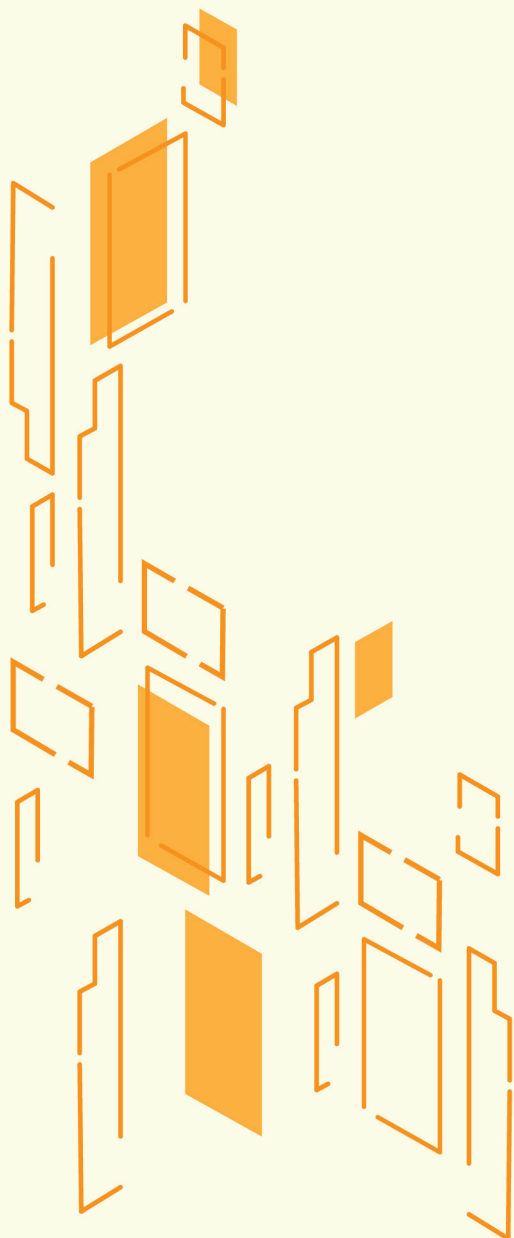


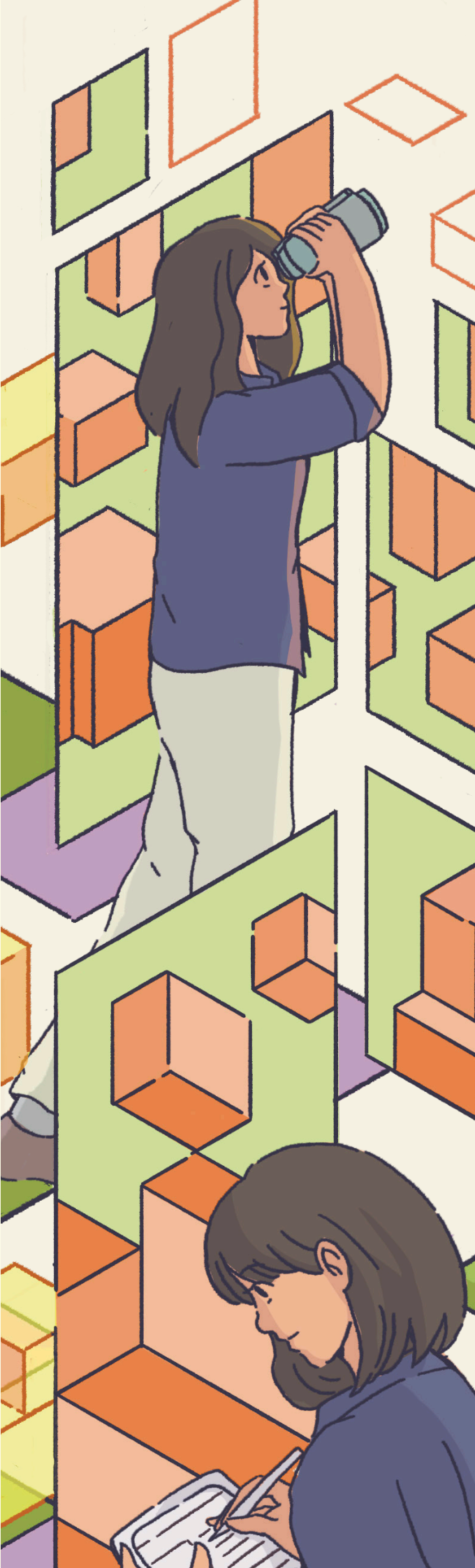
LAPORAN TAHUNAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KETAHANAN EKONOMI

MODAL UTAMA MEMBANGUN NEGERI



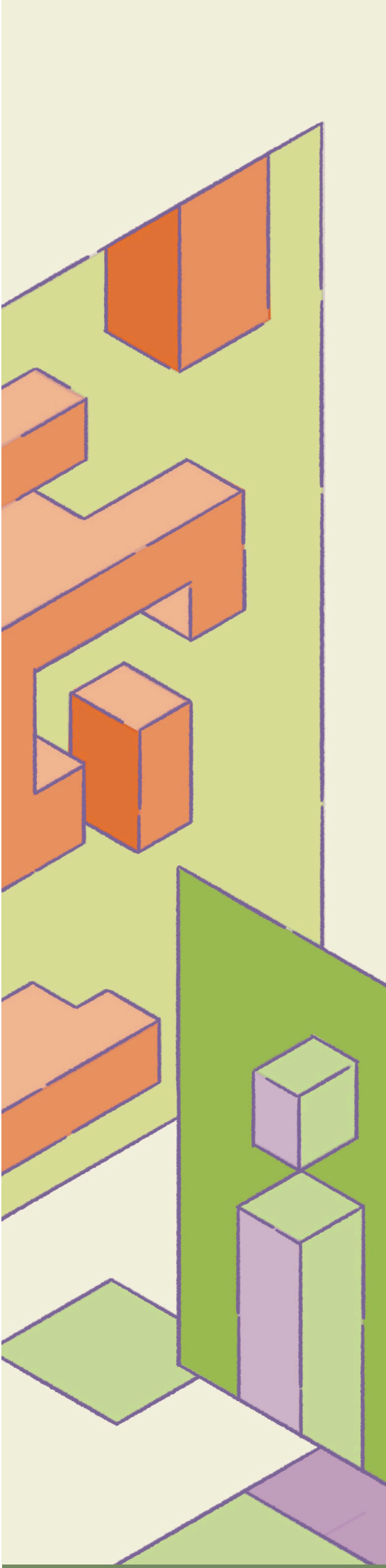




Tentang Tema

Sebagai salah satu instrumen vital ekonomi negara, APBN adalah salah satu indikator utama cerminan kondisi bangsa. Dinamika politik, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya tertuang jelas di dalamnya. APBN berperan besar menjaga stabilitas kehidupan bernegara, tak ubahnya sel darah putih yang bertugas mencegah, menangkal, dan mengeliminasi ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu fungsi fisiologis manusia.

Berdasarkan persamaan ini, Laporan Tahunan 2023 mengambil tema Ketahanan Ekonomi Modal Utama Membangun Negeri. Tema ini diperkuat dengan ilustrasi yang mencerminkan metafora proses *scientific* penyusunan kebijakan sejalan dengan kinerja sistem imun tubuh. APBN 2023 tampil digdaya menjadi benteng pertahanan keberlangsungan negara dengan kinerja memuaskan. Semua ini tentunya tak terlepas dari rangkaian kebijakan yang dihasilkan berdasarkan rekomendasi *think tank* di Badan Kebijakan Fiskal.



DAFTAR ISI

Profil Organisasi	1
--------------------------	----------

BAB 1. Capaian Utama	17
-----------------------------	-----------

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024	19
---	----

Pemantauan dan Pengendalian Inflasi	20
-------------------------------------	----

Pemberian Fasilitas Perpajakan untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi	21
--	----

Pengaturan Berkelanjutan dalam Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	24
---	----

Dukungan Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan Melalui <i>Energy Transition Mechanism</i>	27
--	----

Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Tatanan Internasional	29
---	----

BAB 2. Capaian Umum	35
----------------------------	-----------

EKONOMI MAKRO & APBN	37
----------------------	----

PENDAPATAN NEGARA	55
-------------------	----

SEKTOR KEUANGAN	69
-----------------	----

KERJA SAMA INTERNASIONAL	83
--------------------------	----

KERJA SAMA & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM	97
---	----

BAB 3. Transformasi Organisasi

105

BAB 4. Dukungan Keuangan

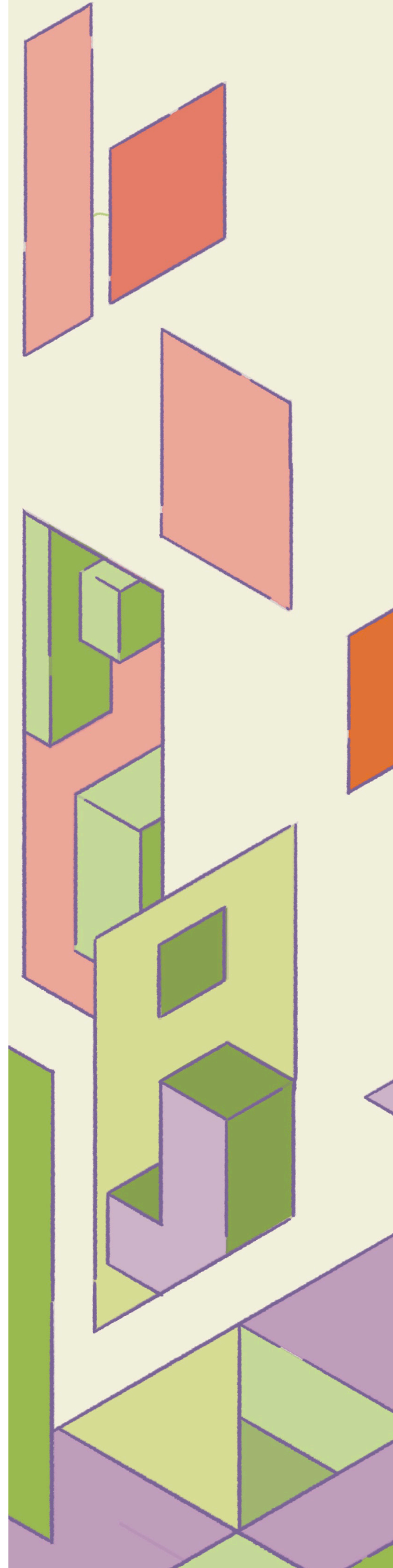
113

BAB 5. Kegiatan Strategis

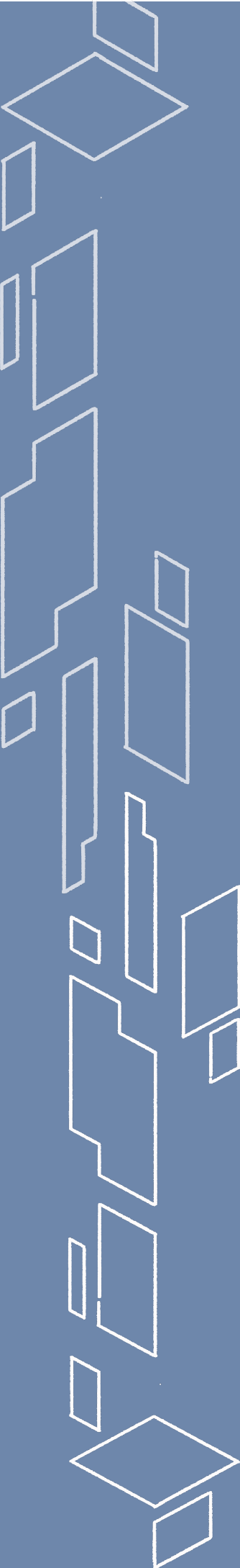
119

BAB 6. Publikasi

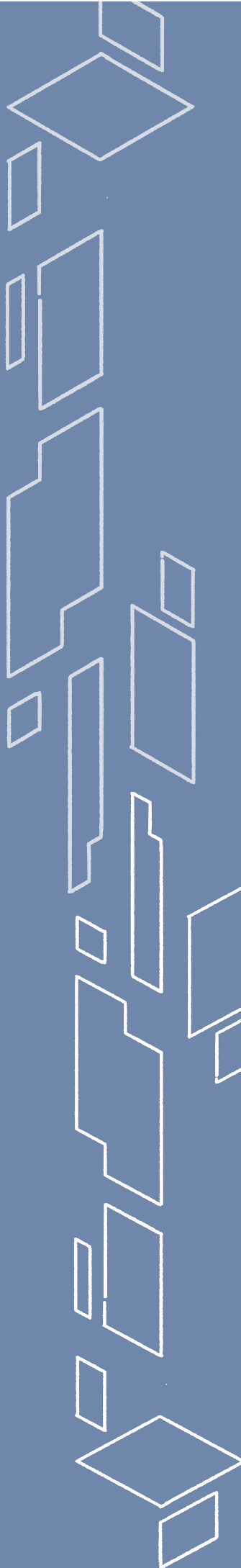
145





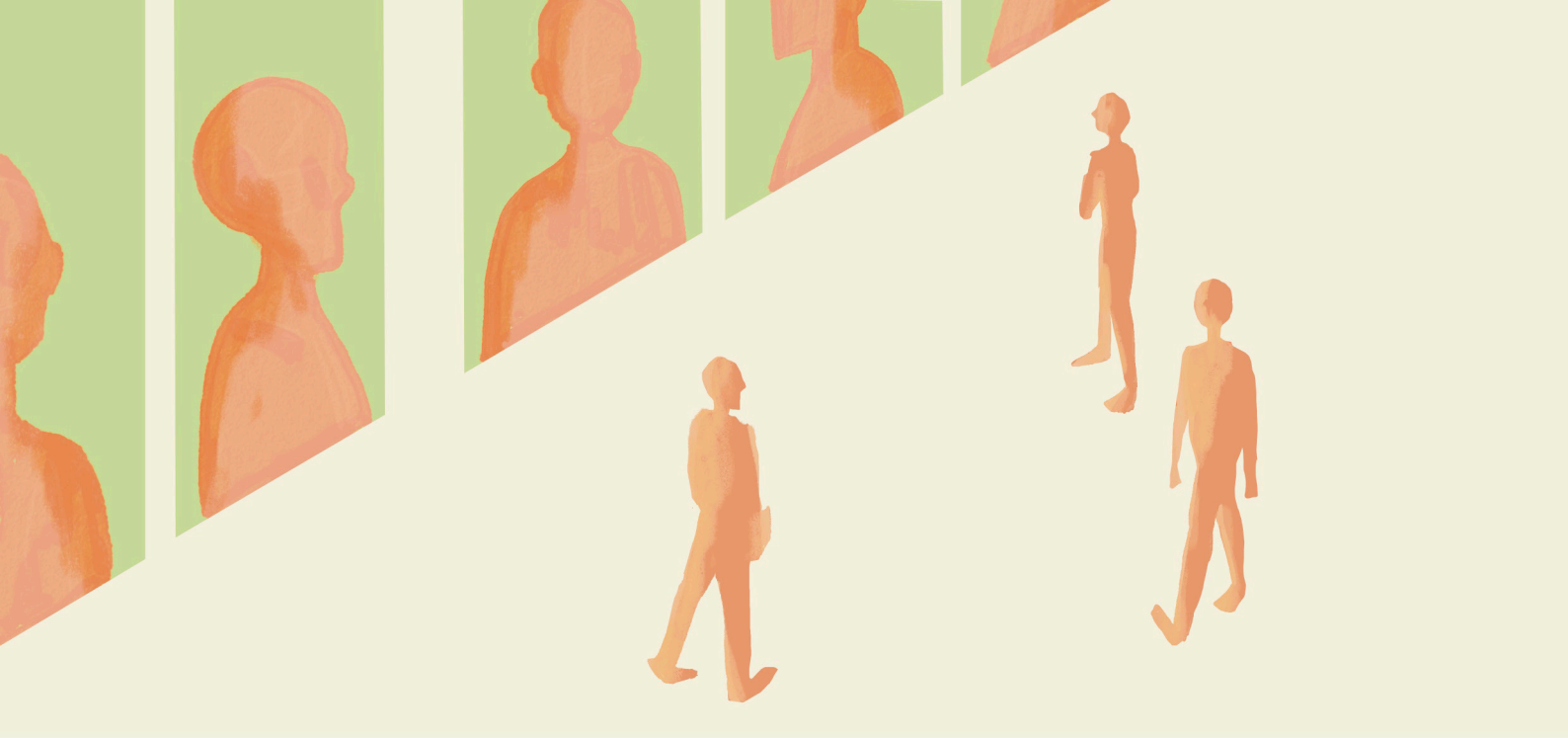


Profil Organisasi



Sebagai *Think Tank* Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal terus berupaya menjadi organisasi yang berdaya tahan dan kredibel.

Badan Kebijakan Fiskal terus melakukan inovasi sebagai upaya pembelajaran dan perbaikan demi dapat merumuskan kebijakan yang dapat membawa manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat.



PROFIL ORGANISASI

Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut dilakukan dengan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta telaah teori yang relevan. Secara umum, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan kebijakan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama yaitu:

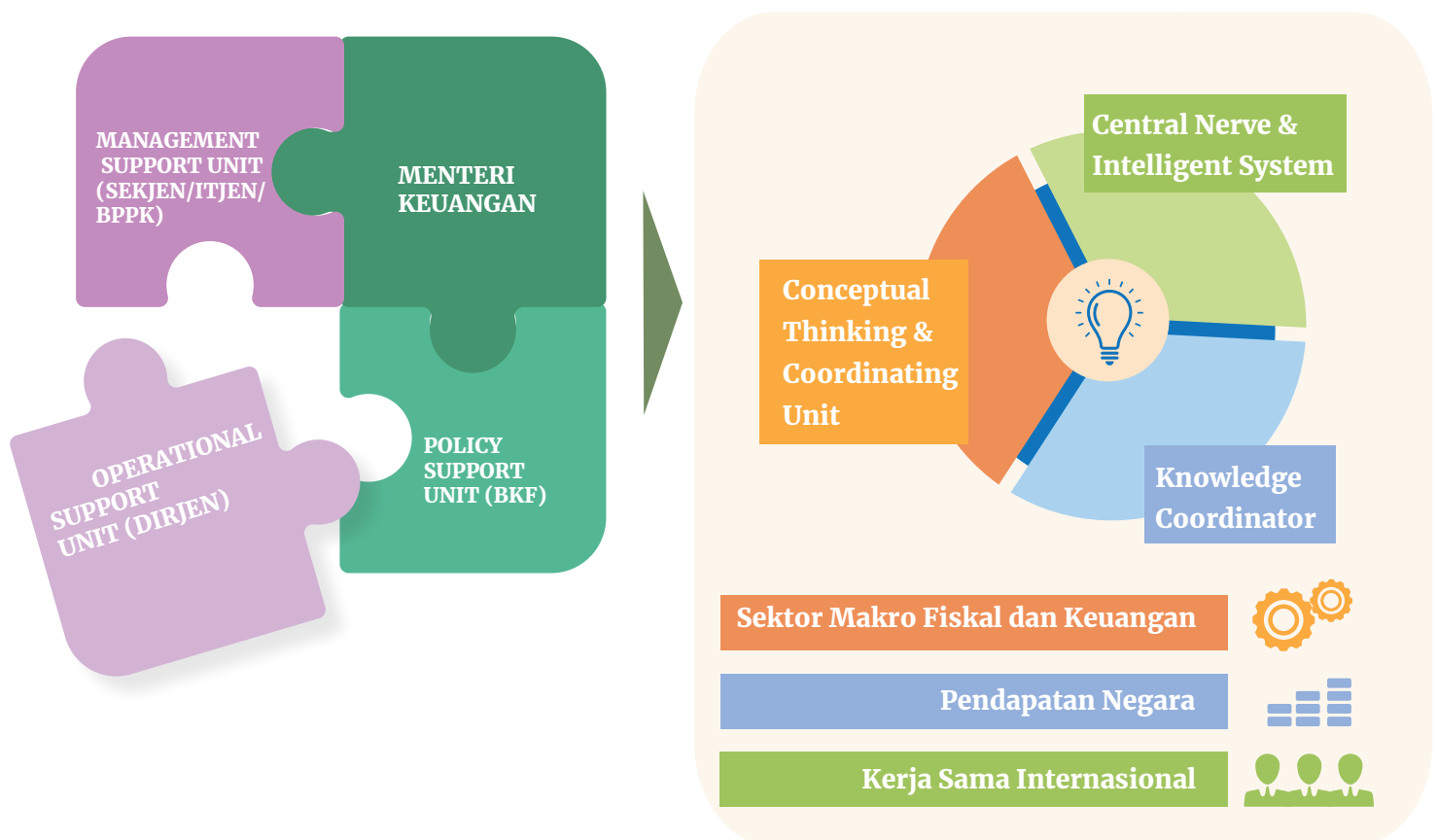
1. Kebijakan makro fiskal,
2. Kebijakan penerimaan negara dan sektor keuangan, serta
3. Kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Pada awal pembentukan di tahun 2006, Badan Kebijakan Fiskal memiliki enam unit Eselon II, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerja Sama Internasional dan Sekretariat Badan.

Namun demikian, setelah mengalami beberapa perubahan di tahun 2008, 2009, 2015, dan 2019, dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi, termasuk fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal melakukan penyesuaian tugas dan fungsi sehingga saat ini BKF terdiri atas tujuh unit eselon II:

1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,
4. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,
5. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,
6. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, dan
7. Sekretariat Badan.

Peran dan *Positioning* Badan Kebijakan Fiskal



Posisi BKF di Kementerian Keuangan adalah sebagai *Policy Support Unit*, yang bersifat saling melengkapi dengan *Manajemen Support Unit* (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) dan *Operational Support Unit* (Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan).

Dalam posisi tersebut, peran BKF dapat dikelompokkan menjadi area sebagai berikut:

1. *Conceptual Thinking & Coordinating Unit*, yaitu dalam memformulasikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan;
2. *Central Nerve & intelligent System*, yaitu dalam melakukan monitoring dan surveillance terhadap kondisi perekonomian terkini;
3. *Knowledge Coordinator*, yaitu dalam melakukan riset kebijakan dan diseminasi kebijakan, untuk turut mewarnai ruang diskusi publik terkait kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Adapun area kebijakan yang menjadi domain BKF adalah sektor makro fiskal dan keuangan, pendapatan negara, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh tiga komponen utama organisasi, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Madya, Pejabat/Pegawai Struktural, dan Pejabat Fungsional yang berperan sentral dalam pelaksanaan tugas inti BKF.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKF memiliki tiga proses bisnis utama sebagaimana terlihat pada ilustrasi berikut:

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Makro

seperti Kerangka Ekonomi Makro (KEM); Analisis proyeksi dan Perumusan Rekomendasi terkait neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, ekonomi internasional, dsb

Kebijakan Sektor Keuangan

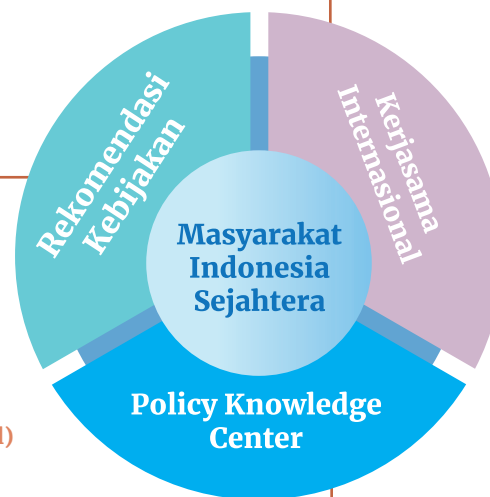
seperti Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang Industri perbankan, non perbankan, jasa keuangan, keuangan syariah, keuangan inklusif, dsb

Kebijakan Pendapatan Negara

seperti kebijakan Insentif, tarif dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, dan fasilitasi perdagangan internasional di bidang: Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta perpajakan internasional, dsb

Kebijakan Keuangan Negara (Fiskal)

seperti pelaksanaan analisis dan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi penerimaan perpajakan; kebijakan penerimaan negara bukan pajak dan hibah; belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran; kebijakan belanja subsidi; kebijakan keuangan daerah; penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan.



Kerjasama Internasional

Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional

baik kerja sama antar negara yang bersifat bilateral, regional, interregional, maupun multilateral; kerja sama internasional pendanaan perubahan Iklim baik dalam kerangka PBB maupun non-PBB, serta kerja sama dengan lembaga keuangan /organisasi internasional lain.

Policy Knowledge Center

Edukasi Publik melalui sosialisasi kebijakan, dan diseminasi hasil kajian dan analisis. *Publikasi Kebijakan* di media massa, media elektronik, media sosial. Penerbitan buku dan jurnal Kajian Ekonomi Keuangan *Policy Brief* kepada pimpinan.

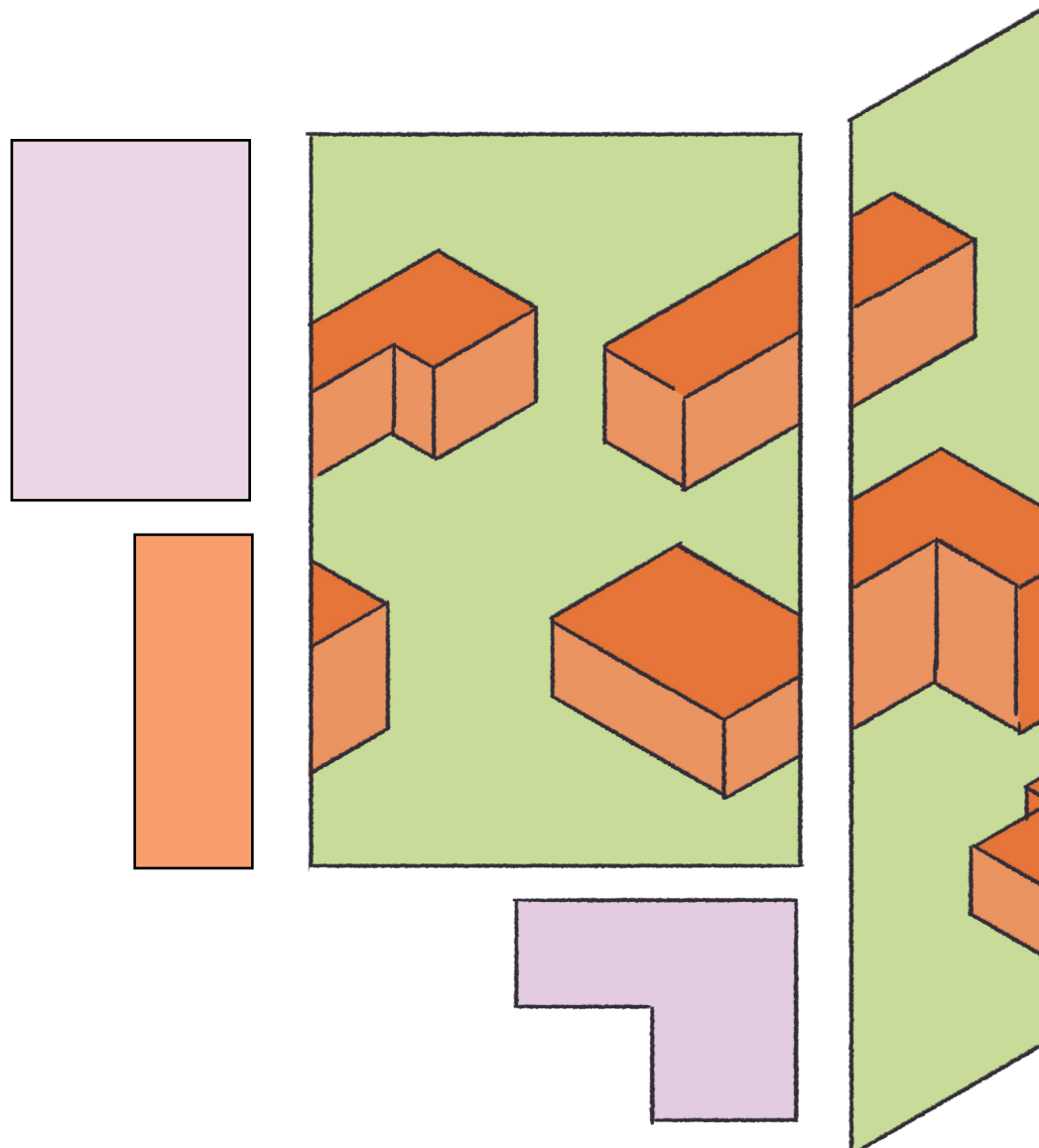
1. Formulasi Rekomendasi Kebijakan, yaitu seluruh kegiatan perumusan rekomendasi kebijakan yang meliputi kebijakan makro fiskal (ekonomi makro dan APBN), kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan pendapatan negara, dan kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
2. Pengelolaan Kerja Sama Internasional, yaitu seluruh kegiatan pengelolaan kerja sama internasional dan pemberian dukungan teknis dalam kerangka kerja sama internasional.
3. *Policy Knowledge Center*, yaitu seluruh kegiatan pengelolaan pengetahuan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, misalnya seperti pengelolaan *dashboard* dan penyusunan laporan perkembangan perekonomian, maupun edukasi publik, terutama terkait kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

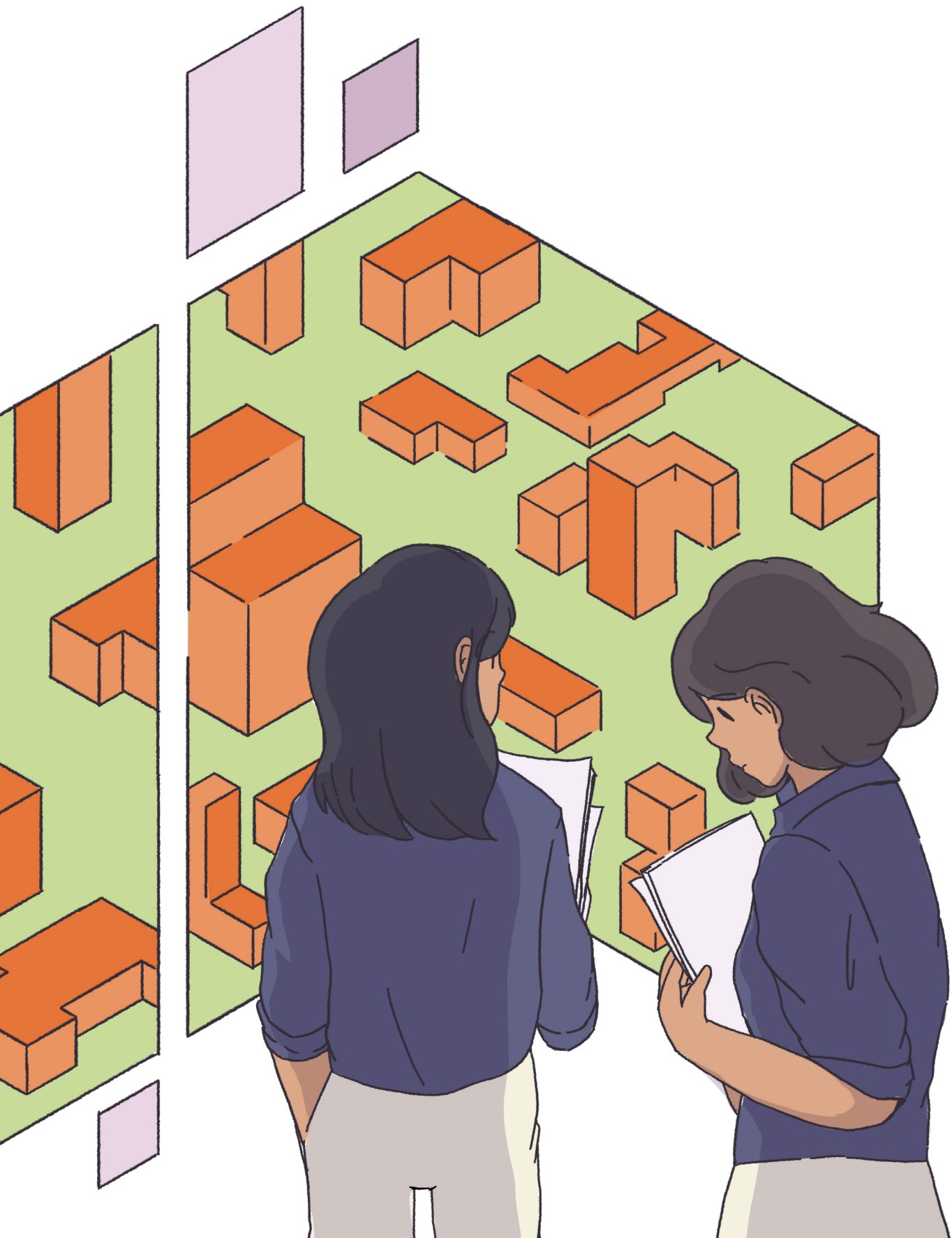
Transformasi organisasi mengubah bentuk organisasi menjadi berbasis fungsional, yang dirasa lebih sesuai dengan karakteristik pekerjaan Badan Kebijakan Fiskal di bidang analisis, penelitian, dan pengembangan yang menitikberatkan pada kepakakan dan mendorong peningkatan kecepatan dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Tugas & Fungsi

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan sejumlah fungsi yang mencakup penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; penyusunan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan; menjalin kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; serta penyelenggaraan administrasi Badan Kebijakan Fiskal dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.





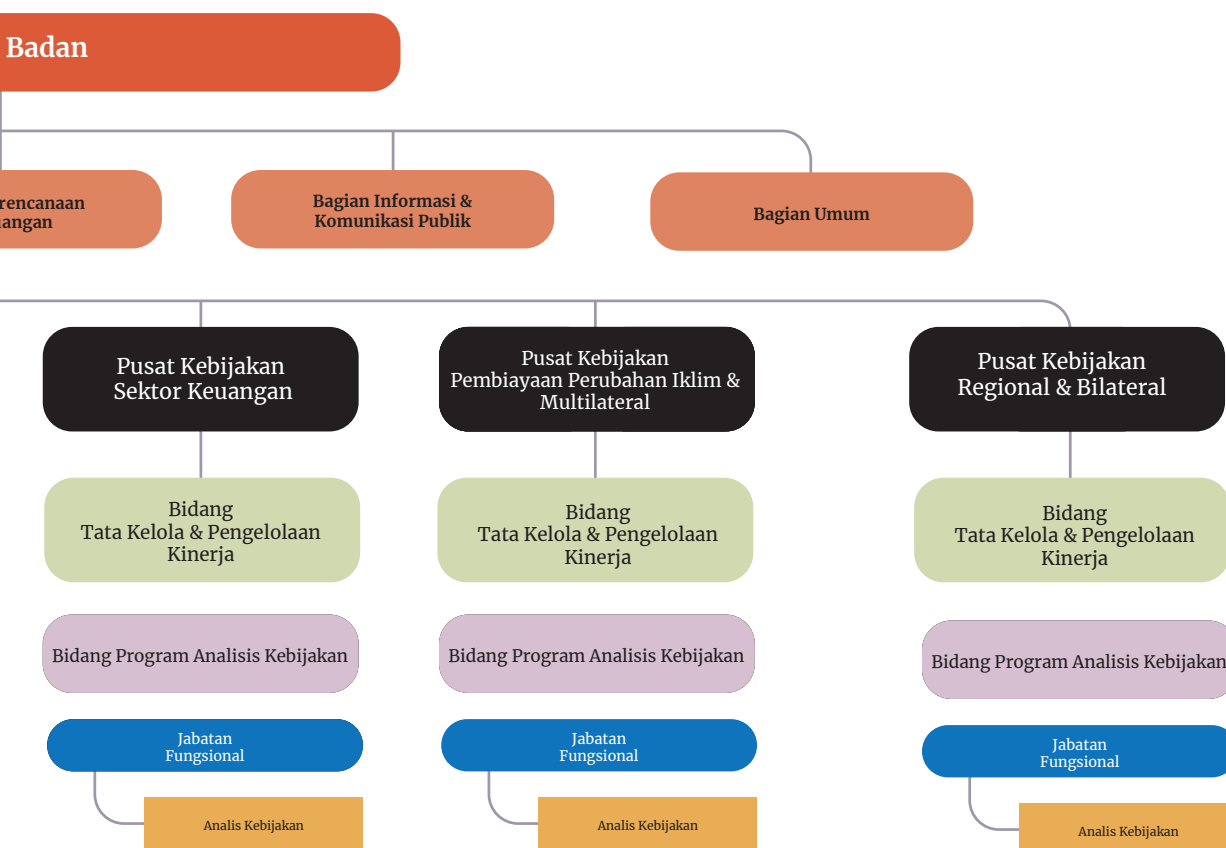
Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 118/2021) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 7 Unit Eselon II, 17 Unit Eselon III, 55 Unit Eselon IV, dan Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis inti (Analisis Kebijakan) dan jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis pendukung (Arsiparis dan Pranata Keuangan APBN)



Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan *assessment* kompetensi teknis untuk 12 Pejabat Administrator dan Pengawas sebagai salah satu bentuk lanjutan penguatan implementasi sistem *merit* di Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, pelaksanaan mutasi dan rotasi rutin lintas unit eselon II untuk jabatan fungsional Analisis Kebijakan (AK) sebanyak 12 pejabat yang terdiri dari 6 JFAK Ahli Madya, 5 JFAK Ahli Muda, dan 1 JFAK Ahli Pertama juga dilakukan selama tahun 2023. Terkait penetapan angka kredit dilakukan secara integrasi oleh Tim Penilai Instansi dan dukungan penyelesaian penetapan angka kredit integrasi oleh Tim Penilai Pusat.



Kebijakan PERMENPANRB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan advokasi implementasi perubahan kebijakan PERMENPANRB 1/2023 kepada Pembina Kepegawaian Instansi dan Nasional yang diikuti dengan penguatan koordinasi dengan pengelola kinerja unit eselon II melalui Forum Kepegawaian mengenai transisi PERMENPANRB 1/2023 pada Triwulan I Tahun 2023.

Profil Pimpinan



Febrio Kacaribu, Ph.D.

Kepala Badan

Lahir di Sidikalang, Sumatra Utara tahun 1978. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan gelar Master of International & Development Economics dari Australian National University di tahun 2005. Pada tahun 2014, Beliau memperoleh gelar Ph.D dari University of Kansas.

Menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak tahun 2015 dan dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 3 April 2020. Bidang keahlian Beliau meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik.

Penghargaan:

- Top 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan 2021



Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E.

Sekretaris Badan

Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Beliau menempuh pendidikan S1 Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran. Gelar sarjananya diraih pada 24 Mei 1997. Beliau melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar Doktor dengan melanjutkan S3 Ekonomi Terapan di Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Maret 1999, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Penyaringan di Biro Kepegawaian Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2004. Kemudian Beliau menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dipercaya sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia.

Pada tanggal 27 Maret 2013 dilantik menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan tanggal 23 September 2016 dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Beliau dilantik sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 30 Desember 2021.

Penghargaan:

- Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Pande Putu Oka Kusumawardani, S.E., M.M., M.P.P., CA

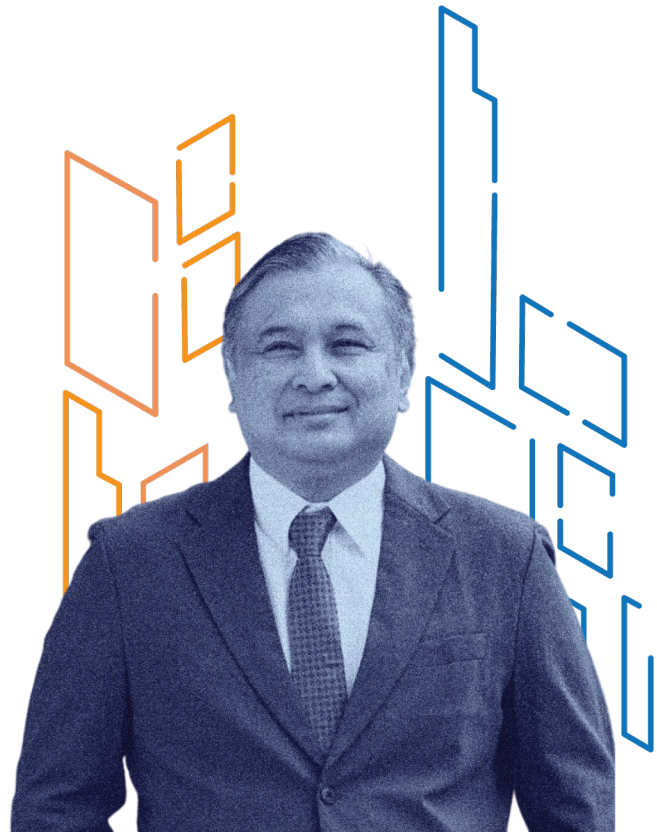
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)

Lahir di Jakarta pada tahun 1977, Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan dilanjutkan dengan Program Magister dari universitas yang sama pada 2004. Selain itu, Beliau juga meraih gelar Master of Public Policy dari Universitas Hitotsubashi, Tokyo, pada 2009.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional Badan Kebijakan Fiskal, yang bertanggung jawab terhadap isu-isu perpajakan Internasional. Diangkat sebagai Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan pada Desember 2019 dan ditunjuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Maret 2020.

Penghargaan:

- Penghargaan Sebagai Mentor dalam rangka Manajemen Talenta Kementerian Keuangan tahun 2019
- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)

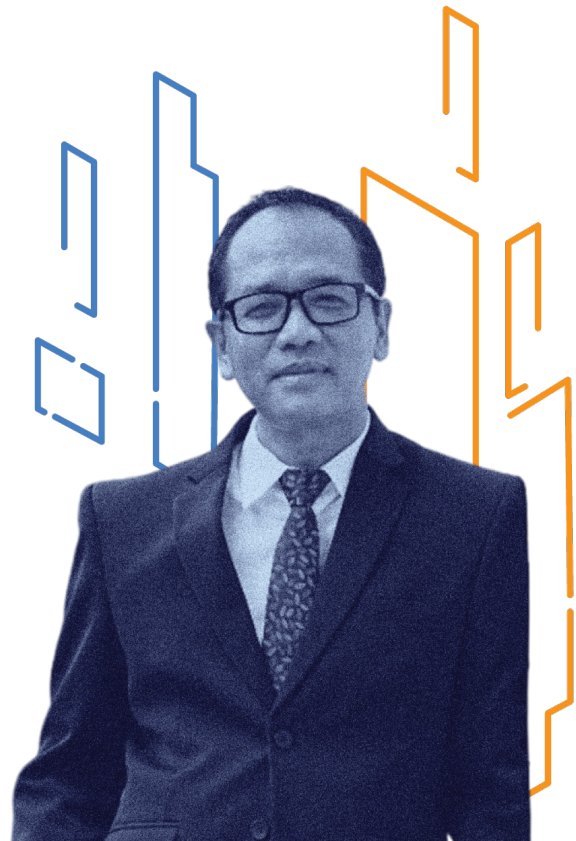
Pria kelahiran 1970 ini mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Beliau juga pernah mengikuti beberapa workshop internasional seperti *Green Economics* (Seoul, Korea Selatan), *Toward Universal Healthcare* (Tokyo, Jepang), *Macroeconomic and Fiscal Policy* (Singapore), dan *Medium Term Budget Framework* (Bali, Indonesia).

Beliau sebelumnya bertugas sebagai Kepala Seksi di Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2006–2007, lalu sebagai Kepala Subbidang di Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2008. Pada tahun 2015, Beliau diangkat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara yang bertanggung jawab merancang strategi fiskal jangka panjang-menengah, perumusan kerangka kebijakan fiskal tahunan, kebijakan pembiayaan serta berbagai isu sektoral seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, serta infrastruktur.

Pada tahun 2019, seiring dengan transformasi organisasi, Beliau diangkat menjadi analis kebijakan ahli madya dan menangani kebijakan makro fiskal. Pada Januari 2022, Beliau diamanatkan peran sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara dan ditunjuk sebagai pejabat definitif pada tanggal 5 Mei 2023.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun
- Penghargaan sebagai Talent dalam Rangka Manajemen Talenta Kementerian Keuangan Tahun 2019



Abdurohman, S.E., M.Sc., Ph.D.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)

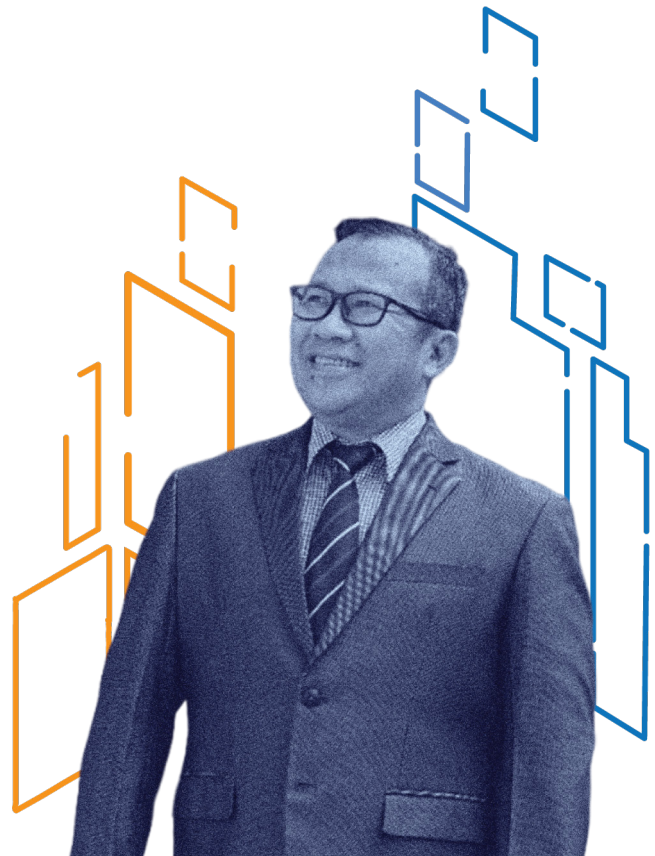
Lahir di Banjarnegara pada tahun 1970, pria ini mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 1996 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan dengan gelar Master of Science in Economics dari University of Illinois at Urbana-Champaign di tahun 2002. Gelar Ph.D diperolehnya kemudian dari the Australian National University pada tahun 2013.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1997, pada Desember 2020 Beliau diangkat menjadi Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tahun 2015-2019 aktif sebagai *Fiscal Specialist* di ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Singapura.

Selain sebagai *fiscal specialist*, Beliau juga mengemban tugas sebagai *Country Desk Economist* untuk beberapa negara, seperti Brunei Darussalam dan Kamboja. Pada 5 Oktober 2021, Beliau diangkat sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, dan dilantik menjadi pejabat definitif pada 5 Mei 2023.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Dr. Adi Budiarmo, FCPA

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)

Lahir di Salatiga pada tahun 1970, pria ini meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2001, Beliau berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California, dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014.

Mengawali karir sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 1990, sebelum bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, Beliau menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office (CTO) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2014-2018.

Beliau juga mengemban amanat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional 2018 Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 di Bali. Selanjutnya Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Beliau dilantik menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Boby Wahyu Hernawan S.E., M.Com., DBA

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Lahir di Lumajang pada tahun 1975, Beliau merupakan Sarjana Diploma III Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1996 yang melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi tahun 2000. Kemudian Beliau meraih gelar Master of Commerce dari University of Queensland pada tahun 2004 serta gelar Doctor of Business Administration (DBA) dari Victoria University pada tahun 2017.

Beliau mengawali karier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1995 pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selanjutnya tahun 2006 diangkat sebagai Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan setahun kemudian Kepala Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi. Selanjutnya pada tahun 2015, mengawali karier di Badan Kebijakan Fiskal sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan. Pada tahun 2019, Beliau diangkat menjadi Atase Keuangan Perwakilan Republik Indonesia untuk negara Uni Emirat Arab dan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Terkini, pada bulan September 2023, dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral di Badan Kebijakan Fiskal.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Yogi Rahmayanti, S.E., S.S.T, Ak., M.P.P., Ph.D.

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)

Wanita kelahiran Mojoroto, Kediri pada tahun 1975 ini merupakan sarjana Diploma IV STAN pada tahun 2002, yang melanjutkan S2 di Hitotsubashi University tahun 2005 dengan gelar Master of Public Policy and Management. Di tahun 2014, Beliau memperoleh gelar Doctor of International Public Policy dari Osaka University.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada 1996 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Beliau pernah menjabat Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-D tahun 2006, Kepala Subbagian Organisasi tahun 2012, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2012, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I tahun 2013, dan Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I tahun 2015.

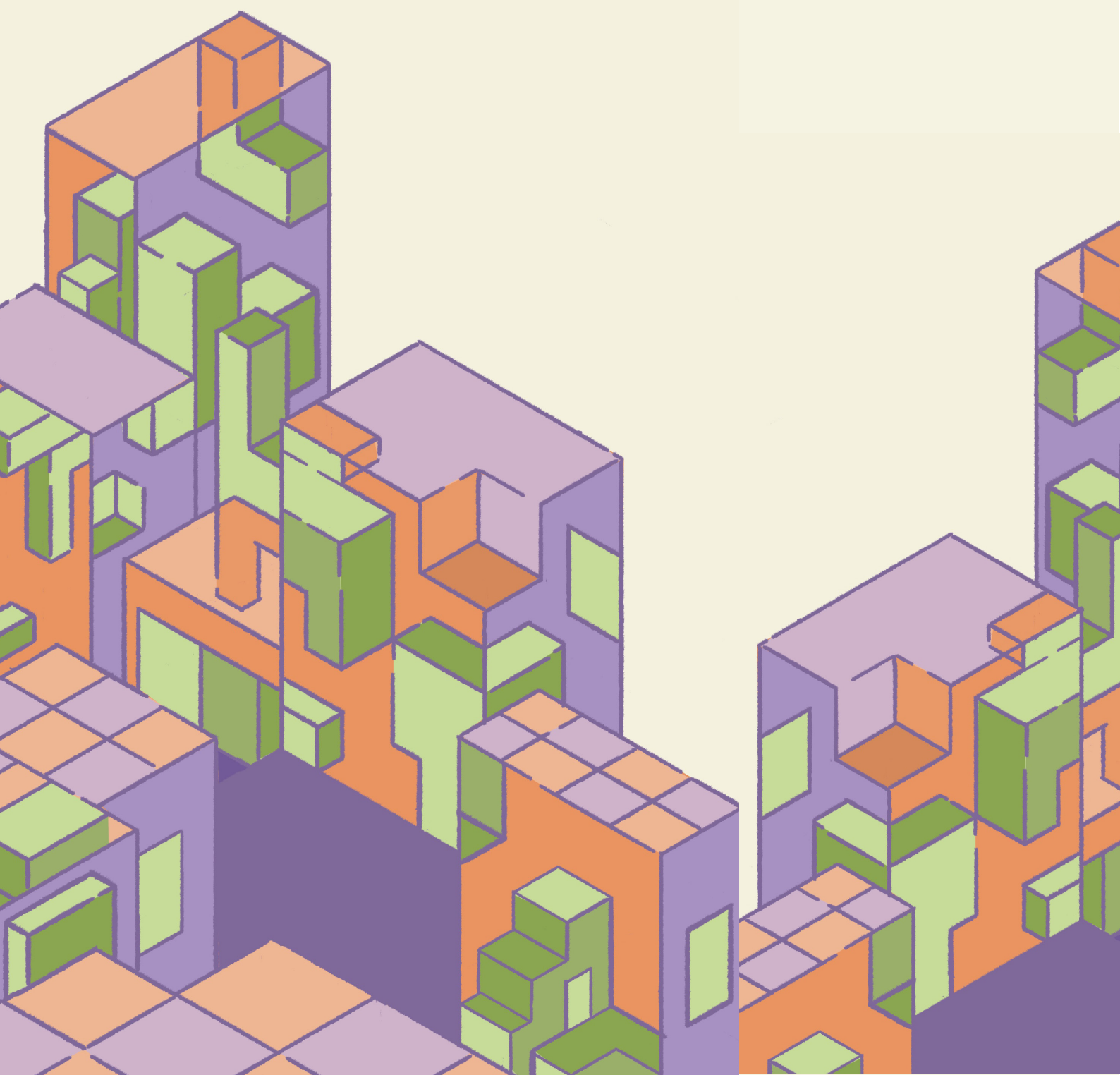
Beliau kemudian dipromosikan sebagai Kepala Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal tahun 2019. Sejak 16 Juni 2023, dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal.

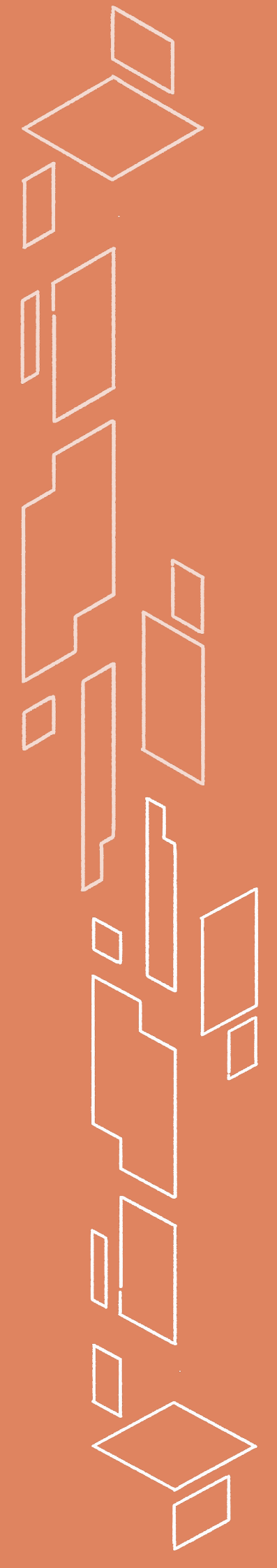
Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun

BAB 1

CAPAIAN UTAMA





Capaian Utama merupakan kumpulan capaian terbesar Badan Kebijakan Fiskal yang dicapai masing-masing Pusat Kebijakan sebagai Unit Eselon II selama tahun 2023.

Capaian-capaian besar di sektor ekonomi, fiskal, keuangan, kerja sama internasional dan pembiayaan perubahan iklim berskala nasional hingga internasional di tahun 2023 ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024

Badan Kebijakan Fiskal berperan strategis dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 17 tahun 2014. Pada 2023, Badan Kebijakan Fiskal menyusun KEM PPKF 2024 yang menjadi acuan Nota Keuangan dan RAPBN 2024.

Meskipun ekonomi global bergejolak, ekonomi domestik tetap solid dan pulih lebih cepat pascapandemi. Dengan konsistensi reformasi struktural, tema KEM dan PPKF 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”**

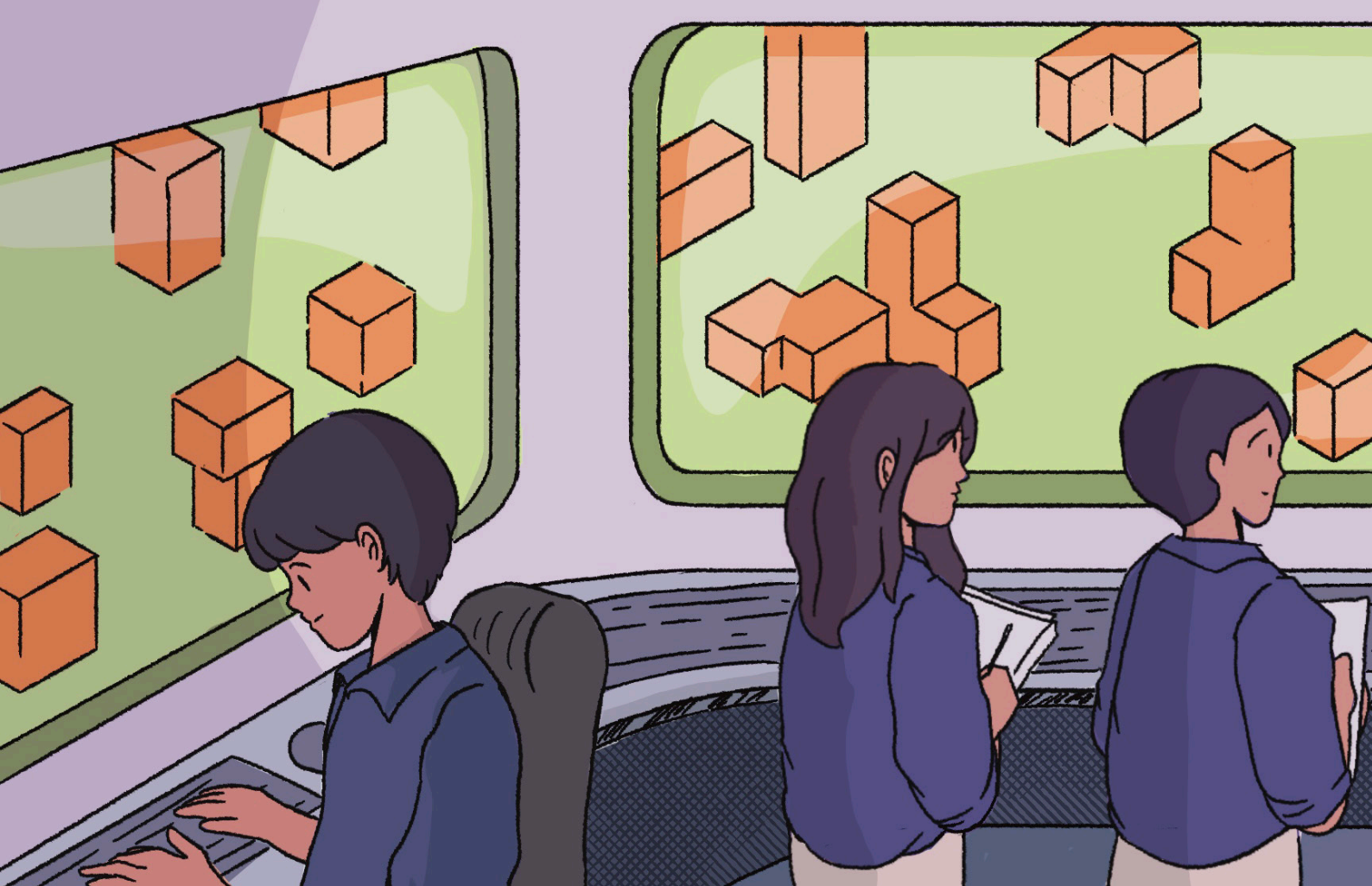
Dalam KEM dan PPKF 2024, pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro untuk RAPBN 2024:



Kebijakan Fiskal 2024 akan mengoptimalkan tiga fungsi utama APBN: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mendukung pertumbuhan jangka menengah dan panjang, khususnya transformasi ekonomi melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan kelembagaan serta regulasi.

Fungsi stabilisasi berperan sebagai *shock absorber* terhadap gejolak ekonomi dan pengendalian inflasi, untuk meningkatkan resiliensi dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi distribusi mendukung program afirmasi untuk menurunkan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan *stunting*.

Pemerintah mendorong efisiensi belanja, penguatan belanja produktif, efektivitas belanja pegawai, ketepatan sasaran bantuan sosial dan subsidi, serta sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian target pembangunan nasional.

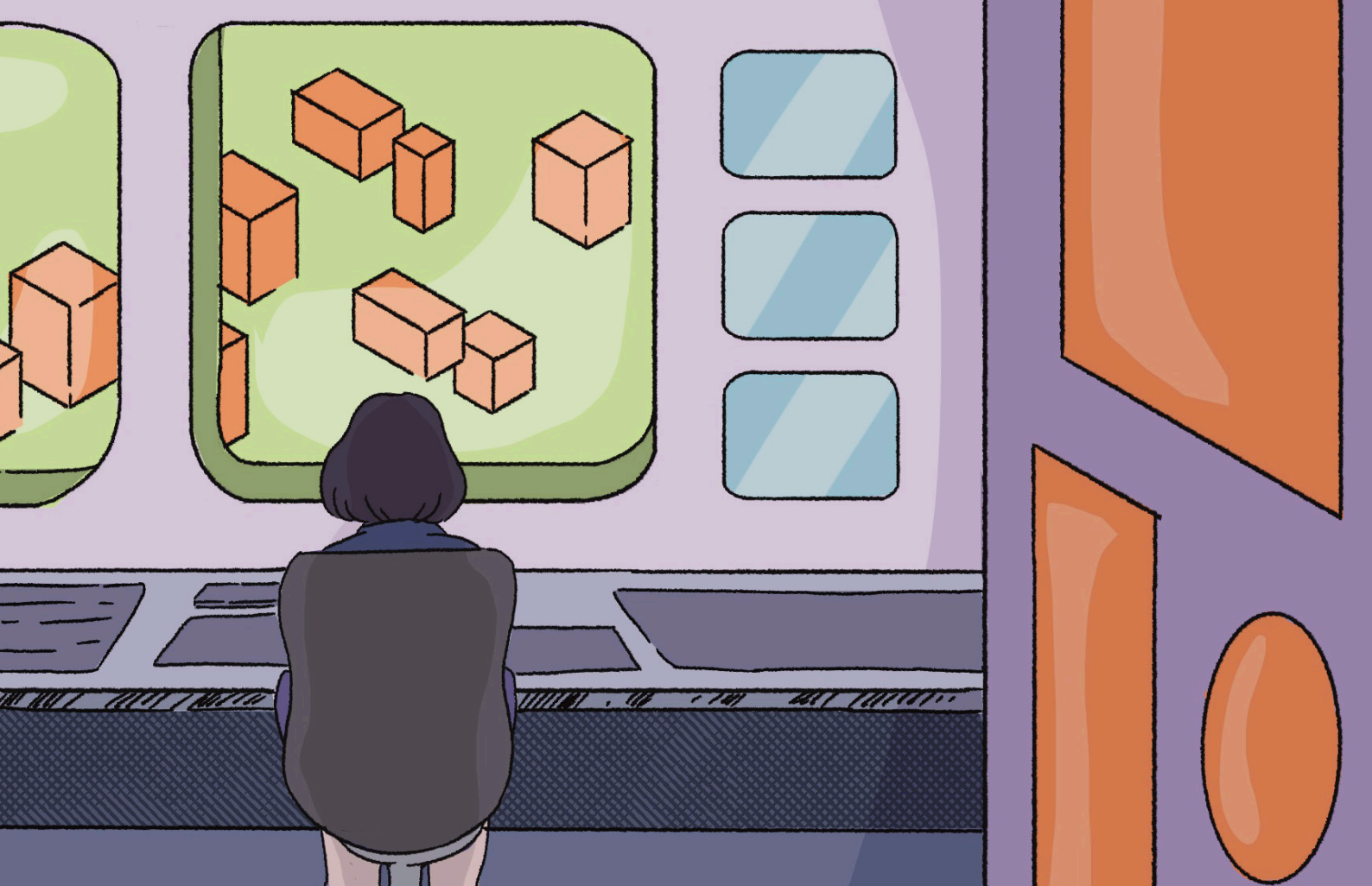


Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) adalah sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan berperan sentral dalam kebijakan pengendalian inflasi nasional, dengan Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua II dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai Ketua Pokja Pusat TPIP.

Badan Kebijakan Fiskal berperan penting dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi. Pada 2023, Badan Kebijakan Fiskal bekerja aktif dalam penyusunan laporan tahunan TPIP, koordinasi Rakornas dan Rakorpusda Pengendalian Inflasi, serta kegiatan koordinasi kebijakan mengantisipasi kenaikan harga. Badan Kebijakan Fiskal juga bermitra dengan anggota TPIP lainnya untuk menjaga kinerja pengendalian inflasi melalui tagging inflasi nasional dan daerah pada APBN dan APBD.

Dengan koordinasi yang diperkuat, sasaran inflasi 2023 sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$ tercapai, dengan inflasi 2023 sebesar $2,61\%$ (*year-on-year*). Fokus strategi termasuk pengelolaan inflasi pangan dan optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber*. Koordinasi antarinstansi terus diperkuat untuk menciptakan kebijakan nasional yang tepat dan komunikasi publik yang efektif untuk menjangkar ekspektasi inflasi.



Pemberian Fasilitas Perpajakan untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi

PMK Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus. Insentif PPN DTP ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 mulai masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.

Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi.

PMK Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dan terjangkau terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 60 Tahun 2023. PMK ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan rumah (*availability*), meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR (*accessibility*), menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni (*affordability*) serta menjaga keberlanjutan program dan fiskal (*sustainability*).

PMK baru ini mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi antara Rp162-Rp234 juta untuk tahun 2023 dan antara Rp166-240 juta untuk tahun 2024 untuk masing-masing zona. Setiap rumah mendapatkan pembebasan PPN 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp16-24 juta. Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

PMK Nomor 116 Tahun 2023 Tentang Perubahan PMK Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik). Namun demikian, peraturan tersebut belum mengakomodasi perlakuan atas potensi lebih bayar PPN oleh *dealer* yang menyerahkan kendaraan listrik yang mendapatkan PPN DTP, sehingga mengganggu *cashflow dealer*.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 116 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. PMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam penyerahan KBLBB yang memanfaatkan

insentif PPN DTP. PMK ini merupakan perubahan atas PMK 38 tahun 2023, dengan pokok perubahan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan pengaturan terkait pembuatan faktur pajak untuk penyerahan kepada pemungut PPN dan untuk pemakaian sendiri;
2. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan KBLBB yang memanfaatkan PPN DTP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah;
3. Ketentuan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah:
 - a. Pengusaha Kena Pajak dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah;
 - b. DJP tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah; dan
 - c. Terdapat pemenuhan kegiatan tertentu berupa penyerahan KBLBB roda empat tertentu dan/atau KBLBB bus tertentu ditanggung Pemerintah pada masa pajak yang diajukan pengembalian pendahuluan.
4. Dalam SPT masa PPN, pengusaha harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN untuk dapat mendapatkan pengembalian pendahuluan.
5. Kompensasi kelebihan pajak dari Masa Pajak sebelumnya diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
6. Tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak mengikuti PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

PMK Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Melalui PMK ini, dengan kriteria: (1) harga jual paling tinggi Rp5 miliar, dan (2) merupakan PPN terutang pada periode November–Desember 2023, sepanjang penyerahan fisik rumah, yang nantinya dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk satu orang atas pembelian satu rumah tapak atau satuan unit rumah susun, sepanjang tidak ada pembayaran uang muka atau cicilan sebelum 1 September 2023.

Untuk hunian dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar dapat menikmati PPN DTP yang ditanggung Pemerintah, paling banyak atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar. Persentase besaran PPN DTP diberikan sesuai ketentuan berikut: (1) Bila serah terima rumah siap huni yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan selama periode November 2023–Juni 2024 maka PPN DTP diberikan sebesar 100%; (2) Bila BAST dilakukan pada periode Juli–Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50%.



Pengaturan Berkelanjutan dalam Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan kerja bersama antara DPR RI dengan Pemerintah atas adanya kebutuhan pengaturan pada seluruh aspek sektor keuangan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk mereformasi regulasi sektor keuangan dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman serta ikut serta membangun perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan, setidaknya terdapat lima hal yang tertuang pada UU PPSK, yaitu:

1. Penguatan kewenangan dan tata kelola kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi;
2. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik
3. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan;
4. Perlindungan konsumen; dan
5. Literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

UU PPSK mengamanatkan berbagai inisiatif pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Adapun inisiatif-inisiatif tersebut, yaitu penyusunan peraturan pelaksanaan UU PPSK, konsolidasi perbankan, penguatan BPR/BPRS, penguatan perbankan syariah, program asuransi wajib, program penjaminan polis, harmonisasi program pensiun, unit aktuaria, *special purpose vehicle* (SPV), *trustee*, bursa karbon, pengaturan usaha jasa pembiayaan, pembinaan dan pengawasan LKM, integrasi pelaporan keuangan, komite standar laporan keuangan, peta jalan SDM sektor keuangan, taksonomi berkelanjutan, koordinasi pengaturan dan pengawasan inovasi teknologi sektor

keuangan (ITSK), usaha jasa bullion, dan penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan.

Setelah UU PPSK diundangkan pada 12 Januari 2023, pemerintah dan para *stakeholder* mulai merancang peraturan turunan, termasuk peraturan pemerintah. Sepanjang tahun 2023, setidaknya empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah disusun, dengan satu RPP telah ditetapkan menjadi PP.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan pemerintah ini mengatur sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penyidik OJK dalam pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan kewenangan koordinasi serta pengawasan oleh Polri kepada Penyidik OJK dalam pelaksanaan tugasnya. Peraturan Pemerintah (PP) ini juga mengatur kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh Polri maupun Penyidik OJK, kewenangan dan tanggung jawab Penyidik OJK, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Polri kepada Penyidik OJK, pembinaan teknis oleh Polri kepada Penyidik OJK, persyaratan dan kualifikasi Pegawai Tertentu untuk menjadi Penyidik OJK, serta kode etik Penyidik OJK. PP ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2023.



Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (RPP Aset Kripto)

Pasal 6 UU PPSK mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto. Telah diterbitkan KMK Pembentukan Panitia Antar-kementerian (PAK) yaitu KMK nomor 232 tahun 2023 yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Bappebti Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

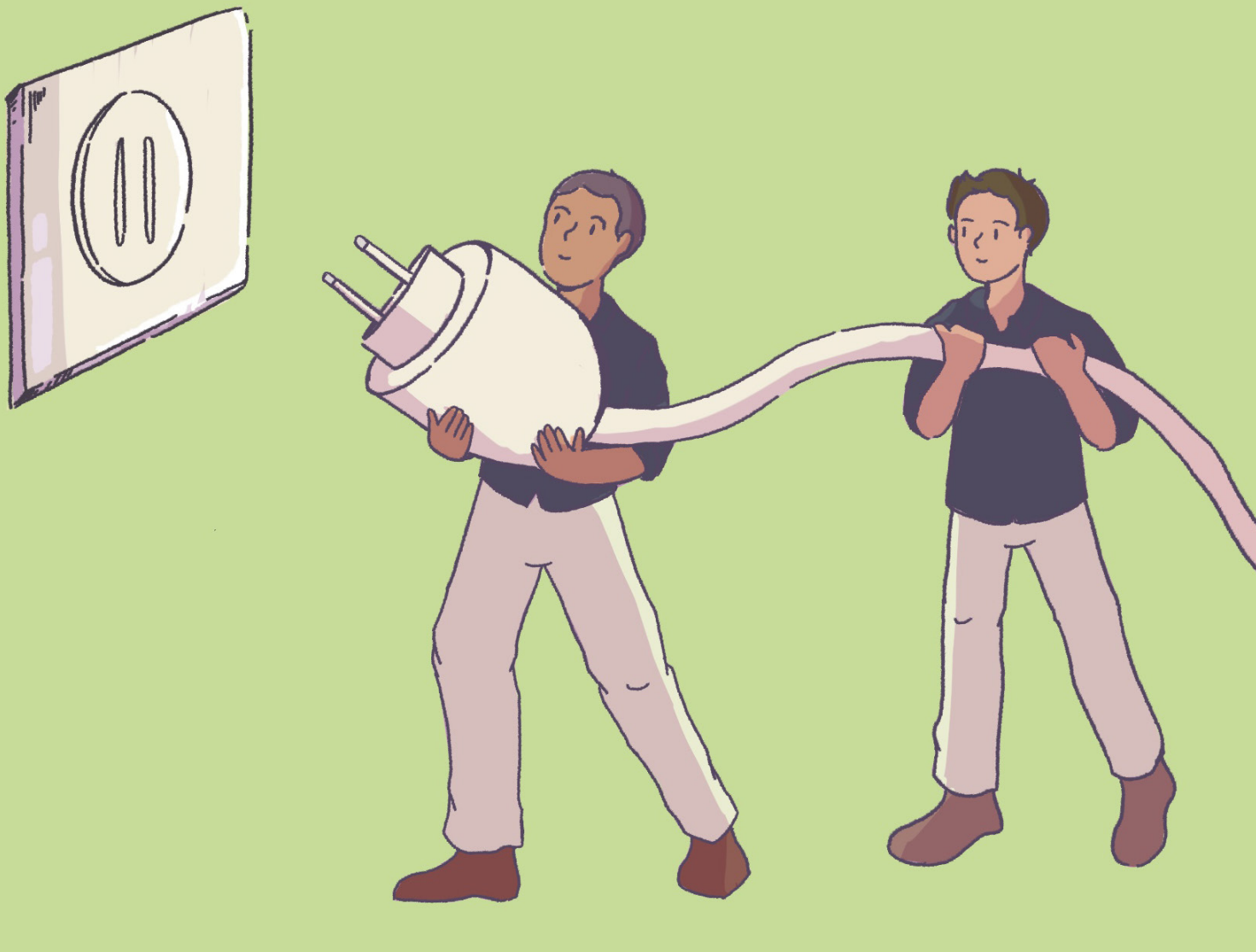
Rapat di tingkat PAK tanggal 7 Desember 2023 menyepakati kelanjutan proses pembahasan RPP Aset Kripto ke tahap harmonisasi, melalui penyampaian Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 22 Desember 2023 serta dilampiri oleh draf RPP yang telah diparaf oleh anggota PAK. Rapat pleno di tingkat harmonisasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023. RPP ini telah pula melaksanakan *meaningful participation* (MP) atau konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pada tanggal 5 Juni 2023.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (RPP Pungutan dan RKA OJK)

RPP Pungutan dan RKA OJK disusun sebagai amanat Pasal 36B dalam Pasal 8 angka 14 dan Pasal 37 ayat (4) dalam Pasal 8 angka 15 UU PPSK. Dalam upaya mendukung penyelesaian RPP ini, telah ditetapkan KMK Pembentukan Panitia Antar-kementerian dan/atau Antar-nonkementerian (PAK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan.

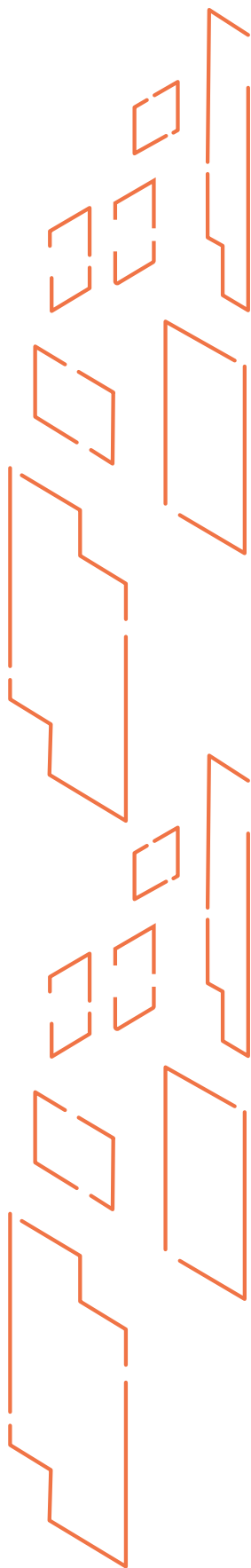
Pada pembahasan tingkat PAK yang terakhir tanggal 1 Desember 2023, para pihak telah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi. Selain proses penyusunan RPP, *meaningful participation* (MP) atau diskusi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023.





Dukungan Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan Melalui *Energy Transition Mechanism (ETM)*

Dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah Indonesia pada *Enhanced Nationally-Determined Contribution (ENDC)* dengan peningkatan target pengurangan emisi menjadi 31,89% (*unconditional*) pada ENDC dan menjadi 43,20% (*conditional*) pada ENDC, Pemerintah berupaya melakukan peningkatan porsi energi terbarukan dalam rangka pencapaian target bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan NDC Mitigation Roadmap, sektor energi membutuhkan porsi pendanaan terbesar. Indonesia telah menyusun peta jalan menuju transisi energi bersih hingga mencapai *Net Zero Emission (NZE)* di 2060. Setidaknya terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan demi transisi energi yang adil dan terjangkau. Pertama, pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik batu bara agar beralih ke sumber energi terbarukan. Kedua, pendanaan untuk investasi di sektor energi baru terbarukan. Ketiga, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya karena akan berdampak pada kehilangan pendapatan.



Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa dalam rangka percepatan pengakhiran waktu operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara dan/atau percepatan pengakhiran waktu kontrak perjanjian jual-beli listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara, Pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal. Dalam rangka menjalankan amanat dalam Perpres 112 Tahun 2022 tersebut, diterbitkan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. PMK ini diharapkan dapat mendukung percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan (*just*) dan terjangkau (*affordable*) melalui penyediaan fasilitas-fasilitas yang tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selain itu, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan KMK Nomor 470 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komite Pengarah Dalam Rangka Pengelolaan Platform Transisi Energi yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Pengarah terkait pengelolaan Platform Transisi Energi yang berisi pejabat setingkat pimpinan tinggi madya pada Kementerian/Lembaga dengan peran menentukan proyek yang akan diajukan untuk memperoleh fasilitas dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan dengan ADB telah menyelenggarakan Kajian Lingkungan dan Sosial Strategis guna memastikan proses identifikasi dan langkah mitigasi transisi energi memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi sosial. Sebagai bagian dari ETM pada tahun 2023, sedang didiskusikan upaya penghentian dini pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu pada PLTU Cirebon-1 dengan koordinasi bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Cirebon Electric Power (CEP), Indonesia Investment Authority (INA), dan Asian Development Bank (ADB) melalui penandatanganan *Framework Agreement* pada COP-28 di Uni Emirat Arab pada Desember 2023.



Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Tatanan Internasional

Di tengah kondisi perekonomian global yang sarat tantangan, Indonesia mengusung semangat multilateralisme dalam mencari solusi bersama untuk mengatasi berbagai tantangan sistemik global. Badan Kebijakan Fiskal mendukung berbagai strategi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional di berbagai forum dan lembaga keuangan internasional. Capaian pada tahun 2023 terkait hal ini antara lain:

Peningkatan Status Indonesia sebagai Pemegang Saham Terbesar Ke-3 di Islamic Development Bank



Indonesia memutuskan untuk memperkuat kemitraan Development Bank (IsDB) dengan meningkatkan kepemilikan saham di IsDB dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3. Pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, Dewan Gubernur IsDB secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia melalui mekanisme peningkatan modal khusus (*Special Capital Increase*).

Sebagai pemegang saham terbesar ke-3, Indonesia tidak hanya mengukuhkan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti IsDB, tetapi juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah. Kementerian Keuangan sebagai wakil Pemerintah Indonesia juga telah menghadiri berbagai pertemuan strategis sepanjang tahun 2023. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan pandangan mewakili negara berkembang, serta kepentingan Indonesia dalam agenda strategis nasional.

Perpanjangan Periode Posisi Indonesia sebagai Co-Chair pada *Coalition of Finance Ministers for Climate Action*



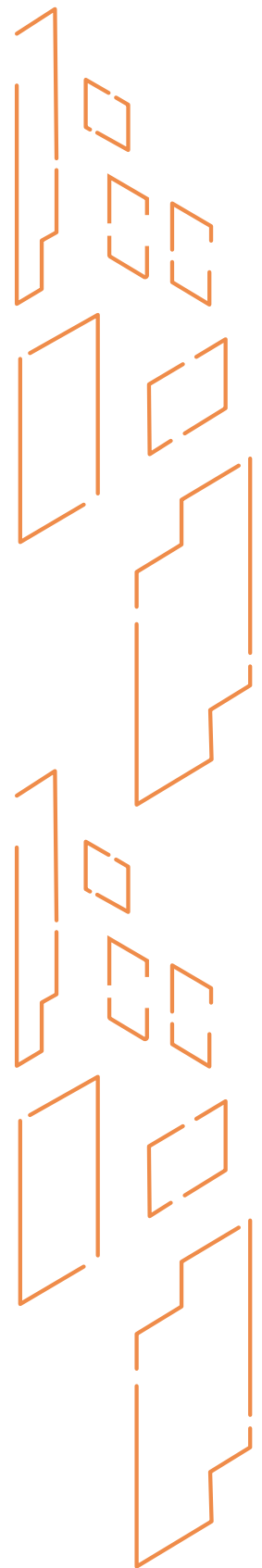
Pada pertemuan *8th Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action* tanggal 12 Oktober 2023, anggota *Coalition of Finance Ministers for Climate Action* (Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim) telah mendukung dan sepakat atas usulan perpanjangan masa jabatan Indonesia sebagai *Coalitions Co-Chair* selama satu tahun. Perpanjangan ini merupakan yang kedua dan terakhir bagi Indonesia. Berdasarkan proses seleksi *Co-Chair*, Indonesia akan melanjutkan tampuk *Co-Chair* hingga April 2025 sejak tahun 2021, bersama dengan keketuaan Belanda yang sebagai *Co-Chair* periode 2023–2025. Keketuaan Indonesia pada koalisi ini merupakan salah satu refleksi keberhasilan diplomasi Indonesia menjadi *champion* dan memimpin aksi iklim global.

Kesiapan Indonesia Dalam Proses Akses Menjadi Anggota OECD

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan minat dan intensi untuk menjadi anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Intensi Indonesia tersebut telah direspon salah satunya dengan kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta untuk menemui Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2023. Selanjutnya, Menteri Keuangan diundang menghadiri pertemuan *Update on Indonesia's Request to Start the OECD Accession Process* di Kantor Pusat OECD, Paris tanggal 10 Oktober 2023. Pertemuan OECD Council dipimpin oleh Sekjen OECD yang merangkap sebagai Ketua OECD Council dan dihadiri oleh para Duta Besar Anggota OECD yang menjadi Wakil Tetap untuk OECD di Paris.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan memaparkan sejumlah capaian dan komitmen untuk melanjutkan reformasi struktural, serta transformasi pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau sebagai bagian APBN beberapa tahun terakhir. Termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi platform ETM. Seluruh anggota OECD menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Sejumlah negara anggota OECD juga menyampaikan tawaran berbagi pengalaman dan transfer pengetahuan yang dapat membantu Indonesia dalam tahapan akses menjadi anggota OECD. Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan minat dan intensi untuk menjadi anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Intensi Indonesia tersebut telah direspon salah satunya dengan kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta untuk menemui Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2023. Selanjutnya, Menteri Keuangan diundang menghadiri pertemuan *Update on Indonesia's Request to Start the OECD Accession Process* di Kantor Pusat OECD, Paris tanggal 10 Oktober 2023. Pertemuan OECD Council dipimpin oleh Sekjen OECD yang merangkap sebagai Ketua OECD Council dan dihadiri oleh para Duta Besar Anggota OECD yang menjadi Wakil Tetap untuk OECD di Paris.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan memaparkan sejumlah capaian dan komitmen untuk melanjutkan reformasi struktural, serta transformasi pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi hijau sebagai bagian APBN beberapa tahun terakhir. Termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi platform ETM. Seluruh anggota OECD menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Sejumlah negara anggota OECD juga menyampaikan tawaran berbagi pengalaman dan transfer pengetahuan yang dapat membantu Indonesia dalam tahapan akses menjadi anggota OECD.

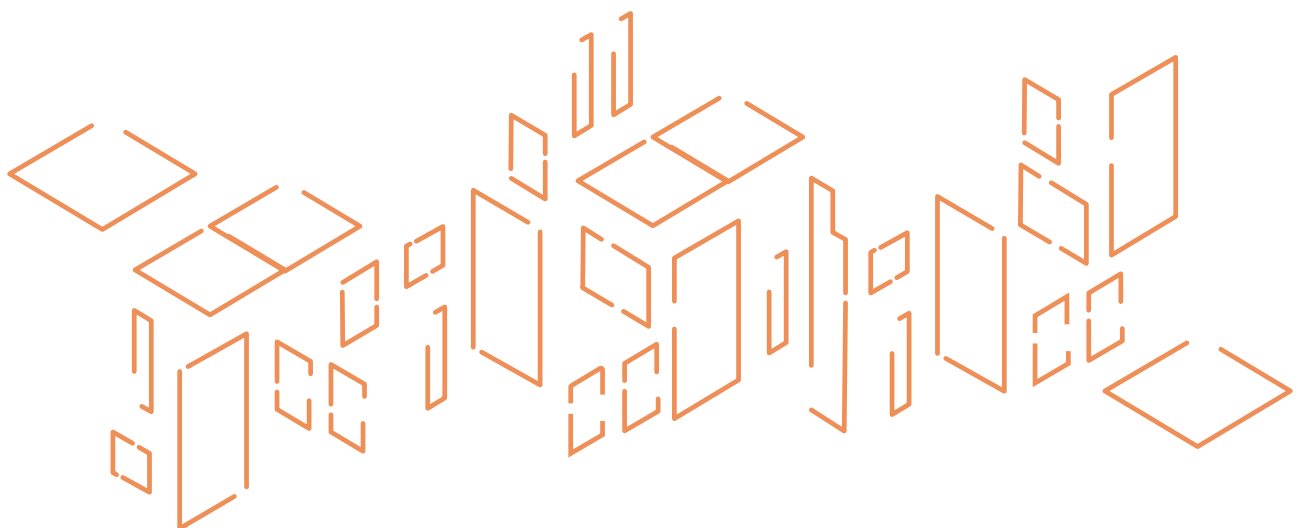


Pertemuan Internasional Strategis

Sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan menghadiri berbagai pertemuan strategis berskala internasional, antara lain: (i) Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G7 di Jepang, (ii) *Paris Summit for a New Financing Pact* (Paris Summit 2023) di Prancis, dan (iii) *Berlin Global Dialogue* di Jerman. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia menyampaikan pandangan mewakili negara berkembang serta kepentingan Indonesia terkait isu-isu yang menjadi agenda strategis nasional.

Secara umum, tujuan dari narasi yang terus-menerus disampaikan oleh Delegasi RI dalam berbagai pertemuan dan forum internasional sepanjang 2023 adalah:

1. Menegaskan posisi Indonesia di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia, misalnya melalui peningkatan pengaruh keanggotaan di lembaga keuangan internasional dan kepemimpinan di berbagai forum;
2. Meminta dukungan internasional untuk mencapai target berbagai agenda prioritas nasional, di antaranya aspek kesehatan global dan pemenuhan kebutuhan pembiayaan perubahan iklim dan transisi energi;
3. Menggaungkan dan mendorong implementasi capaian Presidensi G20 Indonesia berupa *concrete deliverables* bagi perekonomian global;
4. Mempromosikan dan menyelaraskan upaya pencapaian keberhasilan terkait prioritas dan target Ketekunan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023;
5. Mendorong berbagai lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral agar menyusun kerangka yang jelas dan transparan serta menyediakan pendanaan murah dan terjangkau bagi negara berkembang;
6. Membagi *insight* dan pengalaman serta melakukan *showcase* atas berbagai capaian Indonesia dalam aksi iklim, misalnya transisi energi, sehingga menunjukkan komitmen dan kepemimpinan Indonesia yang kuat dalam aksi iklim global dan mengamplifikasi suara negara berkembang dalam pengambilan keputusan di tingkat global;
7. Menyampaikan kondisi ekonomi terkini di Indonesia dan komitmen jangka panjang untuk terus melakukan reformasi struktural, dengan fokus menjaga anggaran negara yang sehat, mendorong transformasi ekonomi serta keberlanjutan fiskal yang sangat penting untuk kredibilitas, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 (ASEAN Chairmanship 2023)



Sesuai ketentuan pada *ASEAN Charter* yang berlaku efektif sejak 15 Desember 2008, rotasi Keketuaan ASEAN (*ASEAN Chairmanship*) dilaksanakan secara alfabetis negara anggota dalam bahasa Inggris. Indonesia kembali menjalankan peran Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, setelah terakhir kali menjabat pada tahun 2011. Persiapan *ASEAN Chairmanship 2023* dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Sekretariat Nasional (Setnas), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations*).

Berdasarkan Perpres tersebut, keanggotaan Setnas ASEAN terbagi ke dalam tiga pilar yaitu (i) Pilar Politik dan Keamanan; (ii) Pilar Ekonomi; dan (iii) Pilar Sosial Budaya; yang diampu oleh Kementerian Koordinator terkait. Kerja sama sektor keuangan ASEAN (*finance sector*) merupakan salah satu forum sektoral di bawah Pilar Ekonomi yang diampu Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK. Keketuaan ASEAN 2023 mengusung tema *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* yang menunjukkan relevansi strategis ASEAN dalam kerja sama global. Sedangkan *Epicentrum of Growth* merepresentasikan kemajuan di segala pilar kehidupan serta harapan agar ASEAN menjadi pusat pertumbuhan bagi para anggotanya.

Kementerian Keuangan juga memiliki andil besar dalam mewujudkan target nasional penyelenggaraan *ASEAN Chairmanship 2023*. Sektor keuangan yang diampu oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berada di bawah Pilar Ekonomi yang merupakan salah satu dari tiga pilar utama kerja sama ASEAN (dua pilar lainnya adalah Politik-Keamanan dan Sosial-Budaya). Pada Keketuaan ASEAN di 2023, Jalur Keuangan ASEAN mendorong tiga *Strategic Thrusts*, yaitu: (i) *Recovery-Rebuilding*, (ii) *Digital Economy*, and (iii) *Sustainability*. *Strategic Thrusts* ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai *megatrend* dan tantangan strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat internasional terkait, termasuk pertumbuhan ekonomi pascapandemi, pemulihan ekonomi inklusif, daya saing regional, peningkatan digitalisasi, revolusi industri, gangguan rantai pasokan, transisi energi, ekonomi sirkular, keuangan berkelanjutan, dan perubahan iklim. Agenda yang diusung Keketuaan

Indonesia pada ASEAN 2023 juga diselaraskan dengan capaian Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022.

Di bawah jalur keuangan, beberapa pertemuan tingkat Menteri yang dilaksanakan terdiri atas *ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM)*, *ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM)*, dan *ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM)*.

Adapun manfaat ASEAN Chairmanship 2023 bagi Indonesia yaitu:

Manfaat Jangka Pendek:

Pencapaian Agenda Prioritas Pemerintah

- Pemenuhan target Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang merupakan agenda prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo periode (2019–2024), khususnya terkait isu Pendidikan, pelatihan, dan Kesehatan.
- Melanjutkan dan memperkuat tujuan agenda diplomasi ekonomi yang telah digulirkan pada berbagai forum internasional, termasuk G20.
- Membuka peluang pengenalan budaya dan produk nasional kepada komunitas ASEAN dan Internasional. Selain itu, penyelenggaraan seluruh rangkaian pertemuan ASEAN di Indonesia juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi, terutama pada sektor akomodasi, transportasi, serta makanan dan minuman.

Manfaat Jangka Panjang:

Penguatan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN

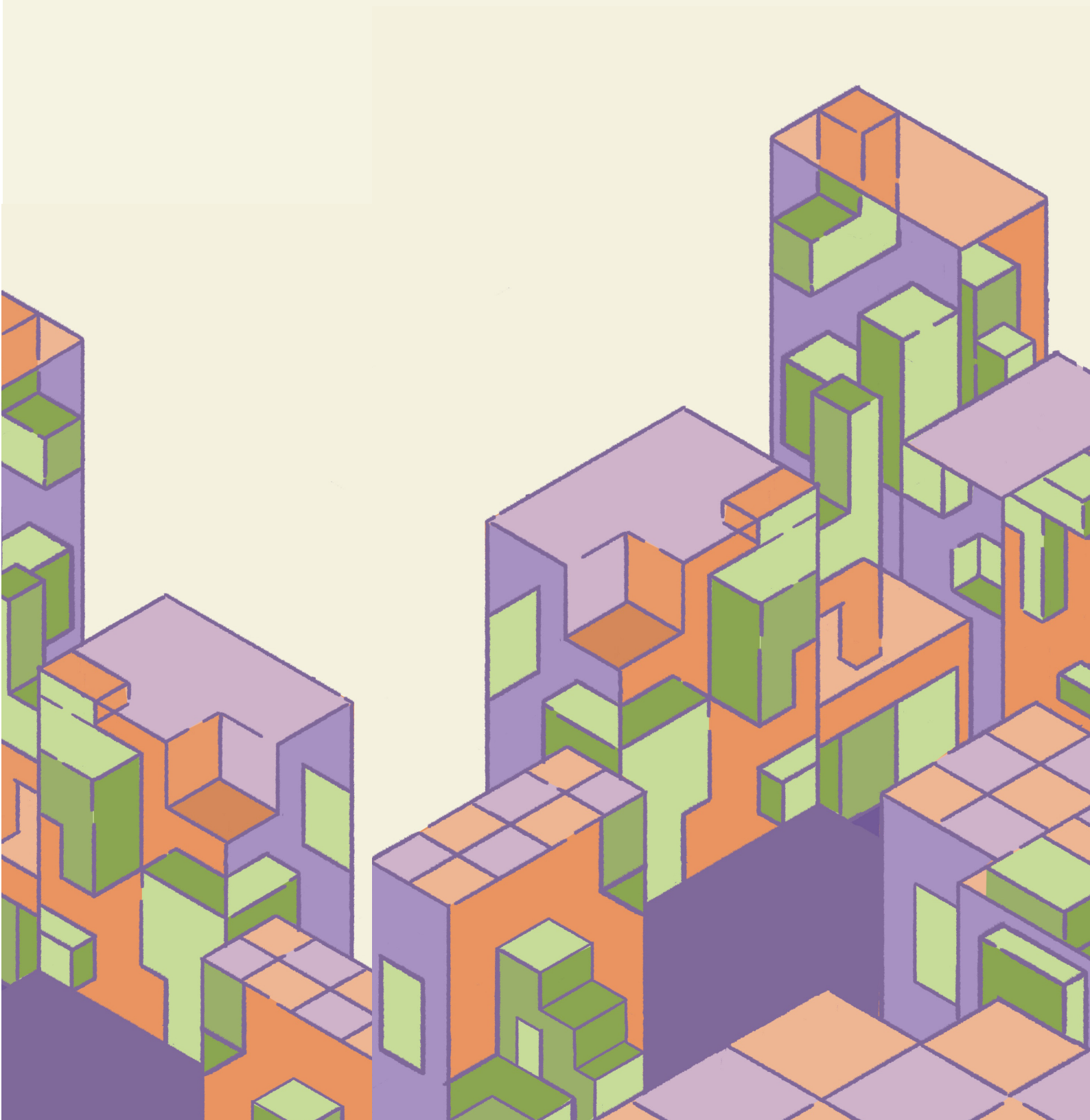
- Mewujudkan peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia.
- Mengamankan kepentingan nasional pada isu-isu yang menjadi perhatian ASEAN terkait pilar politik-keamanan, perekonomian dan sosial-budaya.
- Memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan di kawasan, dengan peningkatan dukungan mitra pembangunan baik kepada Indonesia maupun ASEAN.
- Menciptakan peluang untuk ide dan inisiatif baru dalam mengatasi tantangan baru dan isu-isu krusial lainnya yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

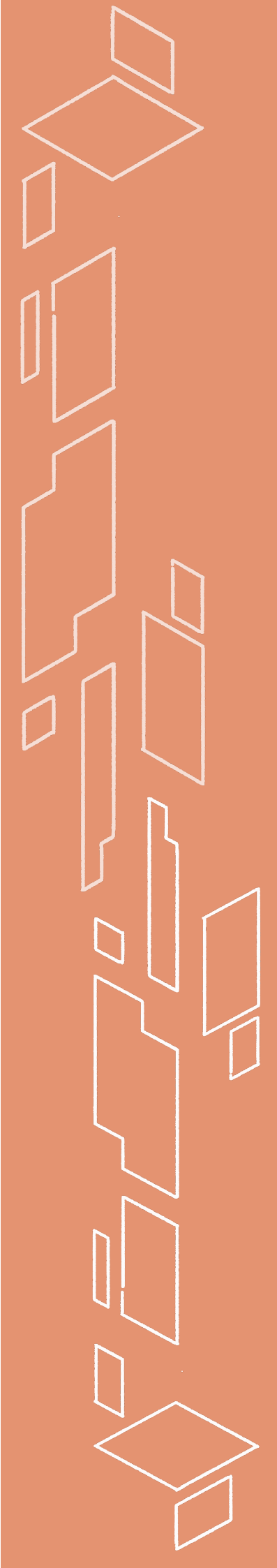


ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting Working Group (AFCDM-WG) Bali

BAB 2

CAPAIAN UMUM





Badan Kebijakan Fiskal mengemban tanggung jawab yang besar untuk memastikan stabilitas ekonomi yang mendukung pemulihan nasional di tengah ketidakpastian global. Namun kehidupan bernegara harus tetap berjalan, kemakmuran rakyat tak bisa menunggu.

Bab ini memuat berbagai strategi pengelolaan fiskal dan sektor keuangan, disiplin, sambil meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang lebih inklusif dan efisien. Kerja sama internasional di jalur keuangan dan pembiayaan perubahan iklim juga turut andil dalam stabilitas perekonomian ke depannya.



EKONOMI MAKRO & APBN



Penyusunan Regulasi tentang Nilai Kurs

Badan Kebijakan Fiskal juga mempunyai tugas reguler untuk menyusun Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai keperluan Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan (KMK Kurs). KMK ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang nilai tukar atau kurs pajak yang berlaku dalam periode waktu tertentu (mingguan). Pada pertengahan tahun 2023 penandatanganan KMK Kurs didelegasikan kepada Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Investor Relation Unit dan Lembaga Rating (IRU)

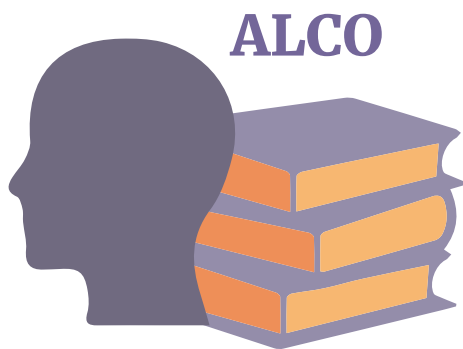
Pada tahun 2023, *Investor Relation Unit* dan *Lembaga Rating* (IRU) Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan 42 pertemuan dengan investor dari berbagai sektor, termasuk *fixed income*, ekuitas, dan sektor riil. Selain itu, IRU juga menyelenggarakan *Analyst Meeting*. IRU juga berperan aktif dalam pelaksanaan *roadshow* terkait penerbitan Surat Utang Negara Konvensional maupun syariah. Selama 2023 telah terselenggara empat *roadshow* di Eropa, Amerika, Kawasan Timur Tengah, Kuala Lumpur, dan Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dari Badan Kebijakan Fiskal memberikan sosialisasi tentang kondisi makro dan fiskal terkini Indonesia. Para pimpinan juga aktif berdiskusi tentang topik-topik yang menjadi perhatian investor dan analis, seperti: prospek ekonomi, kinerja fiskal, dan arah kebijakan pasca-Pemilu 2024, isu-isu *outlook* Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, serta risiko geopolitik dan dampak Pemilu 2024 terhadap reformasi struktural juga terus dipantau.

IRU juga bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi dengan lembaga *rating* yang melakukan penilaian independen terhadap kelayakan kredit Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat empat kali penilaian kredit *rating* Indonesia oleh empat lembaga *rating*. S&P memberikan reafirmasi peringkat kredit Indonesia (*BBB Outlook Stable*), begitu juga dengan Fitch (*BBB Outlook Stable*) dan Moody's (*Baa2 Outlook Stable*). R&I mengonfirmasi peringkat kredit Indonesia pada level BBB+ dan merevisi *outlook*-nya dari *Stable* ke Positif. Penilaian ini merupakan apresiasi terhadap resiliensi ekonomi Indonesia oleh lembaga internasional, dan *rating* utang negara menjadi penting sebagai referensi risiko investasi bagi para investor. Dengan demikian, menjaga posisi peringkat kredit menjadi hal yang krusial bagi Indonesia.

Dukungan Kajian

Kajian Fiskal Regional, ALCO Regional, dan Regional Chief Economist



Sehubungan dengan mandat pimpinan untuk penguatan analisis dan kinerja perekonomian daerah melalui kantor wilayah Kementerian Keuangan di daerah, Badan Kebijakan Fiskal berkontribusi dalam beberapa kegiatan atau program yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Program tersebut adalah Kajian Fiskal Regional (KFR), ALCO Regional, serta penguatan kapasitas *Regional Chief Economist/ RCE* (Kepala Kantor Wilayah DJPb).

Dalam menjalankan program-program tersebut, Badan Kebijakan Fiskal ikut berkontribusi untuk mendukung penguatan kapasitas pada program ALCO Regional dan RCE, serta melakukan *review* terhadap KFR yang disusun oleh DJPb. Untuk penguatan RCE di seluruh wilayah Indonesia, Kanwil DJPb bekerja sama dengan para akademisi yang dipilih (*local expert*) bersama-sama menyusun kajian dan analisis ekonomi dan fiskal daerah. Selain dibentuk *local expert* (sesuai dengan jumlah kanwil DJPb), dibentuk juga *regional expert* yang dikoordinir oleh Badan Kebijakan Fiskal. KMK penunjukan *local expert* dan *regional expert* ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK Nomor 236 Tahun 2023 tentang Penetapan *Regional Expert* Dan *Local Expert* Ekonomi Dan Fiskal Tahun Anggaran 2023. Bersamaan dengan penetapan KMK, diselenggarakan acara *kick off Local Expert* dan *Regional Expert* pada tanggal 4 Agustus 2023.

Selanjutnya, seluruh RCE, *local expert*, dan *regional expert* mengikuti agenda seminar internasional AIFED dari Badan Kebijakan Fiskal pada 6–7 Desember 2023. Selain itu, secara *back-to-back* juga diadakan *Regional Chief Economist Forum* (RCEF) yang menjadi *side event* dari AIFED pada tanggal 7–8 Desember 2023. RCEF merupakan pertemuan seluruh RCE, *local expert*, dan *regional expert* dengan para pimpinan Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Dalam pertemuan tanggal 7 Desember 2023, didiskusikan kinerja dan evaluasi program selama tahun 2023 serta arahan dari pimpinan Kementerian Keuangan.

Setelah itu, tanggal 8 Desember 2023 diadakan Kuliah Umum dengan narasumber Wakil Menteri Keuangan dan Bapak Chatib Basri, yang membahas perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan regional.

ALCO Regional merupakan struktur ALCO pada tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja dalam mendukung peran ALCO pada tingkat pusat berdasarkan data dan informasi yang bersifat lokal dan regional. Tujuan ALCO Regional adalah meningkatkan data dukung regional, peran Kanwil, koordinasi, dan sinergi antar unit vertikal di Kementerian Keuangan, mensinergikan analisis data pusat dan regional, serta memperkuat koordinasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan analisis data ALCO Regional menggunakan tema/isu analisis yang sama dengan ALCO Pusat dan menggunakan format rapat koordinasi yang sama dengan ALCO Pusat yaitu rapat teknis, rapat deputi, dan rapat ALCO. Kegiatan ALCO Regional berada dibawah DJPB. Supervisi/asistensi dari Badan Kebijakan Fiskal serta unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya, serta *local and regional expert* dari universitas dalam penyusunan analisis data ALCO Regional. PKEM juga berperan sebagai narasumber dalam beberapa kegiatan ALCO Regional, yaitu diseminasi ALCO Inter Regional Maluku-Papua pada Mei 2023 dan Koordinasi Regional 2 Jawa untuk penguatan fungsi *Regional Chief Economist* (RCE) pada Juni 2023. Terkait penguatan dan perbaikan Laporan ALCO Regional, DJPB juga melakukan program *Secondment*. Dalam program *secondment* tersebut, sepanjang tahun 2023, tiga orang pegawai dari Badan Kebijakan Fiskal telah ditunjuk sebagai *seconded* dan menjalankan *secondment* di tiga daerah (Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua) sesuai dengan *timeline* yang ditentukan.



Ke depannya, kerja sama dengan DJPB terkait penguatan RCE akan terus dilakukan khususnya dalam hal penguatan substansi, dengan mandat untuk terlibat pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta secara rutin mengadakan *Regional Chief Economist Forum* (RCEF) setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan AIFED.

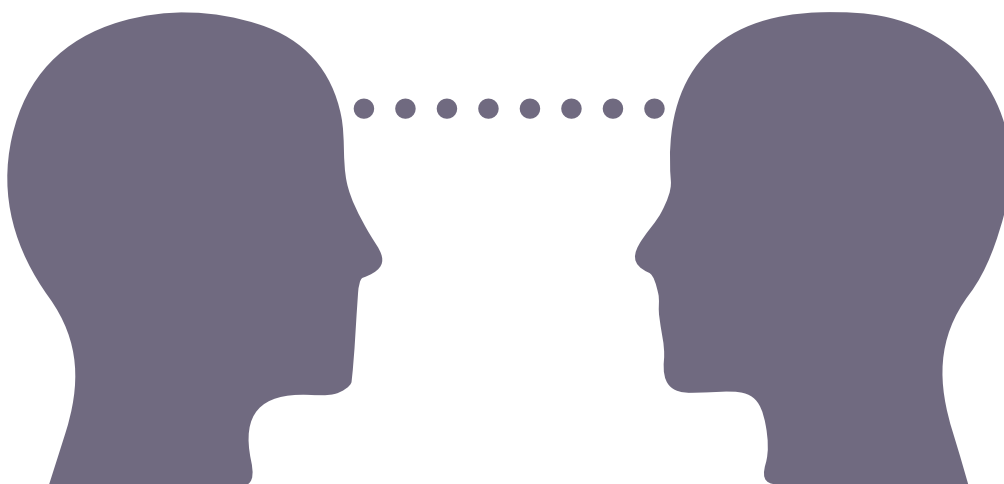
Knowledge Sharing dan Workshop Series on Multidimensional Poverty

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan *United Nations International Children's Emergency Fund* Indonesia, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan “Knowledge Sharing dan Workshop Series on Multidimensional Poverty” pada tahun 2023. *Multidimensional Poverty Index* (MPI) merupakan salah satu pendekatan yang memiliki signifikansi cukup besar dalam memahami dan mengatasi kemiskinan, selain pengukuran kemiskinan secara moneter.

Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai kemiskinan multidimensi; (2) mengidentifikasi dan menganalisis berbagai deprivasi yang dihadapi oleh masyarakat dan anak-anak dalam dimensi kehidupan penting seperti misalnya kesehatan, pendidikan, dan standar hidup; (3) mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan dalam aspek kemiskinan multidimensi tertentu sehingga dapat didesain secara efektif target intervensinya; dan (4) menyediakan input berbasis bukti untuk memformulasikan kebijakan alokasi anggaran bagi penduduk miskin.

Kegiatan “*Knowledge Sharing dan Workshop Series on Multidimensional Poverty*” dilaksanakan dalam enam kali *workshop* selama bulan Agustus–November 2023 secara *hybrid* di Badan Kebijakan Fiskal. Narasumber adalah Putu Geniki Lavinia Natih (FEB UI), Bappenas, dan BPS. Sementara itu, peserta kegiatan berasal dari berbagai instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPK), Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, TNP2K, BPS, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini dimulai dengan gambaran pencapaian Indonesia terkait SDGs dan realisasi fakta bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengukuran nasional yang memantau kemiskinan secara multidimensi. Selain itu, dilakukan juga tinjauan mengenai *Capability Approach* dan metode *Alkire Foster* yang menawarkan kerangka konkret dan empiris untuk menerapkan pendekatan tersebut dalam pengukuran kemiskinan multidimensi. Terdapat juga penyebaran *online anonymous questionnaires* untuk mengidentifikasi area kunci deprivasi yang perlu menjadi titik fokus untuk mencapai target pembangunan Indonesia 2045. Selain itu, untuk peningkatan kompetensi teknis terkait pengukuran kemiskinan multidimensi, narasumber juga membagikan pengetahuan dalam mengolah data Susenas untuk dapat mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan.



Analisis Penerapan *Green Industry* Sektor Prioritas dalam Rangka Mendorong Produktivitas Nasional

Pandemi COVID-19 mengoreksi PDB potensial Indonesia menjadi lebih rendah dibanding prapandemi. Oleh karena itu, dibutuhkan sektor manufaktur yang kuat untuk kembali ke jalur aspirasi 2045, dengan revitalisasi sektor manufaktur yang berorientasi ekspor dan investasi sebagai mesin pertumbuhan yang berkualitas. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai industri manufaktur di dalam negeri. Melihat perkembangan permintaan dunia yang mengarah pada produk dengan teknologi sedang dan tinggi serta barang antara, diperlukan transformasi industri untuk menangkap peluang yang ada di pasar global tersebut.

Peningkatan kapasitas produksi pada industri utama seperti industri logam dasar diperkirakan akan terus meningkat seiring meningkatnya permintaan ekspor dan domestik. Namun demikian, perkembangan industri saat ini belum sesuai dengan skenario *net zero emission*. Sektor industri pengolahan didominasi oleh bahan bakar fosil, yang mencakup 76,6% konsumsi energi final. Ketergantungan pada bahan bakar fosil meningkatkan tantangan transisi energi di sektor ini, minimnya aspirasi, substitusi teknologi, substitusi bahan baku, dan sumber daya manusia. Saat ini, belum ada dokumen yang memberikan pedoman untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil di sektor industri, baik untuk energi maupun pengolahan material. Dokumen NDC hanya menetapkan target efisiensi energi pada industri sebesar 31,69 MT CO₂e dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 27,28 MT CO₂e.

Di level korporasi, pengelolaan risiko lingkungan menjadi hal yang vital. Mismanajemen risiko dapat mengancam ketercapaian agenda aksi iklim sekaligus keberlangsungan perusahaan. Untuk mengelola risiko tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan risiko lingkungan atau *Environmental Risk Management System* (ERMS) yang efektif dan terpadu sebagai bagian dari aktivitas utama perusahaan. ERMS juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang-peluang pasar dalam: 1) pengembangan lini bisnis baru dan produk baru; 2) ekspansi pangsa pasar; dan 3) mendapat pendanaan untuk upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penggunaan teknologi sistem informasi digital yang terpadu dan mencapai level maturitas INDI 4.0 yang tinggi dapat menjadi faktor pemampu (*enabler*) sekaligus *game changer* dalam penerapan ERMS.

Untuk mendorong industri mengimplementasikan ERMS dan mewujudkan konsep *green industry*, Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun kebijakan,



baik fiskal dan nonfiskal. Dari sisi fiskal, melalui instrumen APBN, Pemerintah memberikan dukungan berupa alokasi anggaran serta pemberian insentif. Sedangkan dari sisi nonfiskal, Pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi perizinan, sertifikasi, peng-hargaan, sampai dengan dukungan pemasa-ran. Namun demikian, kebijakan yang diber-ikan masih tidak terpusat, tumpang-tindih, dan kurang mendorong kompetisi.

Pada level korporasi, perusahaan terbuka (*go public*) di Indonesia telah didorong untuk melakukan pengungkapan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Kerangka regulasi yang mengatur hal ini telah tersedia melalui UU

PT, UU Pengesahan *Paris Agreement*, Peraturan Presiden RI untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta POJK Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau. Dalam standar akuntansi pun, kini *International Financial Reporting Standards* (IFRS) S1 dan S2 telah mengharmoniskan Laporan Keuangan dengan *Sustainability Report*.

Dengan demikian, ada banyak faktor mengapa industri perlu menerapkan konsep *green industry*. Pertama, industri yang menerapkan *green industry* akan mengurangi atau menghilangkan dampak negatif ke lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, dan polusi lingkungan. Kedua, industri akan menjadi lebih efisien dengan inovasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi limbah. Ketiga, industri akan mendapatkan manfaat ekonomi jangka panjang dengan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan reputasi yang lebih baik dari konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan. Keempat, penerapan *green industry* merupakan bentuk kepatuhan industri terhadap peraturan hukum terkait lingkungan, baik dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peraturan dari kawasan industri, maupun dari peraturan daerah.

Analisis Potensi Perdagangan Internasional Indonesia dan Implikasinya Terhadap Fiskal

Sejak bulan Mei 2020, neraca perdagangan Indonesia secara konsisten terus mengalami surplus selama kurun waktu 43 bulan beruntun hingga data yang dipublikasikan terakhir, yakni bulan November 2023. Di tengah kinerja yang cukup baik tersebut, Pemerintah perlu memperhatikan sedikitnya empat hal penting, yakni (i) nilai surplus neraca perdagangan yang cenderung menurun; (ii) kontribusi perdagangan internasional terhadap PDB Indonesia terus mengalami penurunan; (iii) komposisi ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang tidak memiliki nilai tambah; dan (iv) partisipasi Indonesia dalam *Global Value Chain* (GVCs) yang masih rendah dan terus menurun. Dinamika perdagangan internasional Indonesia tersebut secara langsung juga akan memengaruhi fiskal Indonesia, khususnya melalui beberapa instrumen fiskal yang terkait dengan aktivitas ekspor dan impor.



Mencermati kondisi-kondisi perekonomian, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan peranan perdagangan internasional, didukung dengan kekayaan alam Indonesia yang memiliki komoditas strategis yang berkontribusi besar secara volume di dunia. Potensi dari perdagangan internasional dapat menjadi sumber pendorong pertumbuhan dan optimalisasi penerimaan perpajakan. Studi juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional berperan dalam

meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi yang lebih besar, dimana negara-negara yang aktif secara internasional cenderung lebih produktif (Kim et al., 2013; Shahbaz, 2012; Dong, 2014). Selain itu, temuan dari beberapa studi tentang keterbukaan perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya menunjukkan bahwa perdagangan bebas berdampak positif terhadap sumber penerimaan dalam negeri sebagai persentase dari PDB dengan meningkatkan mobilisasi jenis pendapatan dalam negeri ini (Crivelli dan Gupta, 2014; Brun et al., 2015; Thomas dan Trevifo, 2013).

Studi ini bertujuan untuk mengukur potensi perdagangan internasional Indonesia, serta seberapa besar implikasinya terhadap fiskal (penerimaan perpajakan). Pemecahan masalah dilakukan dengan cara: (1) melakukan *profiling* data transaksi perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara mitra; (2) mengevaluasi hambatan dan tantangan pelaku usaha dalam administrasi/pelaporan transaksi perdagangan yang terkait dengan perpajakan; (3) melakukan pemetaan insentif dan program dalam rangka mendorong perdagangan internasional atas komoditas-komoditas strategis Indonesia; (4) menghitung dampak perdagangan internasional terhadap perpajakan dari komoditas strategis Indonesia; dan (5) menghitung dampak perdagangan internasional terhadap kinerja makroekonomi dan sektoral dari komoditas-komoditas strategis Indonesia.

Dari hasil kajian, dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

(1) mempertahankan dan jika memungkinkan meningkatkan kinerja perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara mitra dagang yang termasuk kedalam grup 2; (2) mengkombinasikan strategi pendalaman dan perluasan pasar ekspor Indonesia untuk mitra dagang grup 1; (3) Dibutuhkan peran serta lintas K/L dalam melakukan strategi pertama dan kedua, termasuk Kementerian Keuangan (Bea Cukai), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian; dan (4) pentingnya layanan konsultasi yang cepat tanggap (*fast-response*) dalam kaitannya dengan pelaporan atau administrasi kegiatan ekspor dan impor.

Analisis Potensi Penerimaan Perpajakan Ekonomi Digital

Masifnya disrupsi teknologi pada beberapa dekade terakhir memicu adanya pergeseran terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berkomunikasi hingga kegiatan ekonomi. Pergeseran perilaku masyarakat tersebut tentu akan memicu berbagai dampak, dari sisi ekonomi muncul berbagai model bisnis baru untuk menjawab permintaan pasar, sementara dari sisi pajak, tantangan timbul dari sisi sulitnya memajaki aktivitas ekonomi yang belum diatur dalam peraturan perpajakan.

Kajian ini membatasi ruang lingkup pada empat area perpajakan yang menimbulkan tantangan utama dalam sistem perpajakan. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang menggunakan platform *e-commerce* dalam negeri. Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul dari transaksi *e-commerce* dalam negeri. Ketiga, PPN atas transaksi impor atau berasal transaksi yang difasilitasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri. Keempat, PPh Pasal 23 atas penghasilan bunga yang diperoleh nasabah *peer-to-peer* (P2P) *lending*.

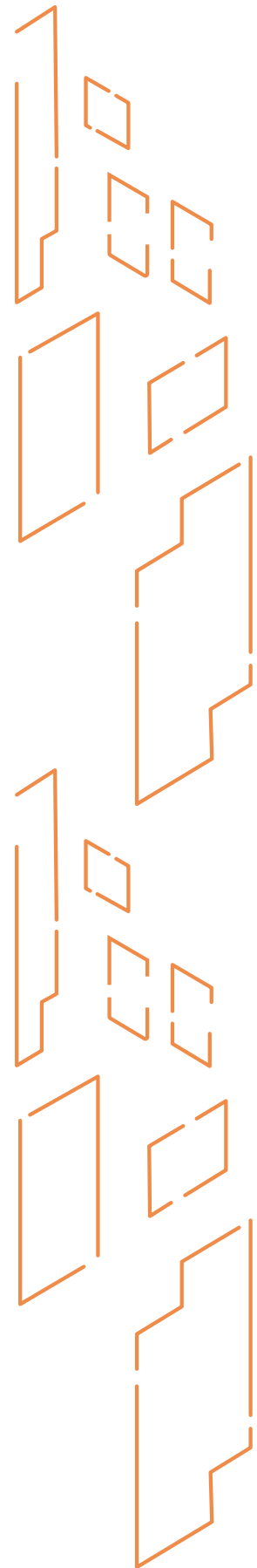
Melihat besarnya potensi peran *e-commerce* dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari ekosistem digital dalam *e-commerce* yang diikuti dengan berbagai tantangan barunya, diperlukan suatu strategi mitigasi risiko yang tepat sasaran. Pada umumnya, tantangan yang timbul dari kebijakan PPh maupun PPN yang diusulkan adalah terjadinya benturan antara ketentuan perpajakan umum beserta kewajibannya dengan aspek administrasi baru akibat adanya pemotongan dan pemungutan oleh *e-commerce*. Dibutuhkan suatu prakondisi beserta tahapan penerapan yang dilakukan dengan memerhatikan kesiapan *e-commerce* beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Mitigasi risiko yang



dapat dilakukan ialah dengan menyusun peta jalan (*roadmap*) implementasi kebijakan secara bertahap. Tahap pertama merupakan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi data transaksi oleh penyedia *marketplace* kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tahap kedua, evaluasi hasil rekapitulasi data. Tahap ketiga, pemotongan dan pemungutan pajak.

Rekomendasi yang diusulkan: (1) Terkait *e-commerce* di dalam negeri yaitu pemotongan PPh sebaiknya hanya dikenakan secara final pada pelaku usaha UMKM yang memanfaatkan rezim tersebut, sementara di luar rezim tersebut tidak dilakukan pemotongan. Pemotongan PPh final tersebut dilakukan hanya jika omzet penjualan telah melewati Rp500 juta di *platform* tersebut; (2) Dalam konteks PPN, diusulkan mekanisme pengenaan PPN final. *E-commerce* perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha terkait status objek/nonobjek barang dan jasa yang diperjualbelikan, yaitu dengan pelaporan oleh pelaku usaha sendiri terkait barang dan jasa mana yang tidak terutang PPN, di luar itu, *e-commerce* dapat melakukan pemungutan PPN; (3) Dalam mengoptimalkan potensi penerimaan PPN atas barang tak berwujud dan jasa, terdapat dua rekomendasi yang perlu dipertimbangkan, yaitu pengumpulan data dan informasi dalam konteks penunjukkan pelaku usaha PMSE luar negeri sebagai pemungut PPN dan penegakan hukum yang efektif atas pemungut PPN PMSE luar negeri yang tidak patuh.

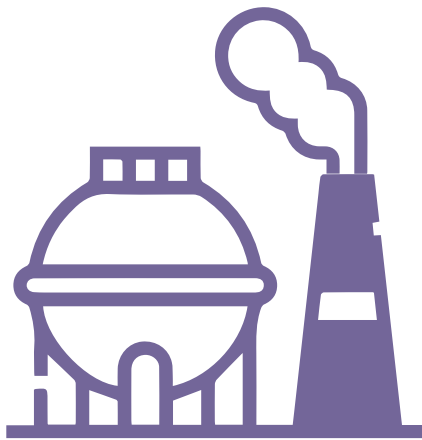
Selanjutnya, terdapat dua opsi yang tersedia bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri yang tidak patuh, yaitu langkah pemulihan utang terhadap pelaku usaha PMSE yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN). Adapun pemulihan utang tersebut dilakukan dalam dua cara. Pertama, penyitaan aset domestik yang teridentifikasi. Kedua, bekerja sama dengan otoritas pajak tempat pelaku usaha PMSE berkedudukan. Adapun berdasarkan perhitungan dan estimasi yang dilakukan, estimasi potensi penerimaan PPN barang tidak berwujud dan jasa pada tahun 2022 diperoleh sebesar sekitar Rp29,38 triliun dari sektor impor barang tidak berwujud dan jasa; dan (4) Dalam konteks PPh Pasal 23 atas bunga P2P *Lending*, dengan mempertimbangkan upaya optimalisasi penerimaan yang netral serta mengedepankan kemudahan, pengenaan PPh Pasal 23 secara final diusulkan dalam kajian ini.



Evaluasi Implementasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

Harga gas bumi di dalam negeri yang masih cukup tinggi dengan kecenderungan mengikuti harga pasar dapat berdampak negatif pada daya saing produk industri Indonesia dan membawa konsekuensi merugikan terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan. Evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya harga gas bumi menjadi krusial untuk merumuskan strategi yang efektif dalam merespons dampak tersebut, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah mitigasi dan kebijakan yang cermat perlu dipertimbangkan agar industri tetap kompetitif dan ekonomi nasional tetap kuat di tengah dinamika harga energi yang berubah.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 40/2016 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 121/2020 telah mengimplementasikan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Melalui Perpres tersebut, Pemerintah telah menetapkan HGBT di titik serah pengguna gas bumi (*plant gate*) dengan harga paling tinggi US\$6/MMBTU—*Million British Thermal Unit*. Penetapan kebijakan HGBT tersebut ditujukan bagi tujuh sektor industri tertentu, antara lain sektor pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. HGBT bertujuan untuk memberikan insentif khusus, berupa tarif gas bumi yang lebih kompetitif kepada sektor industri tertentu yang dianggap strategis. Dengan memberikan harga yang lebih terjangkau, pemerintah berupaya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri-industri tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional.



Presiden RI menetapkan arahan penting terkait implementasi HGBT yang mencakup sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring yang cermat terhadap industri yang menerima insentif HGBT, memastikan pemenuhan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, industri penerima insentif akan melalui proses verifikasi dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal. Dalam aspek ekonomi,

pemberian insentif HGBT diarahkan untuk memberikan dampak positif yang signifikan. Ini mencakup peningkatan nilai tambah, kapasitas produksi yang lebih besar, peningkatan investasi baru, dan efisiensi produksi guna meningkatkan daya saing. Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan HGBT terutama bagaimana dampaknya terhadap fiskal, perekonomian, dan industri. Untuk analisis dampak fiskal dan perekonomian akan menggunakan analisis *cost-benefit* yang lebih sederhana berdasarkan data yang dibutuhkan. Sementara untuk menganalisis dampaknya ke industri dan/atau perusahaan dilakukan melalui: (a) analisis penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar pada sektor industri dan (b) analisis korelasi antara penggunaan gas bumi dan nilai tambah industri. Dari hasil analisis, dampak kebijakan HGBT terhadap industri menunjukkan

bahwa beberapa industri memiliki ketergantungan ataupun penggunaan gas bumi yang cukup signifikan (berdasarkan hasil analisis nilai tengah komposisi volume jenis energi dan pelumas per KBLI 2 digit pada tahun 2019). Industri yang termasuk ke dalam kelompok Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional memiliki persentase penggunaan gas bumi tertinggi baik secara nilai dan volume. Sementara itu, Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi-Trailer menjadi industri kedua pengguna gas bumi tertinggi, baik secara nilai dan volume.

Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi yang didapatkan antara lain: (1) mengupayakan pemanfaatan gas bumi agar mempunyai dampak signifikan (*net gain*) terhadap fiskal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara (pajak dan PNBP), serta penghematan subsidi pupuk dan subsidi listrik; (2) menjaga efektivitas dan perbaikan implementasi kebijakan HGBT melalui: mendorong peningkatan daya serap pemanfaatan (utilisasi) gas pada industri penerima HGBT, menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan gas sesuai kebutuhan industri penerima HGBT, mendorong efisiensi biaya penyaluran gas bumi, serta penguatan monitoring dan evaluasi kebijakan HGBT dari hulu ke hilir; (3) mendorong pemanfaatan gas bumi untuk perekonomian terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong produktivitas industri dalam negeri, memberikan nilai tambah, meningkatkan investasi, serta mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan (4) mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi dalam upaya meningkatkan produksi gas di dalam negeri, menjaga ketersediaan dan pasokan gas yang memadai bagi industri dan rumah tangga, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Kajian Analisis Dampak Perubahan Tarif Ekspor Kelapa Sawit

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit, merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditas minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjaga kesinambungan industri sawit dari hulu hingga hilir.

Berbagai kebijakan dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri maupun harga *Crude Palm Oil* (CPO) dan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani. Perubahan tarif bea keluar dan pungutan ekspor pada tahun 2022 sangat dinamis merespon kondisi perekonomian global serta perilaku dari pengusaha sawit (baik produsen maupun eksportir). Meskipun demikian, terdapat fenomena bahwa penurunan tarif ekspor tidak selalu diikuti dengan peningkatan volume ekspor.

Kajian ini bermaksud untuk melihat dampak perubahan tarif ekspor CPO terhadap volume ekspor CPO, harga CPO dalam negeri, harga CPO luar negeri, harga TBS, dan penerimaan negara. Di samping itu, kajian ini juga dilakukan untuk mengevaluasi optimasi kebijakan tarif ekspor, dan memetakan strategi kebijakan dari berbagai perspektif *stakeholders* terkait

upaya menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit. Adapun lingkup kegiatan dalam kajian ini secara umum terbagi menjadi tiga elemen utama yakni studi literatur, analisis kualitatif (*qualitative approach*) dan studi empiris (*quantitative approach*).

Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa: (I) Perubahan tarif ekspor CPO (yang terdiri dari bea keluar dan pungutan ekspor) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap volume ekspor CPO, namun signifikan terhadap harga TBS dan harga CPO luar negeri; (ii) Terdapat titik optimal Batasan Volume Ekspor tertinggi sebelum direspon dengan kebijakan penyesuaian tarif; (iii) Kebijakan kenaikan tarif berdampak cepat dan besar kepada kondisi makroekonomi dibandingkan dengan kebijakan penurunan tarif; (iv) Strategi Prioritas dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit, yaitu Pengadaan bursa CPO, Optimalisasi Kebijakan Hilirisasi Mandatori Biodiesel (B35), Penyesuaian tarif Pungutan Ekspor, Penetapan harga TBS; serta (v) Terdapat faktor lain (hambatan *nontarif*): seperti harga referensi, proses ekspor, kepastian hukum, standarisasi mutu dan rentang waktu kebijakan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri sawit di perdagangan internasional. Berdasarkan hasil analisis kajian, beberapa hal direkomendasikan sebagai berikut: (1) Penguatan Kebijakan Lintas K/L dan Instansi; (2) Monitoring & Intervensi yang Harmonis; dan (3) Penguatan Bursa CPO Indonesia.

Kajian Subsidi Langsung Pupuk Tahap 2

Salah satu reformasi kebijakan subsidi pupuk yang telah diputuskan Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 31 Januari 2022 adalah kebijakan subsidi pupuk langsung kepada petani (SLP) yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Saat ini perbaikan kebijakan subsidi pupuk tetap dilakukan dengan melakukan integrasi data dan sistem yang digunakan pada implementasi pupuk bersubsidi. Misalnya, sistem usulan rencana definitif kebutuhan kelompok dari seluruh daerah yang diusulkan secara elektronik (e-RDKK) sedang diintegrasikan dengan data penguasaan lahan yang terekam dalam sistem penyuluhan pertanian (Simluhtan).

Kajian reforma kebijakan Subsidi Langsung Pupuk (SLP) kepada petani bertujuan untuk mengevaluasi potensi dampak atau manfaat dari subsidi pupuk langsung kepada petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini melibatkan penilaian terhadap peningkatan hasil panen, kualitas produk, dan efisiensi penggunaan pupuk. Kedua, kajian ini bertujuan untuk memahami ekspektasi petani terkait implementasi SLP serta menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan politik dari perubahan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti pendapatan petani, ketahanan pangan, dan stabilitas politik di tingkat lokal. Terakhir, kajian ini akan merumuskan strategi mitigasi risiko yang berkaitan dengan empat mekanisme yang diusulkan, yaitu Kartu Tani Digital (KTD), Voucher, Natura, dan KTD plus. Strategi ini akan melibatkan aspek kepastian ketersediaan pupuk yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan serta alternatif intervensi di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas.



Adapun lingkup kajian subsidi pupuk langsung kepada petani (SLP) dan peningkatan produktivitas meliputi berbagai aspek yang relevan. Pertama, kajian ini mengkaji paradigma subsidi pupuk, pengeluaran negara, landasan kebijakan, dan teori ekonomi produksi yang menjadi dasar kebijakan subsidi pupuk. Selain itu, prinsip-prinsip produktivitas pertanian, efisiensi, dan efektivitas juga dianalisis dalam konteks peningkatan produktivitas. Selanjutnya, kajian ini juga melibatkan penilaian dampak atau manfaat kesejahteraan yang dihasilkan dari reforma kebijakan subsidi pupuk. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi pustaka dan dokumen kebijakan, studi lapangan, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti petani, pelaku usaha, industri pupuk milik negara dan swasta, distributor, kios pengecer, serta pejabat pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.

Kesimpulan kajian bahwa implementasi SLP memiliki beberapa keunggulan dibanding skema subsidi yang ada saat ini. SLP memberikan subsidi pupuk secara nontunai langsung kepada petani, sehingga penyaluran subsidi dapat lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan berpotensi meningkatkan produktivitas. Namun, terdapat titik kritis pada data valid yang diinput ke dalam aplikasi eRDKK/e-Alokasi, sehingga perbaikan data penerima pupuk bersubsidi secara rutin perlu dilakukan untuk menjaga keakuratan informasi mengingat data petani penerima bersifat dinamis.

Selain itu, implementasi SLP membutuhkan pendekatan yang lebih intensif kepada petani untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan data yang valid dalam pengambilan kebijakan. Koordinasi yang intensif antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (PIHC), dan Himbara juga diperlukan untuk mengoptimalkan arus barang (pupuk) dan arus uang melalui sistem perbankan yang ada, serta memantau transaksi pembelian pupuk secara *real-time* dalam satu *platform*. Perlu dioptimalkan pula operasional dan kolaborasi antara e-Alokasi Kementan dan aplikasi REKAN yang dikembangkan oleh

PIHC untuk manajemen stok pupuk, sehingga sistem informasi dan pemantauan SLP dapat meningkatkan kinerjanya dengan pelaporan *real-time* yang mudah diakses oleh pengambil kebijakan. Diharapkan bahwa dampak sosial, ekonomi, dan politik SLP dapat lebih positif, mendukung pencapaian ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kajian Analisis Redesain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Kajian ini disusun atas dasar beberapa temuan yang menunjukkan adanya potensi kurangnya efektivitasnya penyaluran KUR antara lain: (1) penyaluran KUR yang diikuti pengurangan penyaluran kredit komersial, diperkirakan ada *shifting* nasabah komersial menjadi nasabah KUR; (2) banyak debitur yang sebelumnya menerima KUR tetap menerima KUR sehingga tujuan salah satu program KUR yang naik kelas (dari debitur KUR menjadi debitur komersial) belum tercapai; dan (3) bunga bank penyalur yang dikenakan dalam program KUR terlalu mahal sementara KUR telah mendapatkan penjaminan kredit yang premi IJP telah dimasukkan dalam subsidi bunga. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah: (1) melakukan redesain program KUR yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR dengan menghitung kewajaran tingkat suku bunga KUR yang dikenakan oleh bank penyalur; dan (2) melakukan redesain program KUR yang diharapkan mendukung program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan kajian adalah Pemerintah dapat melakukan redesain program KUR yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR dengan menghitung kewajaran tingkat suku bunga KUR yang dikenakan oleh bank penyalur. Efisiensi APBN untuk subsidi suku bunga KUR dapat diperbaiki dengan analisis mendalam terhadap struktur bunga KUR pada Bank Penyalur secara individual, khususnya pada besaran *cost of fund*, *overhead cost* dan *credit cost*, karena perbedaan profil pada masing-masing bank tersebut, baik yang bersifat *controllable* maupun *uncontrollable* bagi manajemen. Berikutnya adalah kesimpulan dari tujuan yaitu melakukan redesain program KUR yang diharapkan mendukung program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas. Selain itu, Pemerintah dapat

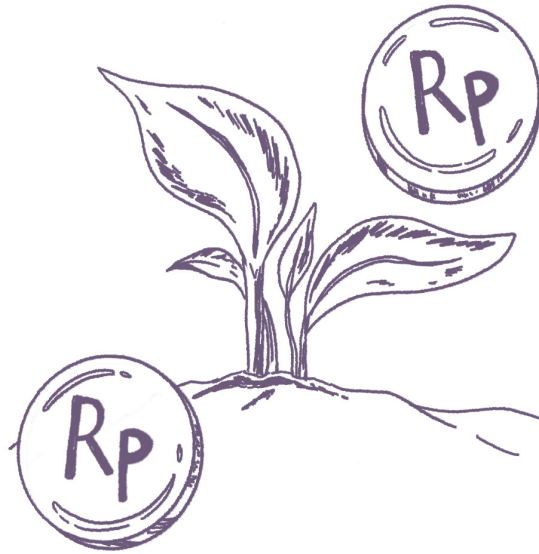
melakukan redesain program KUR yang diharapkan mendukung program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk kajian ini, diantaranya adalah: (1) transfer risiko dari bank penyalur kepada Pemerintah, pada komponen struktur suku bunga KUR yang bersifat *controllable* bagi manajemen (seperti tingginya *credit cost* sebagai dampak NPL tinggi karena mismanajemen), menjadi tidak layak dan perlu di-revaluasi; (2) sebenarnya para pengusaha memerlukan dana pinjaman dari KUR, tetapi Pemerintah dan bank penyalur dapat memberikan informasi yang lebih mengenai tata cara mendapatkan KUR serta bank mana saja yang menyalurkan KUR. Sebaiknya yang menerima KUR ini adalah yang usahanya sudah berjalan, karena jika usaha baru maka akan kesulitan dalam pengembaliannya; (3) dalam pemberian pinjaman kembali kepada UMKM yang telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik, maka untuk pinjaman berikutnya akan mendapatkan pengurangan tingkat suku bunga; dan (4) semua *stakeholder* KUR, terutama lembaga penyalur, diharapkan dapat meningkatkan pemberian informasi terperinci mengenai persyaratan pengajuan KUR.

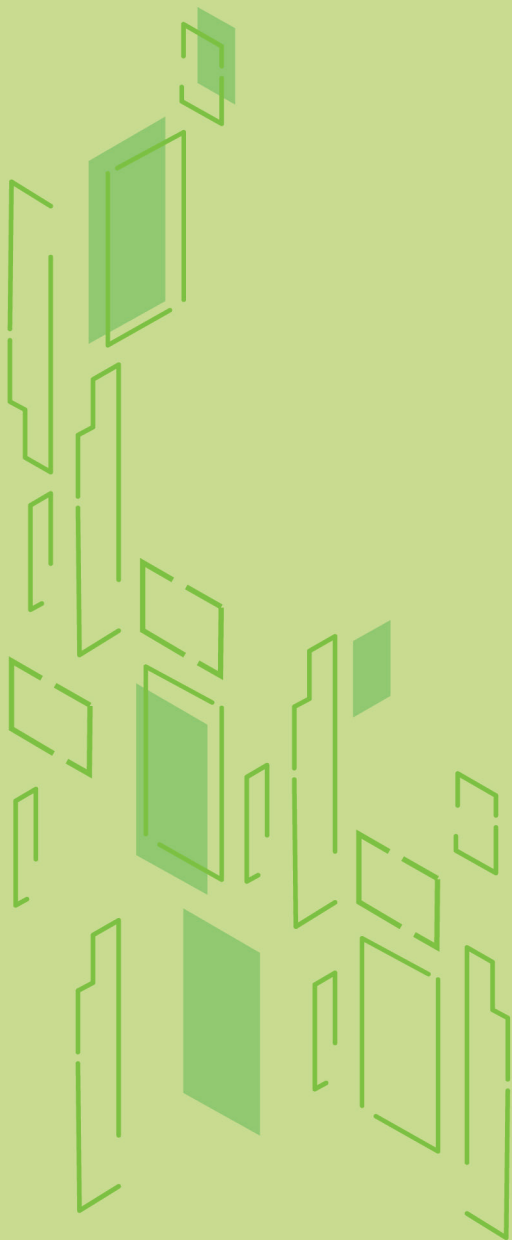
Kajian Analisis Subsidi Pupuk

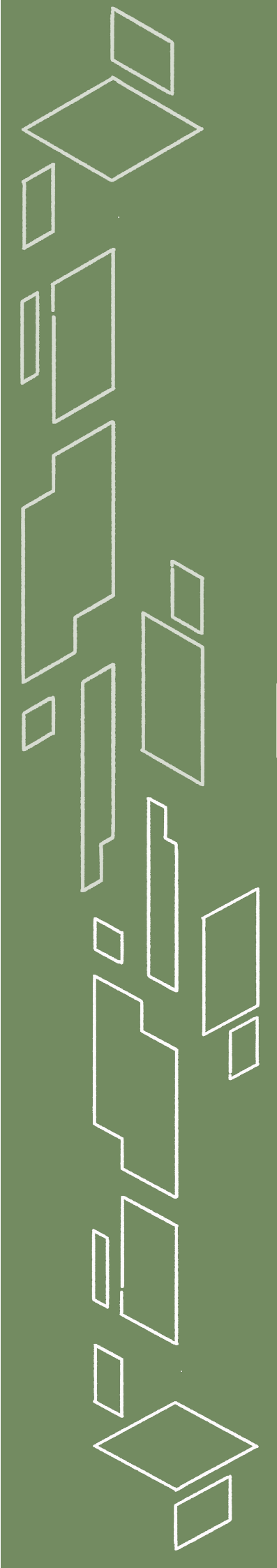
Kajian ini disusun atas dasar beberapa temuan yang menunjukkan adanya potensi kurangnya efektifitas penyaluran KUR antara lain: (1) penyaluran KUR yang diikuti pengurangan penyaluran kredit komersial, diperkirakan ada *shifting* nasabah komersial menjadi nasabah KUR; (2) banyak debitur yang sebelumnya menerima KUR tetap menerima KUR sehingga tujuan salah satu program KUR yang naik kelas (dari debitur KUR menjadi debitur komersial) belum tercapai; dan (3) bunga bank penyalur yang dikenakan dalam program KUR terlalu mahal sementara KUR telah mendapatkan penjaminan kredit yang premi IJP telah dimasukkan dalam subsidi bunga. Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini adalah: (1) melakukan redesain program KUR yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR dengan menghitung kewajaran tingkat suku bunga KUR yang dikenakan oleh bank penyalur; dan (2) melakukan redesain program KUR yang diharapkan mendukung program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan kajian adalah Pemerintah dapat melakukan redesain program KUR. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR dengan menghitung kewajaran tingkat suku bunga KUR yang dikenakan oleh bank penyalur. Efisiensi APBN untuk subsidi suku bunga KUR dapat diperbaiki dengan analisis mendalam terhadap struktur bunga KUR pada bank penyalur secara individual, khususnya pada besaran *cost of fund*, *overhead cost* dan *credit cost*, karena perbedaan profil pada masing-masing bank tersebut, baik yang bersifat *controllable* maupun *uncontrollable* bagi manajemen. Berikutnya adalah kesimpulan dari tujuan nomor dua, yaitu melakukan redesain program KUR yang diharapkan mendukung program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas. Selain itu, Pemerintah dapat melakukan redesain program KUR yang diharapkan mendukung program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.

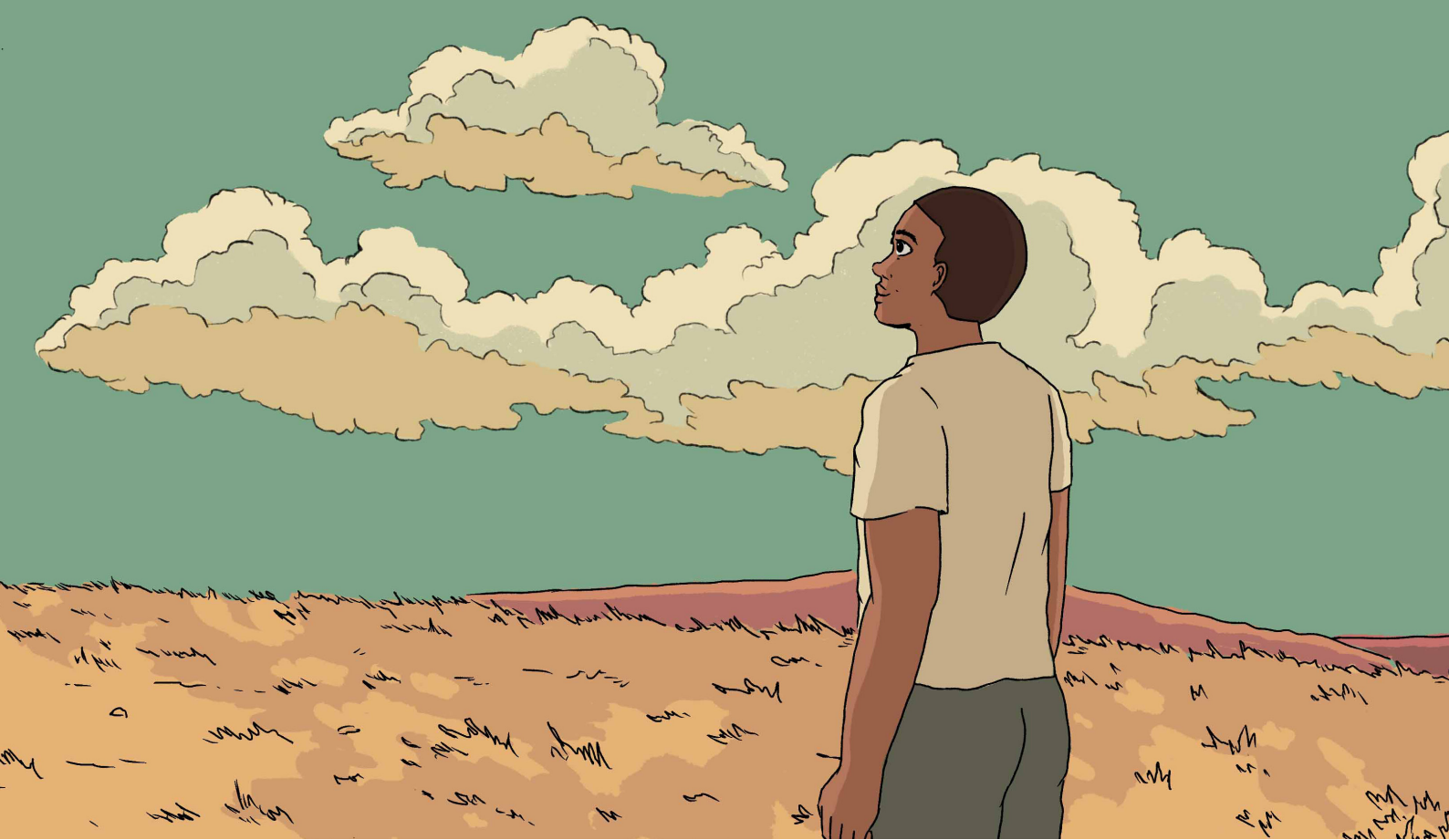


Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk kajian ini, di antaranya adalah: (1) transfer risiko dari bank penyalur kepada Pemerintah, pada komponen struktur suku bunga KUR yang bersifat *controllable* bagi manajemen (seperti tingginya *credit cost* sebagai dampak *Non-Performing Loan/NPL* tinggi akibat mismanajemen), menjadi tidak layak dan perlu direvaluasi; (2) para pengusaha memerlukan dana pinjaman dari KUR, tetapi Pemerintah dan bank penyalur dapat memberikan informasi yang lebih mengenai tata cara mendapatkan KUR serta bank mana saja yang menyalurkan KUR. Dalam menciptakan UMKM naik kelas diperlukan kerja sama antara Pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat dan media (*pentahelix*) untuk sinergitas, seperti pelatihan dan pendampingan. Sebaiknya yang menerima KUR ini adalah yang usahanya sudah berjalan, karena jika usaha baru maka akan kesulitan dalam pengembaliannya; (3) Bagi UMKM yang telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik, maka pinjaman berikutnya akan mendapatkan pengurangan tingkat suku bunga; dan (4) semua *stakeholder* KUR, terutama lembaga penyalur, diharapkan dapat meningkatkan pemberian informasi terperinci mengenai persyaratan pengajuan KUR agar masyarakat luas dapat memahami kemudahan yang didapatkan dan menghindari adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai seperti praktik tawaran paket (asuransi), endapan dana yang diwajibkan, dan lainnya.





PENDAPATAN NEGARA



Pemberian Fasilitas Perpajakan untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi

Laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dibutuhkan dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi di tahun 2023. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan pada perekonomian antara lain tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan kemunduran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian (*learning loss*). Tantangan yang tidak kalah berat yaitu perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan perdagangan global yang berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dan kinerja ekspor nasional dalam jangka pendek. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan produktivitas nasional yang menjadi kunci penguatan kinerja ekonomi jangka menengah-panjang melalui sumber pertumbuhan baru, termasuk peningkatan peran industrialisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Selanjutnya untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan Fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural yang diantaranya didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui kebijakan optimalisasi pendapatan negara.

Dalam rangka menjalankan kebijakan fiskal Pemerintah tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal melalui penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut:

PMK Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Melalui penerbitan PMK Nomor 71 Tahun 2023, Pemerintah menetapkan barang ekspor yang dikenakan bea keluar, terutama pada produk hasil pengolahan mineral logam: konsentrat tembaga, besi laterit, seng dan timbal. Ketentuan perubahan tarif bea keluar atas ekspor produk hasil pengolahan mineral logam berdasarkan pada kemajuan fisik pembangunan smelter yang telah mencapai paling sedikit 50%. Pengenaan besaran tarif bea keluar ditentukan berdasarkan kemajuan proses pembangunan smelter yang terdiri dari tiga tahap dan dibagi ke dalam dua periode. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan smelter berjalan sesuai komitmen.

Pengenaan besaran tarif bea keluar ditentukan berdasarkan kemajuan proses pembangunan smelter yang terdiri dari tiga tahap dan dibagi ke dalam dua periode. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan smelter berjalan sesuai komitmen.

Selain PMK Nomor 71 Tahun 2023, terdapat empat fasilitas perpajakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi diantaranya: PMK Nomor 38 Tahun 2023, PMK Nomor 60 Tahun 2023, PMK Nomor 116 Tahun 2023, dan PMK Nomor 120 Tahun 2023 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab Capaian Utama.



Perlindungan Ekonomi Dalam Negeri

Gempuran produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri hingga kecenderungan untuk ekspor produk-produk bernilai tambah untuk negara lain muncul sebagai distorsi perekonomian. Guna meminimalkan kerugian industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor dan persaingan tidak sehat antar negara (*unfair trade*), Badan Kebijakan Fiskal merumuskan kebijakan fiskal melalui penyusunan PMK sebagai berikut:

PMK Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap Impor Produk Frit Asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Sebelumnya, pengenaan BMAD terhadap impor produk frit dan glasir atau preparat semacam itu serta frit kaca dan kaca lainnya dari Republik Rakyat Tiongkok telah diatur dalam PMK Nomor 170/PMK.010/2017 yang berlaku selama lima tahun. Namun, berdasarkan keputusan dari Menteri Perdagangan kepada Menteri Keuangan serta hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada tahun 2022 membuktikan bahwa industri dalam negeri belum sepenuhnya pulih dari kerugian yang dialami akibat adanya praktik *dumping*, sehingga perlu ditetapkan kembali pengenaan BMAD. Pengenaan BMAD melalui PMK Nomor 32 Tahun 2023 diberlakukan selama lima tahun terhadap impor produk yang berasal dari RRT, berupa:

1. Frit dan glasir atau preparat semacam itu yang dapat divitrifikasi yang digunakan dalam industri keramik selain engobes (slip), dalam bentuk bubuk, butiran, serpih, atau cairan yang termasuk dalam pos tarif ex3207.20.90; dan
2. Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih yang termasuk dalam pos tarif 3207.40.00, dengan besaran BMAD, sebagai berikut:

No	Eksportir	Besaran BMAD dalam persentase %
1	Zibo Fuxing Ceramic Pigment & Glaze Co., Ltd	6,3%
2	Seluruh eksportir lainnya	25,5%

PMK Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur (*Bed Valance*), dan Barang Perabot Lainnya

Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan BMTP atas impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (*bed valance*), dan barang perabot lainnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 54/PMK.010/2020 selama tiga tahun. Namun, pada tahun 2022 berdasarkan keputusan dari Menteri Perdagangan serta hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan bahwa masih terdapat lonjakan jumlah impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (*bed valance*), dan barang perabot lainnya yang mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri, sehingga perlu ditetapkan kembali pengenaan BMTP.

PMK Nomor 45 Tahun 2023 mengatur pengenaan BMTP selama tiga tahun terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (*bed valance*), dan barang perabot lainnya yang termasuk dalam pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 dengan besaran BMTP, sebagai berikut:

No.	Periode	Tarif BMTP
1	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp 22.717,00/Kg
2	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	Rp 16.595,00/Kg
3	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua.	Rp 10.473,00/Kg

PMK Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Penetapan PMK Nomor 46 Tahun 2023 didasarkan atas keputusan dari Menteri Perdagangan dan merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan KPPI yang menemukan masih terjadi lonjakan jumlah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang mengakibatkan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. BMTP dikenakan selama tiga tahun terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00 dengan besaran BMTP, sebagai berikut:

No.	Periode	Tarif BMTP
1	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp766,00/Kg
2	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	Rp553,00/Kg
3	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua.	Rp340,00/Kg

PMK Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

Ketentuan dalam PMK ini berisi perubahan daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP atas impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Perubahan daftar negara

yang dikecualikan dari BMTP Karpet dilandasi adanya hasil evaluasi dari KPPI terhadap perkembangan volume impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya pada Oktober 2021 sampai dengan September 2022.

Melalui *safeguard* PMK ini, Pemerintah berharap dapat menahan lonjakan impor yang telah menyebabkan kerugian serius industri dalam negeri dan kemudian memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri produsen karpet dan tekstil penutup lantai lainnya untuk melakukan penyesuaian struktural dalam upaya memulihkan kondisinya kembali seperti semula.

PMK Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin

Penetapan PMK ini berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan hasil penyelidikan KPPI yang menunjukkan bahwa masih diperlukan pengenaan BMTP terhadap produk *evaporator* tipe *roll bond* dan tipe *fin* untuk memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri serta memberikan tambahan waktu bagi industri dalam negeri untuk menyelesaikan penyesuaian struktural.

Pengenaan BMTP tersebut berlaku selama tiga tahun terhadap barang impor berupa evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin*, yang merupakan bagian dari lemari pendingin, lemari pembeku, dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, yang termasuk dalam pos tarif ex8418.99.10 dengan besaran BMTP pada tahun pertama sebesar 12,5%, tahun kedua sebesar 11%, dan tahun ketiga sebesar 9,5%

PMK Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Sirup Fruktosa

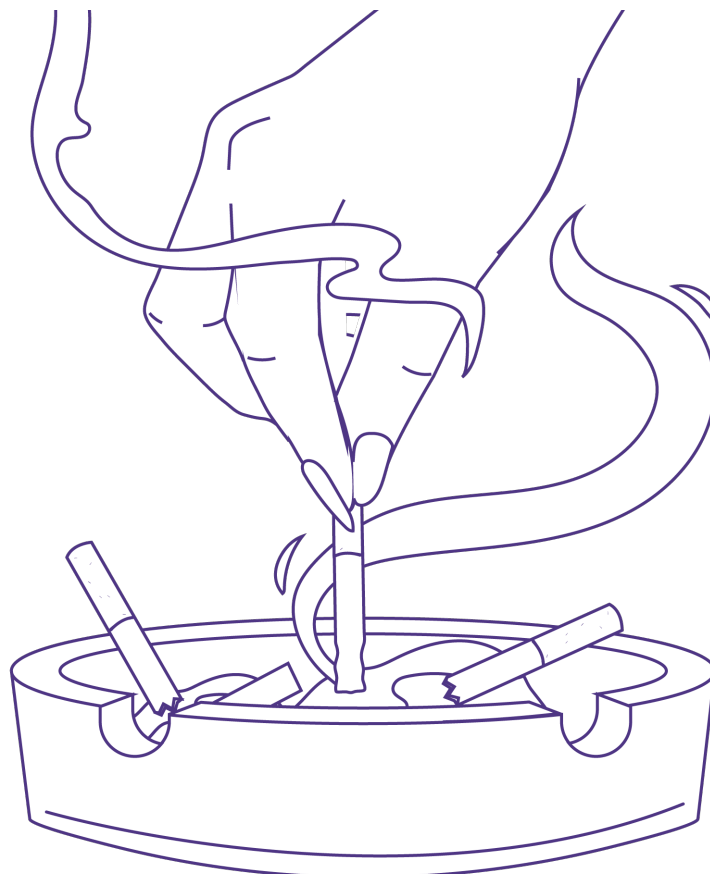
Peraturan Menteri Keuangan ini akan mulai berlaku 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan. Ketentuan dalam PMK ini berisi perubahan daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP atas impor produk sirup fruktosa. Perubahan daftar negara yang dikecualikan dari BMTP sirup fruktosa dilandasi adanya hasil evaluasi dari KPPI terhadap perkembangan volume impor produk sirup fruktosa pada Oktober 2021 sampai dengan September 2022.

Dengan penerbitan PMK Perubahan BMTP Sirup Fruktosa, Pemerintah mengharapkan penerapan kebijakan *safeguard* ini dapat berjalan dengan optimal guna menahan lonjakan impor yang telah menyebabkan kerugian serius industri dalam negeri dan kemudian memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri produsen sirup fruktosa untuk melakukan penyesuaian struktural dalam upaya memulihkan kondisinya seperti semula.

PMK Nomor 151 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan BMTP atas impor produk kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 sebagaimana kemudian diubah dengan PMK Nomor 35/PMK.010/2023. PMK Nomor 151 Tahun 2023 mengatur pengenaan BMTP terhadap kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang termasuk dalam pos tarif 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91 dan ex4813.90.99 berdasarkan BTKI tahun 2022 dengan besaran tarif:

No.	Periode	Tarif BMTP
1	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp3.923.900/Ton
2	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama.	Rp3.885.850/Ton
3	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua.	Rp3.847.800/Ton





Pengendalian Konsumsi dan Optimalisasi Pendapatan Negara

Badan Kebijakan Fiskal merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal dan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol. Melalui PMK tersebut, Pemerintah menyesuaikan tarif cukai alkohol mulai 1 Januari 2024. Adapun pokok-pokok kebijakan cukai alkohol dalam PMK tersebut adalah (i) kenaikan tarif cukai MMEA sebesar rata-rata tertimbang 20%, (ii) penyesuaian kadar alkohol MMEA golongan C dari sebelumnya lebih dari 20% menjadi lebih dari 20% sampai dengan 55%, dan (iii) penyesuaian tarif cukai KMEA bentuk cair sebesar 1,5 kali tarif MMEA golongan C yang diimpor, sementara KMEA bentuk padat tetap sebesar Rp1.000/gram.

Penyesuaian tarif cukai MMEA juga ditujukan untuk penyederhanaan tarif cukai dari segi administrasi pelayanan dan pengawasan, serta pemenuhan *non-discriminatory* ASEAN dan WTO. Hal tersebut dilakukan dengan mengharmonisasikan besaran tarif cukai MMEA golongan B dan C produksi dalam negeri dan impor secara bertahap dengan pertimbangan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan atas konsumsi MMEA produksi dalam negeri atau impor tidak berbeda. Adapun perlindungan industri MMEA dalam negeri dilakukan melalui instrumen bea masuk.

Perpajakan atas Kerja Sama Perdagangan Internasional

Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan langkah-langkah positif yang mendukung kerja sama perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di pasar internasional, di antaranya melalui penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu:

PMK Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang

PMK tersebut mengatur tentang perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.010/2022 dimana terdapat pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema RCEP untuk Jepang berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian RCEP untuk Jepang; (2) Penetapan pemberlakuan tarif diferensial pada klasifikasi barang impor dalam perjanjian RCEP untuk Jepang; (3) *Auto MFN*, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema RCEP untuk Jepang, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (*MFN Applied*); (4) Pemberlakuan PMK RCEP untuk Jepang mulai tanggal 2 Januari 2023.

PMK Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea)

PMK tersebut mengatur tentang perubahan atas PMK Nomor 223/PMK.010/2022 dimana terdapat pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema RCEP untuk Republik Korea berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian RCEP untuk Republik Korea; (2) Penetapan pemberlakuan tarif diferensial pada klasifikasi barang impor dalam perjanjian RCEP untuk Republik Korea; (3) *Auto MFN*, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema RCEP untuk Republik Korea, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (*MFN Applied*); (4) Pemberlakuan PMK RCEP untuk Republik Korea mulai tanggal 2 Januari 2023.

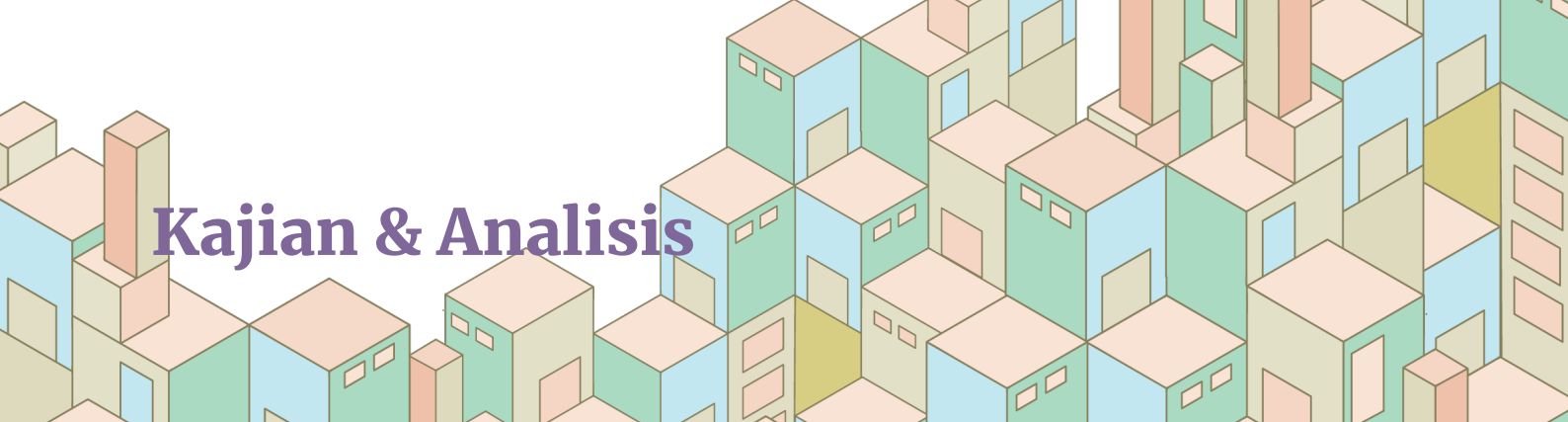
PMK Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The United Arab Emirates*)

PMK tersebut mengatur pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema IUAE CEPA berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian IUAE CEPA; (2) *Auto MFN*, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema AKFTA, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (*MFN Applied*); (3) Pengaturan terkait TRQ, yakni pengenaan tarif berdasarkan kuota yang disepakati; (4) Penetapan PMK IUAE CEPA mulai berlaku 1 September 2023.

PMK Nomor 151 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antarpemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (*ASEAN-Korea Free Trade Area*)

PMK tersebut mengatur tentang perubahan atas PMK Nomor 45/PMK.010/2022 dimana terdapat pokok-pokok pengaturan dalam PMK tarif skema AKFTA berupa: (1) Penetapan tarif bea masuk dan klasifikasi barang impor dalam Perjanjian AKFTA; (2) *Auto MFN*, yakni apabila tarif bea masuk MFN lebih rendah dari tarif bea masuk skema AKFTA, maka yang berlaku tarif bea masuk MFN (*MFN Applied*); (3) Pengaturan terkait *Reciprocal Arrangement*, yakni kesepakatan pengenaan tarif *sensitive list* yang dikenakan oleh Korea namun di Indonesia menerapkan *normal track*; (4) Penetapan PMK AKFTA mulai tanggal 27 Desember 2023, diundangkan tanggal 28 Desember 2023 dan mulai berlaku tujuh hari dari tanggal pengundangan.





Kajian & Analisis

Kajian Analisis Dampak Insentif Perpajakan Sektor Perumahan terhadap Perekonomian Indonesia

Kajian ini secara umum bertujuan untuk melakukan evaluasi atas program dukungan pemerintah atas sektor perumahan dan secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi dampak insentif perpajakan serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang efektif sehingga perlu menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan. Secara umum, analisis efektivitas dan *relationship* kebijakan di sektor perumahan terhadap indikator makroekonomi memberikan kesimpulan bahwa kebijakan insentif perpajakan memiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi sektoral (*real estate*) dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak tersebut semakin besar bila skenario analisis dikembangkan lebih jauh menggunakan skenario gabungan kebijakan insentif perpajakan dengan kebijakan fasilitas pembiayaan serta belanja. Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan optimalisasi pembangunan sektor perumahan, strategi kebijakan melalui fasilitas pembiayaan harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan strategi kebijakan insentif perpajakan dan atau strategi kebijakan belanja negara. Dari tiga kriteria kebijakan sektor perumahan, kriteria kemampuan bayar perlu mendapat prioritas lebih dibandingkan dengan ketersediaan dan kesinambungan penyediaan perumahan serta kriteria keterjangkauan harga. Khusus untuk kebijakan insentif perpajakan, strategi kebijakan yang penting untuk dilaksanakan adalah kebijakan pemberian insentif PPN/PPN DTP karena dari beberapa insentif pajak (PPN/PPN DTP, PPh final penjualan, PPh final sewa, dan PPh final jasa konstruksi), bobot tertinggi pada analisis model AHP adalah kebijakan pemberian insentif pajak PPN/PPNDTP. Hal ini tentunya sejalan dengan hasil analisis pada model regresi maupun pada *input-output* ketika kebijakan PPN/PPN DTP efektif di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan serta memiliki *multiplier effect* yang tinggi dibandingkan kebijakan insentif pajak lainnya.

Kebijakan pemberian insentif perpajakan khususnya PPN/PPN DTP dan PPh final penjualan di sektor perumahan secara umum memberikan dampak positif bagi perekonomian. Stimulus insentif perpajakan dapat mendorong perubahan dan pertumbuhan *output*, nilai tambah bruto, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, efektivitas masing-masing kebijakan dalam mendorong perekonomian dan kinerja makroekonomi lainnya tentu berbeda-beda, sehingga perlu ada perlakuan berbeda untuk setiap kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan insentif perpajakan masih dibutuhkan di dalam mendukung pembangunan sektor perumahan di Indonesia. Kebijakan ini harus tetap dilanjutkan dengan terus memantau dan mengevaluasi penerima manfaat secara lebih optimal, serta memperhatikan besarnya dampak dan tingkat efektivitas dari masing-masing kebijakan. Khusus untuk kebijakan PPN

DTP hendaknya diberikan secara temporer/kondisional dan hanya pada saat tertentu saja (misalnya pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19).

Evaluasi Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Bahan Pakan Ternak

Kajian tersebut ditujukan untuk memperoleh keyakinan yang cukup terkait keberlanjutan kebijakan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak terutama untuk jangka panjang. Hal tersebut dilihat dari sisi dampaknya terhadap daya saing barang kebutuhan pokok atas daging unggas dan telur terhadap produk sejenis impor, dan juga setelah memperhitungkan dampaknya terhadap ekonomi makro terutama dari dampak kemiskinan, karena fasilitas PPN umumnya ditujukan untuk konsumen akhir terutama kelompok masyarakat miskin. Dari sisi makro, sepanjang kebijakan pencabutan fasilitas PPN berdampak signifikan terhadap



kemiskinan, maka kebijakan fasilitas PPN penting untuk dipertahankan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kebijakan mencabut fasilitas PPN atas pakan ternak (jagung) akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,078 % dari yang sebelumnya berada pada angka 9,774 % menjadi 9,853%. Selain itu juga, pengenaan PPN 11% untuk komoditas ayam akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.97%. Untuk kepentingan menjaga daya saing daging ayam dan telur terhadap produk sejenis asal impor, perlu tetap mempertahankan fasilitas PPN atas bahan baku pakan, bahkan terhadap pakan, bibit, dan hewan ternak. Hal tersebut dikarenakan pengenaan PPN akan menambah harga pokok produksi daging unggas dan telur di Indonesia akibat pemberian pembebasan PPN atas daging unggas dan telur menyebabkan Pajak Masukan untuk memproduksi telur dan daging unggas tidak dapat dikreditkan, dan fasilitas pembebasan akan berlaku juga atas impor produk sejenis.

Selama ini, melalui PMK 142 tahun 2017 Menteri Keuangan telah membebaskan PPN atas bahan baku pakan, dimana terdapat dua kelompok bahan baku pakan yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN yang diatur dalam lampiran PMK tersebut. Untuk bahan pakan ternak, rekomendasi awal jenis barang yang dibebaskan PPN diperoleh dari Kementerian Pertanian. Sementara untuk bahan pakan ikan, jenis pakan yang mendapatkan fasilitas PPN diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adanya dua lampiran yang membedakan pemberian fasilitas untuk kegunaan pakan ternak atau pakan ikan, telah menjadi permasalahan tersendiri pada pelaksanaan di lapangan mengingat ada jenis bahan pakan yang dibutuhkan baik untuk pakan ternak maupun pakan ikan, sementara jenis pakan tersebut hanya ada di lampiran pakan ikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan, saat ini dalam proses dilakukan perbaikan PMK 142 tahun 2017. Perbaikan dilakukan dengan cara memperdalam permasalahan yang muncul dan melakukan identifikasi masalah melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan semua *stakeholders* secara menyeluruh dan terstruktur, termasuk kepada asosiasi pakan baik sebelum maupun setelah dilakukan perumusan draft PMK sebelum diproses lebih lanjut untuk proses pengharmonisasian oleh Kemenkumham. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan pokok-pokok kebijakan dan rumusan PMK melalui penggantian PMK untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum, kesederhanaan dan kemudahan, dan lebih memberikan keterjangkauan atas kebutuhan pokok.

Evaluasi Kebijakan *Tax Holiday* di Indonesia

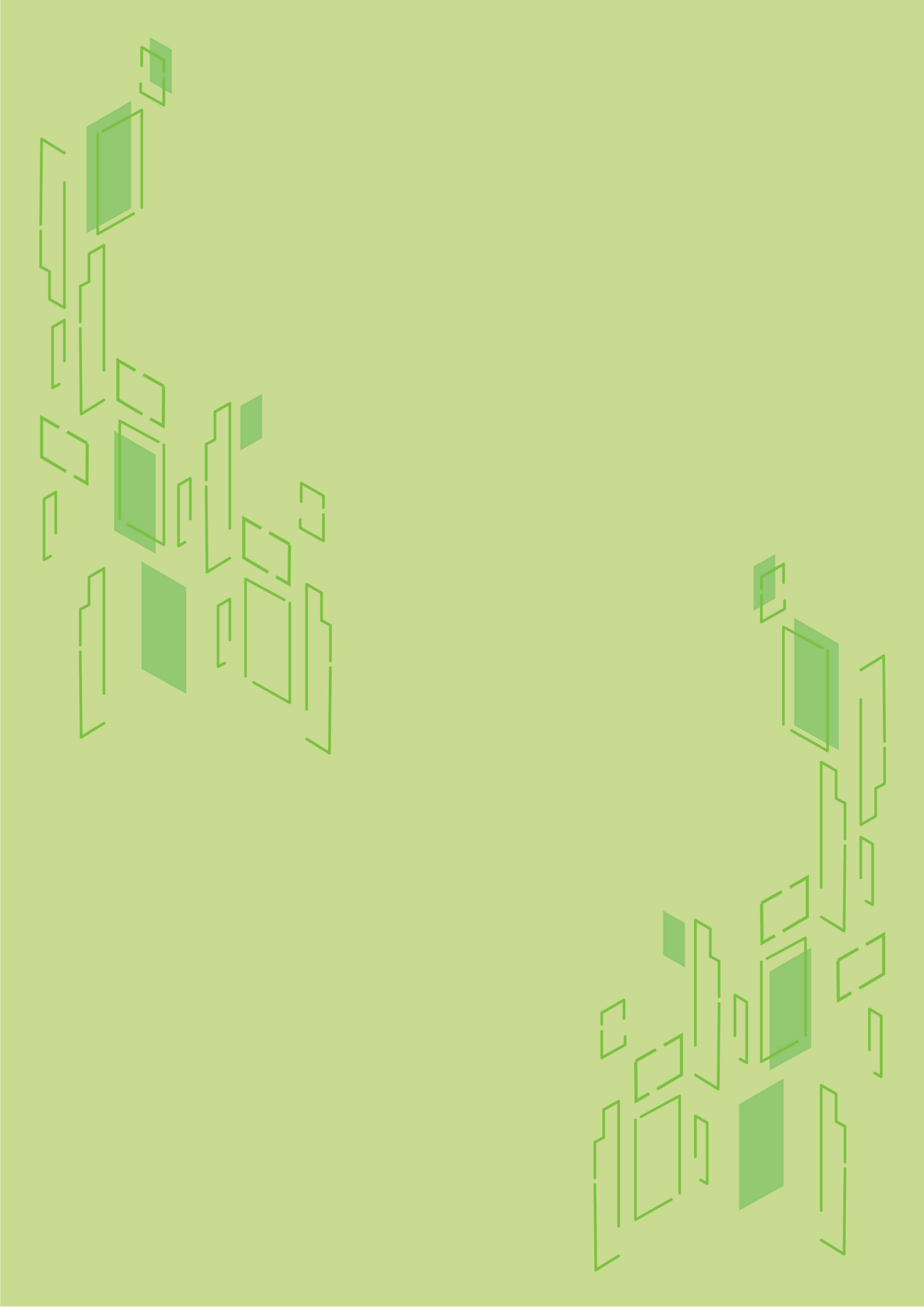
Studi ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kebijakan *tax holiday* dalam mendorong investasi dan industrialisasi di Indonesia. Studi ini merupakan lanjutan dari studi serupa yang dilakukan di tahun 2016–2017 oleh Badan Kebijakan Fiskal dan AIPEG yang mengevaluasi kebijakan *tax holiday* di bawah rezim PMK 130/2011. Studi ini juga menjadi semakin penting sebagai salah satu usaha atas transparansi pemerintah terhadap penggunaan fasilitas perpajakan. Sebagai gambaran, laporan belanja perpajakan 2022 yang diterbitkan Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa besaran belanja perpajakan untuk *tax holiday* telah mencapai Rp4,7 triliun dan diprediksi meningkat hingga Rp9,0 triliun di tahun 2025.

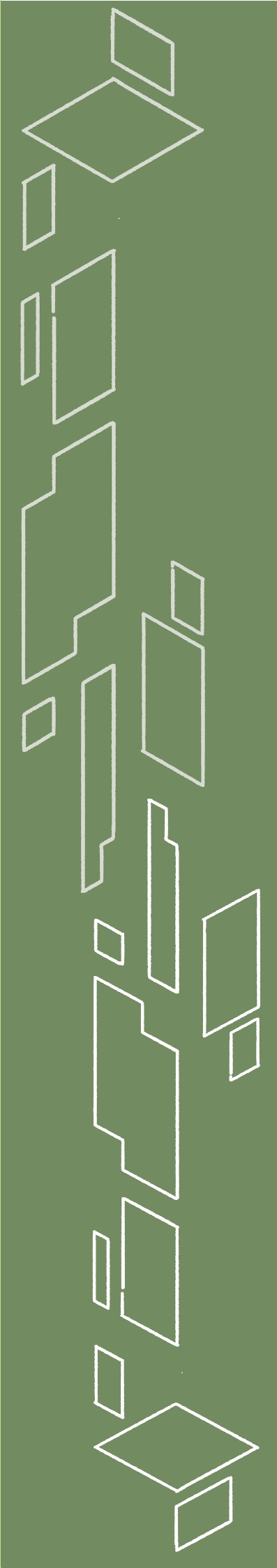
Berdasarkan hasil analisis, studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat indikasi bahwa kebijakan *tax holiday* bersifat *redundant*.
- b. Terdapat indikasi adanya konsentrasi penerima *tax holiday* baik secara sektoral maupun spasial.
- c. Adanya konsentrasi bidang usaha penerima menyebabkan kebijakan *tax holiday* belum efektif menutup *gap* pohon industri nasional.
- d. Adopsi *Pillar Two “Global Minimum Tax/GloBE”* di banyak negara yang mengamankan tarif pajak minimum sebesar 15% menyebabkan *tax holiday* semakin tidak atraktif. Dengan tarif normal PPh sebesar 22%, insentif yang dinikmati oleh penerima manfaat kebijakan *tax holiday* hanya sebesar 7%, jauh dibandingkan sebelum adanya adopsi *Global Minimum Tax*.

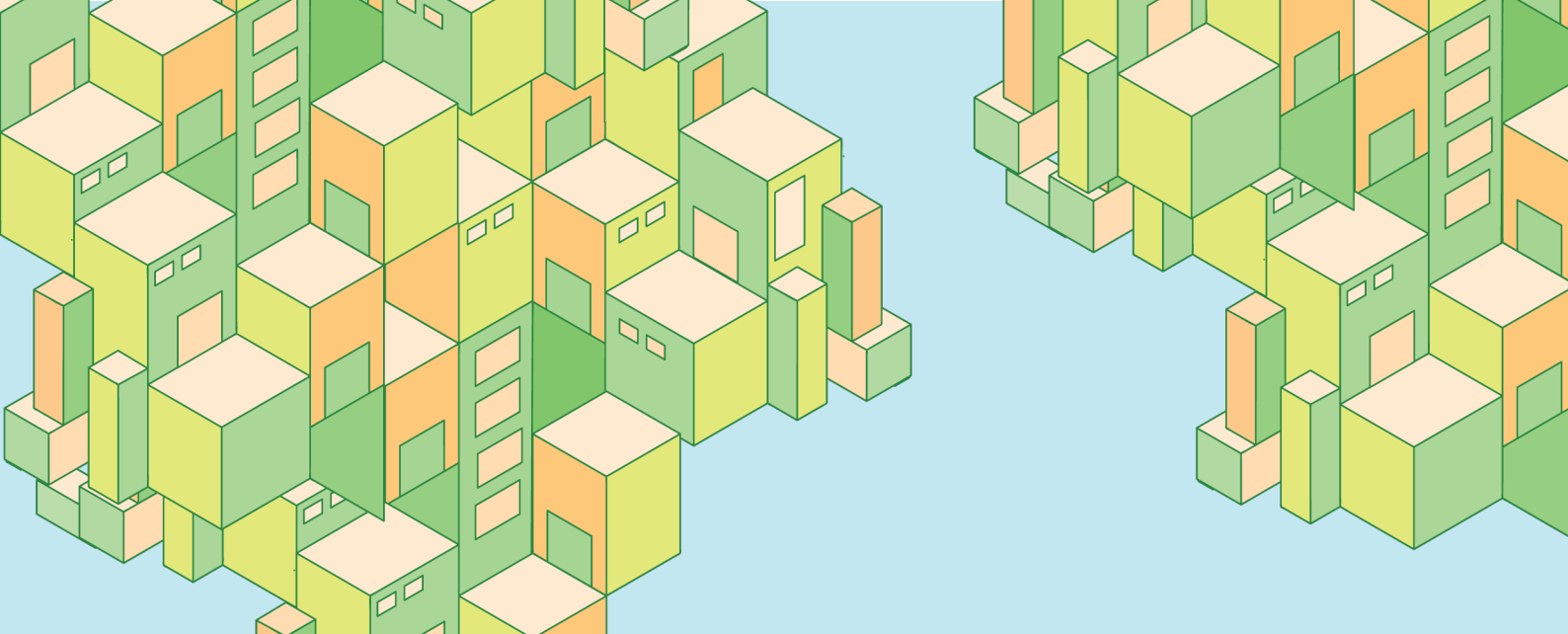
Berdasarkan kesimpulan di atas, disusun beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mempersempit cakupan industri penerima *tax holiday* sehingga lebih fokus pada industri nasional yang mendukung hilirisasi (mengisi *gap* pohon industri).
- b. Keberadaan *Pillar Two* menurunkan *attractiveness* dari kebijakan *tax holiday* sehingga memerlukan alternatif insentif lain yang tidak berhadapan langsung dengan *Pillar Two*. Beberapa alternatif insentif yang dapat dipertimbangkan meliputi *accelerated depreciation*, *immediate expensing*, *loss carry forward* dalam diperpanjang, serta *tax credit*. Bahkan, *tax credit* memberikan transparansi yang lebih baik karena dapat diperhitungkan besaran belanja perpajakan sejak fasilitas diberikan.
- c. Memetakan kembali struktur *cost of doing business* di Indonesia. Perkembangan ekonomi global dan perpajakan internasional yang dinamis menyebabkan struktur





Sektor Keuangan



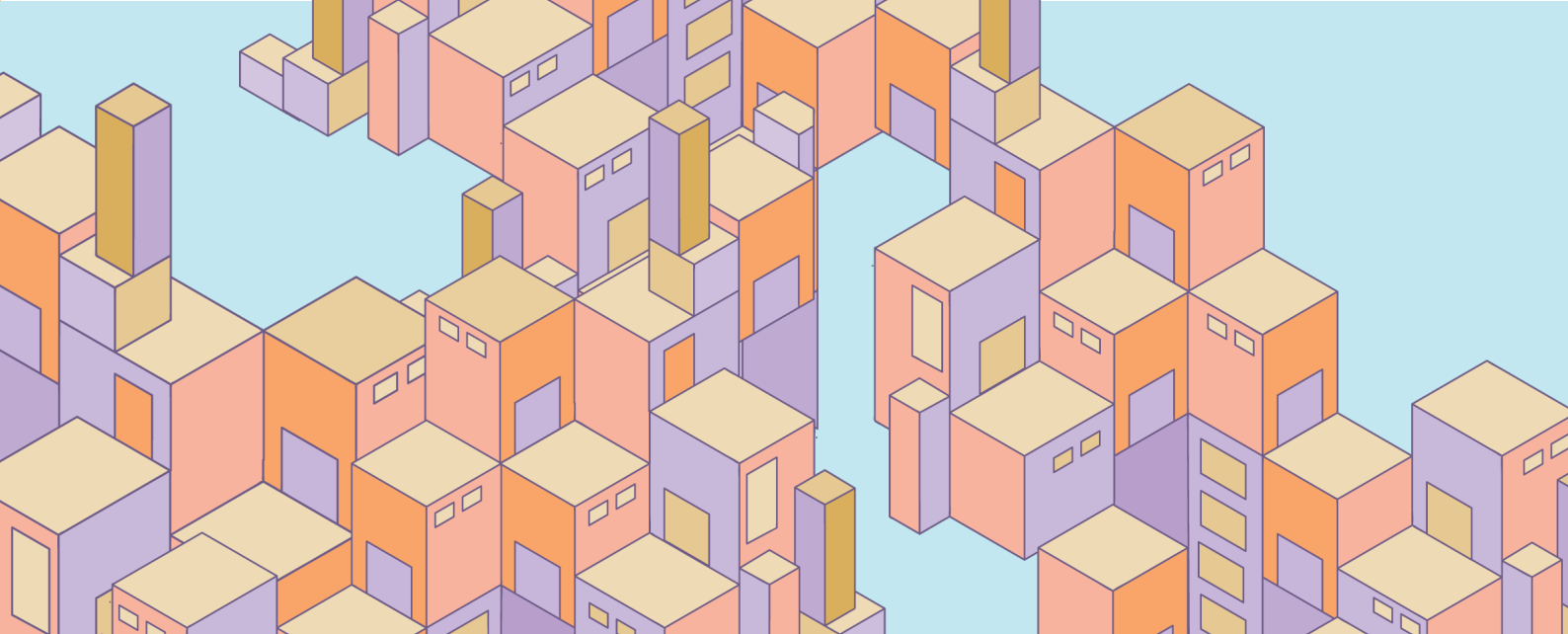
Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK)

FKPPPK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dibentuk pada 8 April 2016 untuk meningkatkan koordinasi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan menjadi Sekretariat FKPPPK dan mendukung berbagai kegiatan bersama antarlembaga FKPPPK, termasuk diskusi kelompok terkait Pengembangan Instrumen Hijau dan Berkelanjutan, Pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan, koordinasi peraturan pelaksanaan UU PPSK, serta penyelenggaraan kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan ('Like It') sebagai kegiatan edukasi dan literasi utama FKPPPK.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS berkoordinasi untuk memantau dan memelihara stabilitas sistem keuangan, menangani krisis sistem keuangan, serta menangani permasalahan bank sistemik dalam kondisi normal maupun krisis.

Sepanjang 2023, stabilitas sistem keuangan tetap *resilient* di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam menjalankan tugas KSSK, koordinasi dan pertukaran data antarlembaga menjadi fondasi utama melalui rapat berkala KSSK dan program penguatan tata kelola yang dikoordinasikan oleh Sekretariat KSSK. Badan Kebijakan Fiskal menyiapkan bahan asesmen KSSK



dan mengkonsolidasikan bahan untuk Menteri Keuangan, termasuk asistensi logistik bagi para Pimpinan Eselon I yang mendampingi Menteri Keuangan.

Salah satu program penguatan tata kelola dan koordinasi antarlembaga adalah Simulasi Tematik (Simtik). Badan Kebijakan Fiskal mengoordinasikan peran Kementerian Keuangan melalui Unit Eselon 1 terkait, seperti Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Sekretariat Jenderal, serta koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS dalam penyiapan skenario dan pelaksanaan simulasi tersebut.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dibentuk untuk pelaksanaan SNKI, dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, penyelesaian hambatan, serta *monitoring* dan evaluasi SNKI. DNKI dibantu oleh sekretariat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan tujuh kelompok kerja. Badan Kebijakan Fiskal menjadi anggota di beberapa kelompok kerja dan Ketua Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi. Sepanjang 2023, Badan Kebijakan Fiskal aktif mendukung DNKI melalui penyusunan rekomendasi kebijakan dan program kerja keuangan inklusi, termasuk penguatan kelembagaan DNKI dan TPKAD menjadi KNLIK dan TPLIKD serta peningkatan literasi keuangan melalui peraturan pemerintah tentang KNLIK.

Sektor Keuangan Internasional

Badan Kebijakan Fiskal turut berperan aktif pada berbagai forum internasional dalam rangka mendorong pendalaman dan pengembangan industri keuangan, serta untuk mendorong penerapan standar internasional pada tataran domestik termasuk di area yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Keterlibatan tersebut antara lain dengan membantu penyiapan *point of intervention* dalam rapat *Financial Stability Board* (FSB), menghadiri pertemuan *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPFI) di G20, berpartisipasi dalam *Financial Action Task Force* (FATF) serta terlibat dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) salah satunya dalam pertemuan *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC).

Financial Stability Board (FSB)

Kebijakan internasional stabilitas sistem keuangan dikoordinasikan oleh *Financial Stability Board* (FSB) berdasarkan mandat dari G20. Setelah krisis keuangan 10 tahun lalu, FSB kini fokus pada potensi kerentanan baru dan evaluasi efektivitas reformasi kebijakan. FSB, dibentuk setelah KTT G20 di London 2009 untuk memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global. Guna meningkatkan koordinasi antarotoritas keuangan dan lembaga pembuat standar internasional, FSB melibatkan negara ekonomi utama G20, anggota *Financial Stability Forum* (FSF) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan lembaga sektor keuangan, serta Komisi Eropa. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia adalah anggota FSB. Badan Kebijakan Fiskal mendukung partisipasi Kementerian Keuangan dalam FSB melalui penyiapan substansi dan koordinasi kegiatan survei. Pada tahun 2023, rangkaian pertemuan FSB berlangsung secara daring dan *in person*.

Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)

GPFI beranggotakan seluruh negara G20, *interested non-G20 countries*, dan *stakeholders* terkait. Beberapa topik yang selama ini dibahas dalam GPFI, antara lain, adalah terkait pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, perlindungan konsumen dan literasi keuangan, sistem pembayaran, serta regulasi dan *standard setting bodies*. Badan Kebijakan Fiskal sebagai delegasi, serta Kementerian Keuangan telah terlibat pada rangkaian kegiatan G20 GPFI di India. Serta turut menghadiri *Workshop Financial Inclusion* di Swiss pada November 2023. Kemenkeu berkontribusi menyiapkan asesmen dan memberikan informasi terbaru dalam forum terkait kebijakan dan dukungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Strategi, kebijakan dan regulasi yang terkait keuangan inklusif di Indonesia dikoordinasikan oleh DNKI. Kemenkeu menjadi salah satu anggota DNKI yang fokus di regulasi kebijakan serta layanan keuangan pemerintah.

Financial Action Task Force (FATF)

FATF adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman integritas sistem keuangan internasional. Pada awal pembentukannya, FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga saat ini.

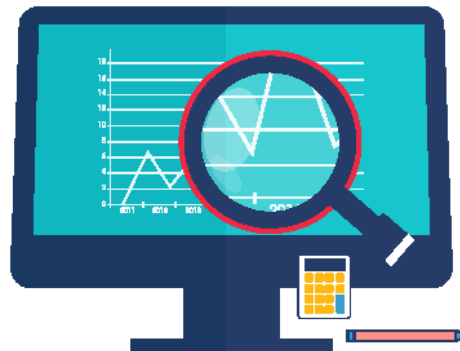
Sepanjang 2023, Kementerian Keuangan bersama dengan beberapa institusi terkait terlibat dalam rangkaian pertemuan FATF. Indonesia berupaya kuat terlibat di setiap agenda FATF dan lolos dalam rangkaian *Mutual Evaluation (ME) assessment* yang menilai sisi kepatuhan regulasi dan efektivitas implementasi regulasi dengan mengacu pada Rekomendasi FATF, sehingga Indonesia diterima sebagai anggota penuh FATF ke-40 pada 2023.

ASEAN Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC)

Peningkatan keuangan inklusif di kawasan ASEAN diwujudkan melalui pembentukan ASEAN *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC) oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada tahun 2016 yang bertujuan mendorong inisiatif untuk memajukan inklusi keuangan di kawasan ASEAN. WC-FINC bertugas untuk mempertimbangkan tindakan atau kebijakan dan mengoordinasikan inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan di kawasan ASEAN.

Sebagian besar inisiatif dilaksanakan dengan dukungan dari dan atau berkoordinasi dengan mitra pembangunan seperti *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), Bank Dunia/World Bank (WB), dan United Nations Capital Development Fund (UNCDF). Setiap tahunnya diadakan pertemuan berkala anggota ASEAN WC-FINC untuk mendapatkan *update* mengenai keuangan inklusif di masing-masing negara anggota serta membahas isu keuangan inklusif di kawasan ASEAN.

Pemantauan Sistem Keuangan dan Dasbor Makro Finansial



Badan Kebijakan Fiskal secara berkala menghasilkan laporan ekonomi keuangan seperti *Market Flash*, *Daily News*, dan *Weekly Report*. Laporan ini melayani kebutuhan berbagai *stakeholder*, dari pimpinan hingga publik, dan disebarluaskan melalui berbagai kanal. Untuk analisis cepat, *Market Flash* dan *Daily News* didiseminasi melalui *WhatsApp Group*, sementara *Weekly Report* yang berisi analisis mendalam tersedia di laman Badan Kebijakan Fiskal.

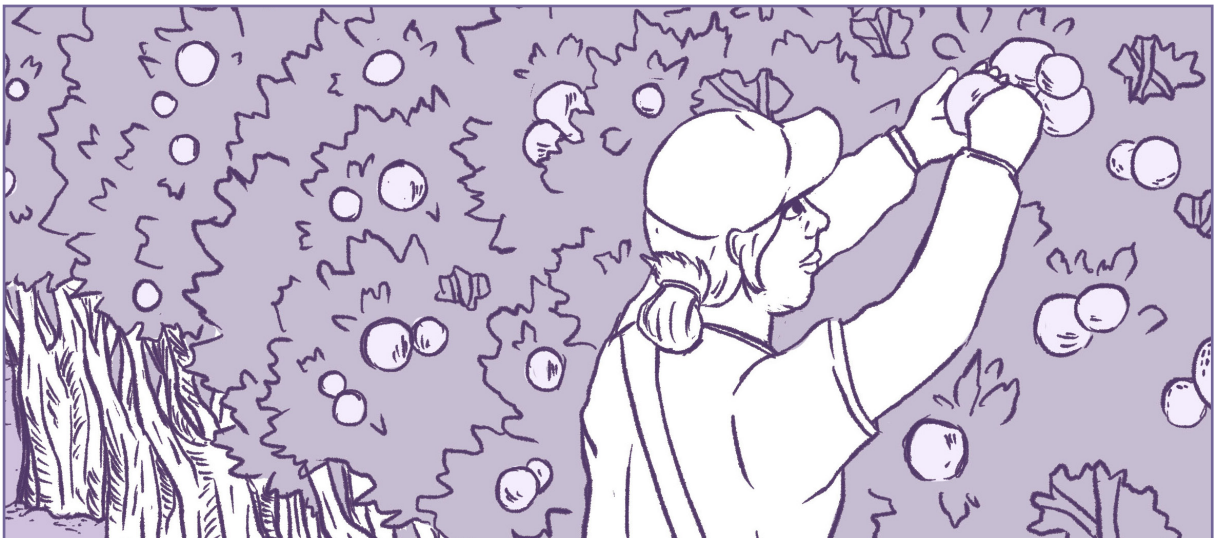
Badan Kebijakan Fiskal juga mengembangkan Dasbor Makro Finansial sebagai bagian dari Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dan *Data Analytics* sejak 2022. Dasbor ini menyajikan 11 bagian indikator keuangan dalam bentuk visual data yang mudah dianalisis, diakses melalui SLDK dan Portal Fiskal.

Pada 2023, pengembangan Dasbor Makro Finansial mencakup penambahan *Macro Financial Environment Tool Model* (*Ms. Muffet*). *Ms. Muffet* menampilkan indikator makro finansial dalam grafik *spider web*/radar, dilaporkan rutin kepada pimpinan dan dalam rapat triwulanan KSSK.

Kajian & Analisis

Sebagai unit perumus rekomendasi kebijakan di sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa berupaya memastikan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan komprehensif. Hal tersebut salah satunya ditunjang oleh tersedianya kajian dan analisis yang memadai serta diperkaya dengan pembahasan atau masukan dari para *stakeholders* terkait. Selain itu, perumusan kebijakan di sektor keuangan dilakukan tidak terlepas dari proses kajian mendalam guna menghasilkan kebijakan yang tepat (*based research policy*). Dalam rangka memberikan informasi kepada *stakeholders* dan masyarakat umum mengenai hasil kajian yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusivitas Keuangan



Saat ini, salah satu isu utama yang menjadi perhatian global dan Indonesia adalah isu dampak perubahan iklim terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan. Perhatian yang besar dari Indonesia terkait dampak perubahan iklim ditunjukkan melalui komitmen Indonesia dengan turut andil dalam meratifikasi berbagai inisiatif agenda perubahan iklim di internasional. Sektor keuangan menjadi ujung tombak dalam bentuk perwujudan pembangunan berkelanjutan yang menjadi stimulus pemberian pembiayaan pada kegiatan perekonomian.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan UMKM menjadi penting. Terkait dengan UMKM, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro

menghadapi permasalahan dan kendala dalam mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan. Rumusan beberapa tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian diantaranya:

1. *Benchmarking* mengenai dukungan peningkatan kapasitas dan model pembiayaan mikro hijau bagi UMKM yang menerapkan praktik ramah lingkungan di negara lain.
2. Mengidentifikasi model pembiayaan mikro *existing* oleh UMKM Hijau yang berkembang di Indonesia.
3. Menganalisis tantangan pengembangan keuangan mikro hijau di Indonesia saat ini dan bagaimana cara mengatasinya dalam rangka meningkatkan dampak dan jangkauannya.
4. Menganalisis akses keuangan oleh UMKM Hijau serta faktor utama dalam penerapannya.
5. Menganalisis dampak pembiayaan keuangan mikro terhadap UMKM Hijau di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesejahteraan.
6. Menganalisis peran lembaga keuangan dalam mempromosikan keuangan mikro hijau di Indonesia dan praktik/skema terbaik dalam mendukung pengembangannya.
7. Menganalisis dukungan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan keuangan mikro hijau dan langkah kebijakan yang paling efektif untuk mempromosikannya.

Hasil Penelitian

1. Berbagai negara telah memberikan dukungan peningkatan kapasitas UMKM melalui skema-skema pembiayaan mikro khususnya bagi UMKM yang menerapkan prinsip ramah lingkungan.
 - a. Dukungan yang diberikan meliputi skema pembiayaan *soft loans* (pinjaman berbunga rendah), pemberian jaminan seperti *loan individual guarantee*, *loan portfolio guarantee*, *equity guarantee*, dan *bank fundraising guarantee*, pemberian hibah, relaksasi dan insentif pajak, hingga dukungan kelembagaan seperti membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan bagi UMKM hijau.
 - b. Institusi keuangan publik, pasar utang, investasi sosial serta *financial technology* merupakan modal penting yang juga perlu diperhatikan guna meningkatkan akses keuangan bagi UMKM hijau.
2. Kondisi *existing* menunjukkan model bisnis pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Kondisi UMKM yang kebanyakan *unbankable*. Pada kondisi UMKM yang *unbankable*, produk pembiayaan tidak mengharuskan jaminan dan persyaratan legalitas usaha.
 - b. Sumber pembiayaan Lembaga Keuangan yaitu KUR dan non-KUR yaitu kredit modal kerja dan investasi.
 - c. Sumber pembiayaan di luar Lembaga Keuangan yang banyak diakses oleh UMKM adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pendanaan *philanthropy* (zakat

- produktif dan wakaf), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan kredit program dari pemerintah.
- d. Saat ini, tambahan pembiayaan bagi UMKM hijau selain Lembaga Keuangan adalah CSR (BUMN dan swasta), PKBL (per tahun 2023 dialihkan ke perbankan melalui program PUMK), PSBI, fasilitasi dari Kementerian/Lembaga untuk program tertentu.
3. Tantangan pengembangan keuangan mikro hijau di Indonesia dari studi literatur, dapat dirangkum sebagai *external credit rationing* sebagai berikut:
- a. Keterbatasan akses terhadap informasi keuangan mikro hijau,
 - b. Ketidakpastian teknologi, pasar dan peraturan yang ketat,
 - c. Kurangnya identifikasi terhadap risiko sosial dan lingkungan serta kurangnya kapasitas pada institusi keuangan,
 - d. Kurangnya insentif dari pemerintah terhadap proyek ramah lingkungan,
 - e. Proyek ramah lingkungan biasanya memakan waktu yang cukup panjang sementara fasilitasi pembiayaan biasanya diberikan dalam jangka waktu yang lebih pendek sehingga adanya ketidaksesuaian tempo pembiayaan,
 - f. Usaha atau proyek yang ramah lingkungan masih terbatas dan seringkali ramah lingkungan hanya sebagian kecil dari proses bisnis dan usaha sehingga realisasi pembiayaan pun akan tidak maksimal,
 - g. Masih kurangnya kapasitas sektor perbankan dalam mendukung usaha atau bisnis yang ramah lingkungan karena masih belum populernya isu ramah lingkungan dan atau ekonomi hijau di kalangan masyarakat secara umum, dan
 - h. Ekosistem *green finance* yang masih tergolong pada tahap pengembangan sehingga sistem pendukungnya seperti regulasi, kerangka kerja dan standarisasi untuk produk *green* juga belum siap.

Beberapa temuan terkait dengan akses keuangan UMKM Hijau terkait dengan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi akses keuangan UMKM hijau menunjukkan bahwa pada UMKM yang mendapatkan kredit, sebagian besar mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp500 juta.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap akses kredit adalah pendidikan pemilik UMKM, omzet usaha, dan area pemasaran produk. Semakin tinggi Pendidikan UMKM dan omzet usahanya, semakin besar pembiayaan yang diperoleh.
3. Tingkat pendidikan pemilik UMKM umumnya sejalan dengan tingkat literasi keuangan terkait produk pembiayaan yang bisa diakses untuk mengembangkan usahanya.
4. Omzet usaha UMKM dan area pemasaran produk berhubungan dengan kemampuan UMKM dalam pengembalian kredit semakin besar omzet usaha dan luas pemasaran, UMKM akan meningkatkan kredit yang diperoleh. UMKM dengan omzet besar dan berorientasi pasar ekspor akan memiliki likuiditas keuangan yang baik sehingga memiliki kemampuan pengembalian kredit yang baik.

Akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM.

1. Persepsi adanya peningkatan kesejahteraan ditinjau dari indikator peningkatan dalam kapasitas produksi, produktivitas, tenaga kerja, pendapatan, laba, variasi produk, aset, adopsi teknologi, investasi hijau, inovasi produk, dan praktik ramah lingkungan.
2. Penilaian oleh pemilik UMKM menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara persepsi terkait manfaat kredit dengan besarnya kredit yang diperoleh.
3. Persepsi positif terkait manfaat kredit lebih tinggi ditemui pada UMKM yang mendapatkan kredit lebih besar dibandingkan dengan UMKM yang mendapatkan kredit lebih rendah.
4. Hal tersebut menunjukkan semakin besar kredit yang bisa diakses dapat lebih mendukung peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi dan praktek ramah lingkungan.
5. Pembiayaan UMKM hijau dari perbankan terus meningkat seiring komitmen mendukung pembiayaan berkelanjutan. Skema penyaluran kredit berupa kredit program (KUR) dan kredit komersial baik kredit modal kerja maupun investasi. Saat ini, belum tersedia insentif tambahan untuk UMKM hijau secara khusus seperti subsidi bunga tambahan. Kondisi eksisting menunjukkan insentif pembiayaan pemerintah untuk UMKM hijau masuk dalam skema UMKM secara umum seperti KUR, KUR Pertanian dan KUR Alsintan. Sementara itu, kebijakan UMKM hijau terutama sektor pertanian pada tahun 2024 dialokasikan dukungan terhadap ketersediaan pupuk organik.
6. Otoritas moneter telah mengembangkan beberapa kebijakan *macroprudential* mendukung pembiayaan hijau namun belum fokus pada pengembangan UMKM hijau. Kebijakan *macroprudential green loan to value (LTV)/finance to value (FTV)* masih terbatas pada pembiayaan properti berwawasan lingkungan dan kendaraan listrik.

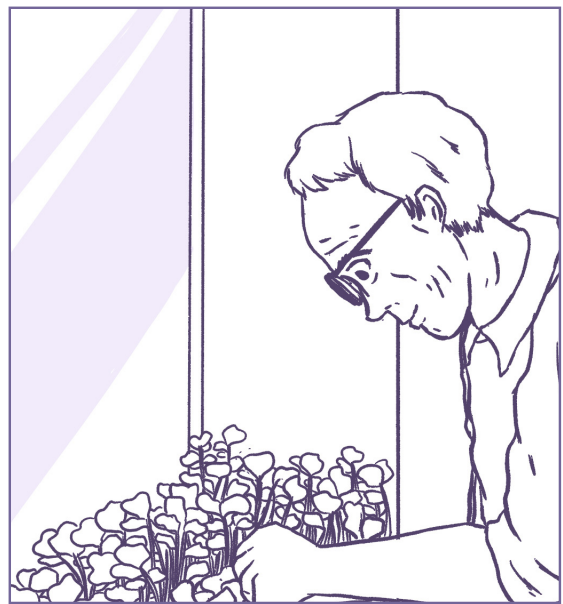
Rekomendasi Kebijakan

1. Komitmen perbankan dalam menyalurkan pembiayaan mikro hijau perlu didukung oleh insentif kebijakan. Saat ini, kebijakan *macroprudential green loan to value (LTV)/finance to value (FTV)* masih terbatas pada pembiayaan properti berwawasan lingkungan dan kendaraan listrik. Efektivitas pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) maksimal 1,5% per 1 April 2023 terhadap peningkatan pembiayaan hijau UMKM perlu mendapat perhatian dan apresiasi.
2. Pengembangan skema pembiayaan mikro hijau perlu memperhatikan tahapan dan tingkat usaha UMKM hijau. Mengacu pada studi BI dan ITAPS FEM IPB (2022 dan 2023) yang mengklasifikasikan bisnis UMKM hijau menjadi *Eco-Adopter*, *Eco-Entrepreneur* dan *Eco-Innovator*.
 - a. UMKM pra *Eco-Adopter* dan *Eco-Adopter* yang baru mengembangkan usahanya dapat dihubungkan dengan pendanaan CSR (BUMN dan swasta) dan dana *philanthropy* (zakat dan wakaf produktif, dan lainnya), Program Kemitraan Bina Lingkungan, dan program pemerintah. Pembiayaan yang dilakukan oleh non-Lembaga keuangan seperti program CSR perusahaan lebih diarahkan kepada aspek lingkungan yang dapat dikaitkan dengan bisnis utama atau dikaitkan dengan *supply chain* perusahaan sehingga tercipta nilai bersama (CSV).
 - b. UMKM *Eco-Entrepreneur* dapat dihubungkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- dengan pendampingan pengembangan usaha.
- c. UMKM *Eco-Innovator* dapat didukung untuk naik kelas sehingga dapat mengakses pembiayaan komersial.
3. Sejalan dengan komitmen peningkatan supply pembiayaan hijau dari perbankan maka berbagai kebijakan diarahkan untuk:
- a. Meningkatkan *demand* pembiayaan dari debitur UMKM hijau
 - b. Transformasi UMKM hijau perlu didukung insentif tambahan seperti insentif subsidi sertifikasi dan peningkatan transformasi energi untuk UMKM hijau.
 - c. *Supply* kredit hijau dari perbankan dipengaruhi permintaan dari debitur UMKM hijau. Oleh karena itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, otoritas moneter, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi diperlukan untuk peningkatan literasi keuangan dan pendampingan akses pembiayaan maupun dukungan untuk transformasi dan peningkatan kapasitas UMKM hijau.

Kajian Perbaikan Desain Jaminan Sosial melalui *Pre-Financing* Pesangon

“Indonesia Emas”, sebagai salah satu visi pembangunan jangka panjang Indonesia, memerlukan adanya reformasi program pensiun yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian di hari tua serta mengurangi penduduk lansia yang berada pada kondisi rentan. Terdapat enam program jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yaitu program jaminan kesehatan nasional, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua (JHT), program jaminan pensiun (JP), program jaminan kematian, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.



Kajian ini merupakan lanjutan dari Badan Kebijakan Fiskal di tahun 2022 dengan fokus kajian pada perbaikan jaminan untuk perlindungan hari tua. Dalam kajian tahun 2022, diketahui bahwa menurut *International Labour Organization* (ILO) suatu program perlindungan hari tua dikatakan baik apabila dapat memberikan manfaat setidaknya sebesar 40% *replacement ratio* (RR). Dengan kata lain, program pensiun dapat dikatakan memberikan manfaat yang layak apabila program tersebut bisa memberikan manfaat pensiun setiap bulan setidaknya 40% dari penghasilan terakhirnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sebuah publikasi pada tahun 2022 terkait dengan kondisi ekonomi penduduk berusia 60 tahun ke atas. Dari survei yang dilakukan, sebanyak 52,55% lansia masih aktif bekerja sebagai pekerja rentan di sektor informal dengan 41,11% lansia memiliki pendapatan di rentang 40% terbawah. Situasi buruk ini diperkirakan masih akan

terus berlanjut mengingat masih sedikitnya pekerja di Indonesia yang memiliki perlindungan pensiun dan masih rendahnya besaran manfaat pensiun yang mereka terima. Data per Desember 2022 menunjukkan dari seluruh angkatan kerja, hanya sekitar 21,5 juta jiwa yang memiliki perlindungan hari tua. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 400 ribu jiwa pekerja informal yang memiliki perlindungan tersebut atau dengan kata lain kurang dari 1% pekerja informal.

Dari sisi besaran manfaat, manfaat yang diterima oleh rata-rata pekerja formal di sektor privat adalah sebesar 9,7% RR. Dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,18 juta (BPS, 2023), maka rata-rata manfaat pensiun buruh saat ini kurang dari Rp350 ribu per bulan. Dengan kata lain, sebagian besar pekerja kita diperkirakan akan menjadi miskin di hari tua mereka. Sebagai konsekuensi, total aset pensiun kita saat ini hanya sebesar Rp1.231 Triliun (Seribu dua ratus tiga puluh satu triliun rupiah) atau setara dengan 6,29% dari PDB Indonesia. Angka ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Korea, Malaysia, dan Jepang yang aset pensiunnya sudah di atas 65% dari PDB mereka apalagi apabila dibandingkan dengan negara-negara OECD yang sudah lebih dari 100% PDB.

Rekomendasi Kebijakan

1. Untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi pekerja dan meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban Pesangon Pensiun, pembiayaan Pesangon Pensiun sebaiknya dilakukan secara *pre-financing*. Dengan kata lain, pemberi kerja mendanai kewajiban tersebut dengan mengalokasikan dana sejak pekerja bekerja di perusahaan milik pemberi kerja.
2. Pembiayaan *pre-financing* tersebut akan memberikan perlindungan hari tua yang lebih baik apabila diintegrasikan dengan program JHT dan JP SJSN. Pembiayaan *pre-financing* itu sendiri diperkirakan setara dengan 4,3% upah pekerja.
3. Integrasi 4,3% beban pemberi kerja dimaksud dilakukan dengan cara menambahkan porsi iuran pemberi kerja sebesar 0,3% pada program JHT dan 4% pada program JP. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik, diusulkan juga kenaikan iuran pekerja sebesar 2% pada program JP. Dengan demikian, setelah integrasi iuran program JHT akan menjadi 6% dan iuran program JP menjadi 9%.
4. Penyesuaian iuran sebagaimana dimaksud pada butir 3 dilakukan secara bertahap dalam sembilan atau sepuluh tahun. Hal ini dilakukan agar tidak ada kenaikan beban yang signifikan yang dirasakan oleh seluruh pihak.
5. Perlunya melakukan penyesuaian manfaat program JP dengan meningkatkan *accrual rate* menjadi 1,5%.
6. Kenaikan iuran porsi pemberi kerja beserta akumulasi dan hasil pengembangannya dapat dijadikan faktor pengurang kewajiban pemberi kerja bagi pekerja yang mengalami PHK.
7. Terhadap kewajiban kenaikan upah minimum, kenaikan iuran porsi pemberi kerja diberlakukan secara bergantian setiap tahun sebagai faktor pengurang kewajiban kenaikan upah minimum dan sebagai penambah kewajiban tersebut.
8. Mulai tahun ketika integrasi sudah dilakukan secara penuh, bagi pekerja dengan

usia 30 tahun atau kurang di saat itu dan terus berlanjut untuk tahun-tahun setelahnya, manfaat Pesangon Pensiun menjadi nol kali upah terakhir. Hal ini dikarenakan manfaat Pesangon Pensiun tersebut dianggap telah penuh dialihkan ke program JP dan program JHT.

9. Manfaat yang diterima pekerja akibat PHK untuk alasan selain mencapai usia pensiun tetap wajib diberikan pemberi kerja kepada pekerja. Namun, porsi kenaikan iuran pemberi kerja dampak dari integrasi dapat diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban akibat PHK dimaksud.
10. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk melengkapi kajian ini antara lain kajian mengenai: (1) besaran penyesuaian iuran program JP tahap kedua dalam mencapai program dengan pendanaan penuh, (2) usulan hanya sebagian dana JHT yang dapat diambil *lump sum* bagi Pekerja Baru dan lamanya waktu untuk penarikan sisa dana yang tidak diambil *lump sum*, dan (3) kemungkinan penyesuaian manfaat PHK dengan alasan selain mencapai usia pensiun.

Kajian Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia



Industri BPR/BPRS memang memiliki karakteristik cakupan bisnis yang cukup terbatas dibandingkan dengan bank umum, seperti memiliki cakupan fungsi intermediasi yang lebih terbatas dibandingkan bank umum, tidak dapat membuka cabang di luar daerah/provinsi domisilinya, dan BPR/BPRS juga tidak dapat berpartisipasi dalam layanan transaksi valuta asing dan asuransi.

Terlepas dari keterbatasan itu, BPR/BPRS memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bank umum. Pertama, walaupun BPR/BPRS memiliki ukuran bisnis yang lebih kecil, BPR/BPRS memiliki jumlah yang lebih besar dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk daerah dengan akses keuangan rendah. Dengan segmen pasar retail yang spesifik, BPR/BPRS telah berkontribusi dalam inklusi keuangan, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama UMKM yang masih berorientasi pada sektor informal dan tidak mendapatkan kredit dari bank umum. Kedua, dengan jangkauan operasional yang lebih sempit (terbatas dalam satu provinsi), BPR/BPRS bisa menjadi bank lokal yang menyesuaikan bisnis modelnya terhadap kebutuhan masyarakat lokal, yang akan mempermudah peningkatan

penetrasi pasar di daerah tempatnya beroperasi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja, keberagaman strategi bisnis, dan tantangan yang dihadapi BPR/BPRS dalam menjalankan fungsi intermediasinya serta menjaga daya saingnya di tengah tingkat kompetisi yang cukup tinggi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa BPR/BPRS telah melakukan berbagai strategi unik untuk bertahan dan menjaga daya saing di tengah kompetisi yang ketat. Akan tetapi, strategi-strategi ini belum dapat mengoptimalkan peranan BPR/BPRS dalam menjalankan peranan intermediasinya. Hal ini karena adanya hambatan-hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, permodalan, serta infrastruktur keuangan. Oleh karena itu, arah kebijakan perlu memprioritaskan faktor-faktor tersebut sehingga dapat meningkatkan kontribusi BPR/BPRS dalam perekonomian nasional.

Kajian Pemurnian Koperasi Simpan Pinjam dan Identifikasi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Kajian ini disusun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan salah satu jenis lembaga yang memiliki peran penting sebagai sumber akses pendanaan bagi usaha mikro. Kemampuan LKM sebagai lembaga intermediasi yang dapat menjangkau masyarakat pelosok mendorong pemerintah meningkatkan keterlibatan LKM dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. LKM diatur melalui UU No 1 tahun 2013 tentang LKM. Salah satu isu yang penting dalam UU No 1 tahun 2013 adalah ditunjuknya Otoritas jasa Keuangan (OJK) sebagai entitas yang menangani perizinan, regulasi dan pengawasan.

Keluarnya UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) terutama di pasal 28 memberi ruang untuk dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala kecil dan inkubasi. UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK memuat ketentuan yang secara rinci mengatur pembinaan dan pengawasan LKM berskala kecil dan LKM inkubasi yaitu LKM yang tidak menghimpun dana dari masyarakat, mereka mendapatkan dana dari program pemerintah ataupun lembaga donor dan melakukan kegiatan pinjaman. Ketentuan pada pasal 204 UU No. 4 tahun 2023 tersebut menetapkan bahwa LKM yang telah beroperasi namun belum memiliki izin dari OJK wajib untuk mendaftarkan perizinan ke OJK apabila melakukan kegiatan penghimpun dana masyarakat, sementara LKM yang tidak menghimpun dana dari masyarakat harus terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai LKM Inkubasi.

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk:

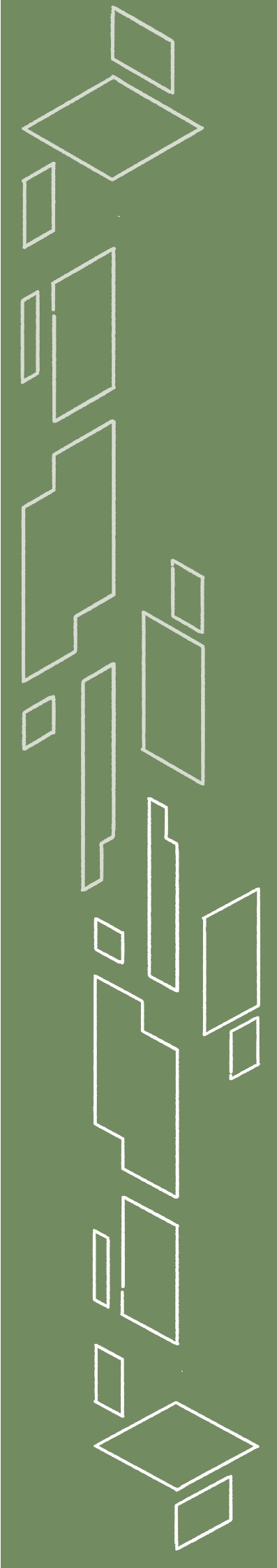
1. Menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh LKM inkubasi agar terdaftar pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta mampu menjadi lembaga jasa keuangan yang memiliki izin usaha dari OJK.
2. Menganalisis kebutuhan dan mekanisme untuk persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan LKM inkubasi serta pembinaan

dan pengawasan terhadap LKM skala usaha kecil.

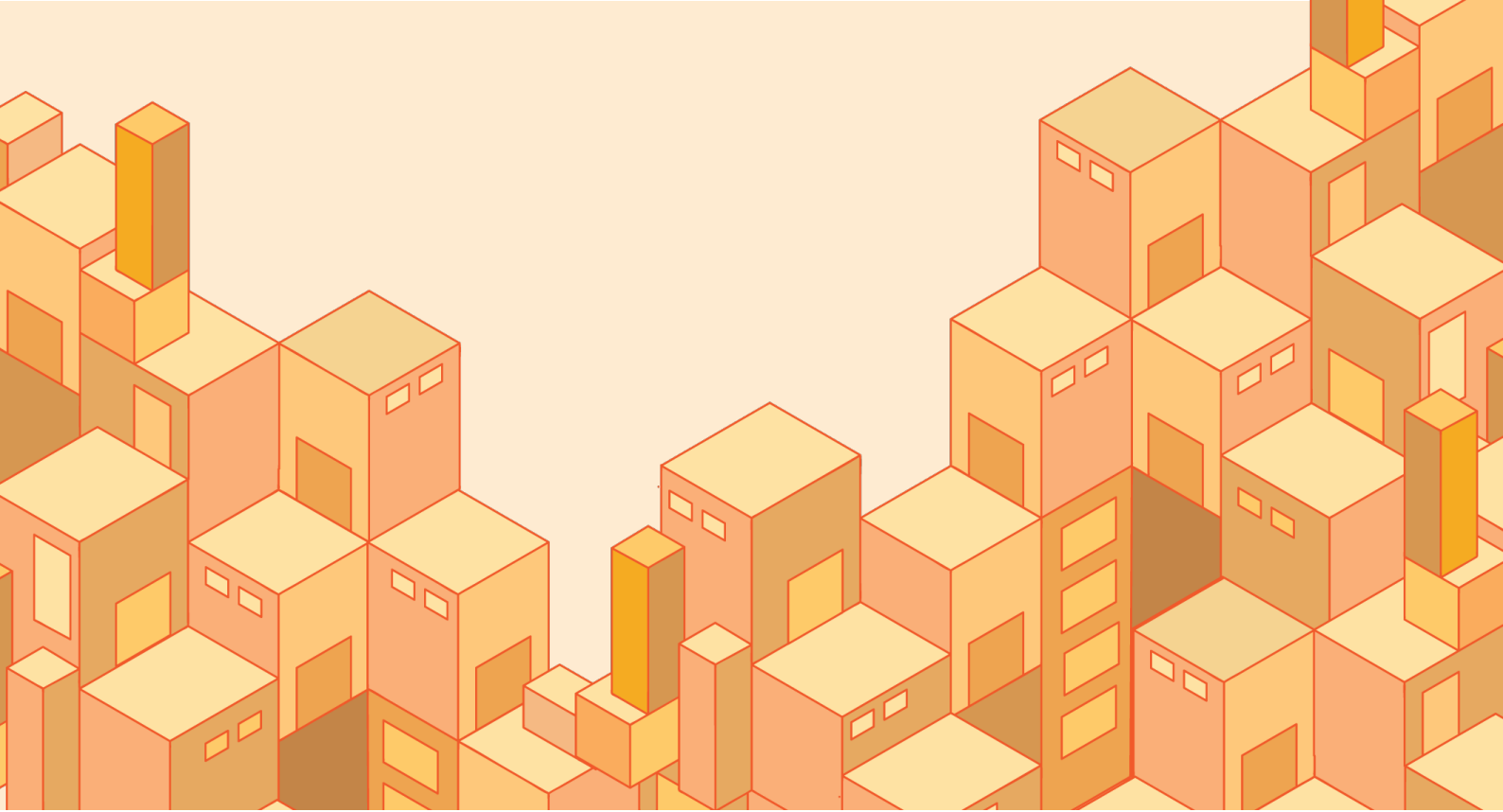
3. Menganalisis kriteria pengelompokkan LKM skala usaha kecil, menengah, dan besar.

Hasil temuan sementara dari penelitian ini secara umum, yaitu kebutuhan LKM Inkubasi agar terdaftar di Pemerintah Daerah, ada beberapa indikator yang mempengaruhi minat suatu LKM inkubasi untuk mendaftar ke pemerintah daerah antara lain kinerja keuangan LKM, mitigasi risiko yang dilakukan oleh LKM untuk mengurangi adanya gagal bayar/kredit macet dari nasabah, sumber daya manusia, serta teknologi yang dimiliki LKM dan dukungan infrastruktur. Dari olah data responden menunjukkan bahwa ada dua jenis LKM dalam pembahasan ini; Pertama, LKM yang berizin OJK jumlahnya sekitar 80%; Kedua, LKM inkubasi yang tidak berizin OJK dan tidak terdaftar di pemerintah daerah sekitar 20%. Untuk LKM yang berizin OJK proses bisnisnya sudah dikelola secara profesional mengikuti aturan dari OJK dalam hal memberikan pelaporan baik substansi pelaporan maupun mekanisme pengiriman laporan ke OJK. Sedangkan, untuk LKM inkubasi proses bisnisnya masih belum dikelola secara profesional khususnya dalam pembuatan laporan keuangan.





KERJA SAMA INTERNASIONAL



Kerja Sama Bilateral

Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit *focal point* Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN) di lingkungan Kementerian Keuangan, telah melaksanakan pelayanan KTLN selama tahun 2023 yang meliputi pengurusan dokumen penawaran dan pencalonan pegawai untuk kegiatan peningkatan kapasitas, pengurusan perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dibiayai sponsor asing, serta pengurusan perizinan penugasan tenaga asing di lingkungan Kemenkeu.

Selama tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal telah memproses sebanyak 33 tawaran program beasiswa *non-degree* dari berbagai negara/lembaga mitra pembangunan dalam 12 program kerangka KTLN, dengan total 35 dokumen dan 202 peserta yang diajukan untuk mengikuti program tersebut. Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan pengurusan dokumen perizinan untuk PDLN yang dibiayai sponsor asing sebanyak 188 dokumen untuk sebanyak 345 pegawai yang berasal dari 11 Unit Eselon I dan 2 Unit Noneselon.

Berdasarkan *gender*, dari 202 pegawai pemanfaat program tawaran beasiswa *non-degree* yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal, pemanfaat laki-laki mencapai 138 pegawai (68%) dan pemanfaat perempuan 64 pegawai (32%). Singapura menjadi negara penyelenggara program beasiswa *non-degree* dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu 99 pegawai. Berikutnya Vietnam sebanyak 43 pegawai, Korea Selatan sebanyak 23 pegawai, Malaysia sebanyak 15 pegawai, Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 11 pegawai, Jepang sebanyak 8 pegawai, dan Uni Emirat Arab sebanyak 3 pegawai.

Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2023 juga telah melakukan pengurusan dokumen perizinan untuk melakukan PDLN yang dibiayai sponsor asing, pada tahun 2023 Badan Kebijakan Fiskal telah

melaksanakan pengurusan dokumen perizinan untuk melakukan PDLN yang dibiayai sponsor asing sebanyak 188 dokumen dengan jumlah pegawai sebanyak 345 pegawai.

Adapun pada periode tahun 2023, jumlah tenaga asing yang diproses dokumen perizinannya ada sebanyak 4 pegawai yang ditugaskan pada dua instansi yaitu DJP sebanyak 3 pegawai dan BKF sebanyak 1 pegawai.

Kerja Sama Multilateral

Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan berbagai program upaya penguatan diplomasi dan posisi kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dalam rangka mendukung kebijakan fiskal. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilaksanakan melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum dan pertemuan internasional yang dilaksanakan selama tahun 2023. Diplomasi yang dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia (Delri) dan perwakilan Indonesia melalui partisipasi aktif dimaksud diperlukan dalam rangka mengelola hubungan kerja sama internasional serta memperoleh manfaat optimal dan berkelanjutan dari kehadiran dan kerja sama internasional tersebut.

Secara umum pada berbagai rangkaian pertemuan internasional yang dihadiri Delri terdiri dari pertemuan utama, *side event*, seminar, diskusi panel, dan dialog kebijakan. Selain itu, Delri juga memanfaatkan momentum kehadiran untuk mengatur dan bertemu dengan berbagai negara mitra dan lembaga keuangan internasional secara bilateral dalam rangka membahas dan bernegosiasi terkait dengan isu dan agenda prioritas internasional Indonesia. Beberapa pertemuan penting yang dihadiri secara aktif oleh Delri yang dipimpin oleh Menteri Keuangan selama tahun 2023, antara lain:

The Spring Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2023



Rangkaian pertemuan *The Spring Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF-WBG) 2023* diselenggarakan pada tanggal 10–16 April 2023 di Kantor Pusat IMF–WBG di Washington DC, Amerika Serikat. Beberapa pertemuan utama yang dihadiri oleh Delri antara lain pertemuan WBG “*Unlocking the Full Potential of Digital Transformation in Southeast Asia:*

Role of Public and Private Sector”, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, pertemuan terbatas *Early Warning Exercise* (Restricted EWE) dan *International Monetary and Finance Committee* (IMFC) *Breakfast*, serta Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (*Coalition of Finance Ministers for Climate Action*). Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, termasuk penguatan dan dukungan kepada UMKM sebagai aktor penting perekonomian Asia Tenggara. Bertepatan dengan momentum Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen memperkuat inklusi keuangan ASEAN, khususnya keuangan digital dan membangun ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

The 48th Islamic Development Bank Annual Meetings 2023



Rangkaian pertemuan *The 48th Islamic Development Bank (IsDB) Annual Meetings 2023* diselenggarakan pada tanggal 10–13 Mei di Jeddah, Arab Saudi. Menteri Keuangan Indonesia turut hadir sebagai Gubernur IsDB untuk Indonesia. Pertemuan tahun 2023 ini bertema “Partnerships to Fend off Crises” yang membahas mengenai perkembangan ekonomi global terutama bagi 57 negara anggota, penguatan kerja sama dalam menangkal krisis dan tantangan global pascapandemi COVID-19, serta mewujudkan tujuan jangka panjang berkelanjutan. Salah satu pembahasan utama yang dapat digarisbawahi adalah terkait peningkatan Kerja Sama Selatan Selatan (KSS) dalam menangkal krisis. IsDB memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bank pembangunan multilateral lain dalam mendorong KSS dan negara anggota IsDB merupakan negara berkembang. Menteri Keuangan meminta agar IsDB meningkatkan dukungan pembiayaan pembangunan kepada negara anggota, termasuk melalui KSS, serta memastikan pembiayaan murah, seperti melalui hibah atau pendanaan campuran.

The 8th Asian Infrastructure Investment Bank Annual Meetings 2023

Rangkaian pertemuan *The 8th Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Annual Meetings 2023* diselenggarakan pada tanggal 25–26 September 2023 di Sharm El Sheikh, Mesir. Pertemuan ini mengusung tema *Sustainable Infrastructure Towards Connected World* yang secara umum membahas isu pembiayaan perubahan iklim, konektivitas, inklusi, dan mobilisasi pendanaan



swasta. Delri mendorong isu agar AIIB dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra pembangunan untuk merancang kerangka peraturan yang jelas dan transparan dalam rangka menyediakan pendanaan yang murah dan terjangkau bagi negara berkembang.

The Coalition of Finance Ministers for Climate Action



Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 14 April 2023 dan 11 Oktober 2023 di Washington DC, Amerika Serikat. Rangkaian pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan sebagai *co-chairs* Koalisi bersama dengan Menteri Keuangan Belanda. Pada forum ini, selain menjadi sarana bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan menunjukkan komitmen Indonesia terkait aksi iklim, Koalisi mengarahkan negara-negara anggota untuk penguatan kolaborasi dengan *NDC Partnership* dalam rangka memfasilitasi penguatan peran Menteri Keuangan terkait penyusunan NDC dan *Long Term Strategy* ke depan. Upaya ini dipandang dapat semakin meningkatkan peran para Menteri Keuangan dalam mencapai tujuan *Paris Agreement*.

The Annual Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF–WBG) 2023

Rangkaian pertemuan *The Annual Meetings of the International Monetary Fund–World Bank Group (IMF–WBG) 2023* diselenggarakan pada tanggal 11–15 Oktober 2023 di Marrakech, Maroko. Salah

satu pandangan yang disampaikan Delri yang dapat digarisbawahi pada rangkaian pertemuan ini adalah seruan Menteri Keuangan menyerukan agar anggota ASEAN bersama WBG dan IMF terus memperkuat sinergi untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tingginya tingkat utang, isu perubahan iklim, transisi digital, serta ketahanan pangan dan gizi. Kebijakan yang terencana, sistematis, dan disusun secara berurutan merupakan kebutuhan penting untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan memberikan dukungan terhadap transisi hijau dan digital. Selain itu, Menteri Keuangan juga menawarkan dukungan kuat dari Indonesia bagi kolaborasi antara Bank Dunia dan IMF untuk membantu negara-negara anggota mengatasi tantangan perekonomian global dan meningkatkan peluang pemulihan krisis dengan cepat. Pandangan ini disampaikan sejalan dengan momentum Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.

The 56th Asian Development Bank Annual Meetings 2023

Rangkaian pertemuan *The 56th Asian Development Bank (ADB) Annual Meetings 2023* pada tanggal 2-5 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan dan dihadiri oleh para *Governors* dan *Alternate Governors* ADB yang berasal dari 68 negara anggota. Pertemuan ini mengambil tema *Rebounding Asia: Recover, Reconnect, and Reform* yang secara umum membahas tantangan ketidakpastian ekonomi global dan peran multilateralisme, evolusi bank pembangunan multilateral (MDBs) dan reformasi ADB, serta evaluasi strategi ADB 2030 untuk dapat menyesuaikan dengan tantangan terkini yang dihadapi oleh negara anggota. Salah satu pandangan Menteri Keuangan yang dapat digarisbawahi dalam rangkaian pertemuan tersebut diantaranya apresiasi kepada ADB dan ADB Institute dalam mendukung berbagai capaian Presidensi G20 Indonesia sehingga menegaskan pentingnya kebijakan yang berlandaskan pada riset baik pada level global, regional, maupun nasional. Menteri Keuangan juga mendorong agar G20 dan G7 dapat bekerja sama dengan lebih banyak negara selatan untuk mendapatkan sudut pandang lebih komprehensif dalam menentukan kebijakan global.

Conference of the Parties 28 (COP 28) Ministerial Meeting

Rangkaian pertemuan COP28 diadakan oleh *United Nations Framework on Climate Change Conference* (UNFCCC) pada tanggal 30 November-13 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab serta melibatkan kepala negara dan pemerintahan, perwakilan delegasi nasional, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, perwakilan masyarakat adat dan pemuda, filantropi, serta organisasi internasional. Secara umum, COP28 menghasilkan beberapa pencapaian signifikan, termasuk memperkuat komitmen dalam transisi energi, pendanaan untuk kerugian & kerusakan, dan penguatan kapasitas negara untuk menjadi lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, konferensi memberikan peluang bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dan menunjukkan solusi konkret untuk masalah iklim global. Dalam pertemuan ini, para Menteri Keuangan juga membahas peran mereka dalam memobilisasi pendanaan iklim publik dan swasta untuk mendorong kemajuan menuju komitmen Perjanjian Paris.

Penguatan Diplomasi melalui Partisipasi Aktif di Forum dan Pertemuan Internasional

Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga turut berpartisipasi secara aktif pada berbagai pertemuan internasional pada tingkat teknis, diantaranya:

a) Bonn Climate Change Conference (SBSTA 58 dan SBI 58)

Kementerian Keuangan Indonesia memimpin negosiasi terkait pendanaan perubahan iklim (climate finance) dalam konferensi internasional Bonn Climate Change Conference (Bonn CCC) yang berlangsung pada 5-15 Juni 2023 di Jerman. Delegasi Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal, berpartisipasi aktif dalam berbagai sesi terkait Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI), dengan fokus pada isu pendanaan iklim dalam beberapa agenda SBI. Delegasi Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat secara daring dalam Global Dialogue di bawah Mitigation Work Programme pada 3-5 Juni 2023, menyampaikan paparan mengenai platform ETM Indonesia. Mereka menyoroti blended finance sebagai solusi untuk mendorong aksi mitigasi, dengan memadukan pendanaan publik dan swasta.

Delegasi Badan Kebijakan Fiskal juga hadir langsung pada 12-14 Juni 2023 di Bonn dalam beberapa agenda terkait climate finance, termasuk dialog teknis terkait New Collective Quantified Goal (NCQG), Standing Committee on Finance (SCF), dan Adaptation Fund. Pembahasan NCQG menjadi krusial karena akan menjadi dasar agenda High Level Ministerial Dialogue on NCQG di COP28. Blended finance, inovasi pendanaan yang diterapkan Indonesia, dianggap relevan dan menjadi solusi penting dalam meningkatkan ambisi dan implementasi aksi mitigasi di forum internasional.

b) Rangkaian Pertemuan Board of Directors (BOD) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)



Delegasi Indonesia c.q. Badan Kebijakan Fiskal telah hadir pada rangkaian beberapa pertemuan Board of Directors (BOD) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai Alternate Director AIIB Konstituensi 11 yang mendukung Director dari Sri Lanka. Badan Kebijakan Fiskal telah menghadiri rangkaian BOD berikut ini: (i) BOD Meeting daring tanggal 15 Februari 2023; (ii) BOD Meeting daring tanggal 19 April 2023; (iii) BOD Meeting di Beijing, Tiongkok tanggal 12–16 Juni 2023; (iv) BOD Meeting daring tanggal 13 Juli 2023; (v) BOD Meeting daring tanggal 22 September 2023; (vi) BOD Meeting daring tanggal 22 November 2023; dan (vii) BOD Meeting di Beijing, RRT tanggal 11–15 Desember 2023.

Badan Kebijakan Fiskal, sebagai instansi kunci dalam kerja sama Indonesia dengan AIIB, berpartisipasi dalam BOD Meeting AIIB untuk mencatat, memantau, dan memberikan arahan strategis terkait proyek-proyek yang diusulkan dan disetujui. Kehadiran wakil Indonesia di rapat ini memberikan kesempatan untuk mengarahkan, mengawasi, dan memonitor operasional AIIB, serta memastikan peningkatan dukungan AIIB untuk Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal juga memantau kemajuan proyek-proyek Indonesia, baik yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, agar dapat dijalankan secara optimal dan disetujui oleh AIIB.

c) Asian Development Fund (ADF) 14 First Replenishment Meeting

Asian Development Fund (ADF) adalah dana khusus yang dibentuk oleh Asian Development Bank (ADB) untuk memberikan hibah kepada negara anggota ADB yang berpenghasilan rendah. ADF 13 telah diimplementasikan dari 2021 hingga 2024 untuk mendukung proyek-proyek sesuai Strategi ADB 2030. Sebagai negara donor, Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal hadir dalam pertemuan ADF 14 di New Delhi, India pada 14–16 November 2024. Pertemuan ini membahas penyempurnaan usulan ADB secara lebih rinci dan komprehensif, termasuk metodologi alokasi dan isu-isu fokus ADF periode 14.

d) Fourth Session of the Consultation on the Thirteenth Replenishment of IFAD's Resources (IFAD13)

Pertemuan konsultasi sesi keempat IFAD13 adalah pertemuan terakhir untuk membahas penambahan kapasitas pendanaan IFAD, setelah tiga sesi sebelumnya diadakan sepanjang 2023. Pertemuan ini diadakan pada 14–15 Desember 2023 di Paris, dengan Pemerintah Perancis dan Angola sebagai tuan rumah. Delegasi Indonesia, melalui Badan Kebijakan Fiskal, hadir mewakili Staf Ahli Menteri Keuangan. Pertemuan ini dianggap penting karena IFAD memiliki peran strategis dalam menghadapi krisis global seperti krisis pangan, energi, kesenjangan ekonomi, pelambatan ekonomi, konflik, pandemi, dan perubahan iklim, yang menghambat pencapaian tujuan SDGs 2030.

e) Pertemuan dan Kerja Sama dengan OECD

Sebagai focal point kerja sama Indonesia-Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Badan Kebijakan Fiskal juga mendukung partisipasi Kementerian Keuangan dalam berbagai pertemuan dalam kerangka kerja sama dengan OECD, diantaranya:

i. Rapat Koordinasi Pembahasan Joint Work Programme (JWP) Indonesia – OECD tahun 2022-2025

Joint Work Programme (JWP) adalah kerangka kerja sama prioritas antara Indonesia dan OECD yang disusun untuk mendukung kepentingan strategis nasional. JWP periode 2022-2025 merupakan yang keempat, diluncurkan pada 14 Juli 2022, berfokus pada kebijakan pasca-pandemi dengan 4 pilar utama: kebijakan makroekonomi, iklim bisnis dan digitalisasi, modal manusia dan inklusi sosial, serta pembangunan berkelanjutan. JWP ini bertujuan membantu Indonesia dalam reformasi kebijakan sesuai RPJMN dan mendekati standar OECD.

Pada 2023, kerja sama JWP memasuki tahun kedua, namun beberapa program masih dalam tahap diskusi. Untuk memantau perkembangan, Badan Kebijakan Fiskal mengadakan rapat koordinasi dua kali setahun, yaitu pada 19-20 Juni dan 16-17 November 2023, melibatkan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pilar-pilar JWP, antara lain:

- **Pilar 1 (Sound macroeconomic policy, tax compliance and good governance)**

Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian BUMN, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

- **Pilar 2 (The business climate and digitalization)**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bank Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- **Pilar 3 (Human capital and social inclusion)**

Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- **Pilar 4 (Sustainability development)**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan hasil pertemuan, saat ini masing-masing Kementerian/Lembaga terkait telah berjalan aktif melakukan kerja sama dengan OECD dan mendukung pelaksanaan JWP 2022-2025. Adapun beberapa perkembangan yang menjadi sorotan, antara lain:

- **Pilar I (Sound macroeconomic policy, tax compliance and good governance)**

Ditjen Pajak menjelaskan langkah konkret, termasuk kerja sama dengan OECD dalam Technical Cooperation on International Taxation. Fokus ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional di bidang perpajakan dan kebijakan ekonomi.

- **Pilar II (The Business Climate and Digitalization)**

BKPM mencatat reformasi signifikan, terutama terkait dengan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja. Kerjasama dengan OECD dalam hal digital government dan kemampuan untuk meningkatkan ease of doing business di Indonesia menjadi sorotan utama.

- **Pilar III (Human Capital and Social Inclusion)**

Kemendikbudristek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Guru Penggerak dan inisiatif Merdeka Belajar. Kerja sama internasional, seperti PISA, juga menjadi fokus untuk memastikan standar pendidikan yang tinggi.

- **Pilar IV (Sustainable Development)**

Indonesia berperan aktif dalam Clean Energy Finance and Investment Mobilization Programme (CEFIM) dan Sustainable Ocean Economy, dengan dukungan OJK pada pembiayaan bersih dan KKP pada pembangunan sektor perikanan. Secara keseluruhan, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan dalam diskusi global terkait ekonomi, keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Badan Kebijakan Fiskal mendorong komunikasi dan kolaborasi erat antara Kementerian/Lembaga terkait dengan OECD untuk program JWP 2022-2025 melalui Kantor Perwakilan OECD di Jakarta. OECD Economic Survey Mission direncanakan berlangsung pada Februari 2024. Kementerian/Lembaga terkait diharapkan bekerja sama dalam koordinasi kunjungan misi tersebut.

ii. OECD Economic Survei

Pada 2023, Menkeu mengajukan pelaksanaan OECD Economic Survey of Indonesia 2024 (ES 2024), yang diadakan setiap dua tahun sebagai bagian dari kerja sama Indonesia-OECD. ES 2024 akan mengkaji perkembangan ekonomi terkini, termasuk dampak pandemi, inflasi, rantai nilai global, dan reformasi kebijakan struktural, serta topik khusus seperti Digitalisasi dan Perubahan Iklim. OECD juga berencana mengadakan Structural Mission ke Indonesia pada Februari 2024, di mana Badan Kebijakan Fiskal akan mendukung penyelenggaraan pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait.

iii. OECD Council Meeting

Pertemuan OECD Council Meeting tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2023 secara fisik di Kantor Pusat OECD di Paris, secara back-to-back dengan agenda World Bank Group-International Monetary Fund Annual Meeting di Marrakesh, Maroko. Sekjen OECD mengundang Menkeu untuk hadir dan menyampaikan paparan terkait rencana akses Indonesia di OECD. Adapun poin-poin yang disampaikan Menkeu adalah sebagai berikut:

- Indonesia melakukan reformasi di bidang fiskal dan perpajakan.
- Pencapaian ekonomi mencakup peningkatan GDP dan pengelolaan inflasi selama 20 tahun terakhir.
- Indonesia berhasil menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.
- Ada perbaikan di sektor fiskal, perpajakan, dan moneter untuk mendukung Visi Indonesia 2045.
- Kebijakan net zero emission difokuskan pada Pajak Karbon dan Pasar Karbon, termasuk peluncuran Indonesia Carbon Exchange.
- Indonesia berperan penting dalam G20 2022 dan ASEAN 2023, dengan fokus pada transisi energi, digitalisasi, dan ekonomi hijau.
- Indonesia meminta dukungan negara anggota OECD untuk akses ke OECD.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi negara anggota OECD menyambut baik paparan Menkeu dan sebagian besar mendukung akses Indonesia ke OECD. Beberapa negara menekankan pentingnya dialog nasional dengan pemangku kepentingan serta menanyakan posisi oposisi dan kebijakan RI terkait transisi energi, antikorupsi, isu gender, dan reformasi. Menkeu mengapresiasi dukungan tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan reformasi sesuai nilai-nilai OECD, sembari menekankan bahwa proses demokrasi di Indonesia memungkinkan perbedaan pandangan diakomodasi. Indonesia berpotensi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan OECD, membawa dampak positif bagi organisasi tersebut.

iv. OECD Ministerial Council Meeting (MCM)

MCM adalah pertemuan tahunan tingkat menteri Dewan OECD. MCM 2023 diadakan pada 7-8 Juni di Paris dengan tema “Securing resilient future: Shared values and global partnership,” diketuai oleh Inggris dengan Kosta Rika dan Selandia Baru sebagai Wakil Ketua. Fokusnya adalah mengatasi tantangan ketahanan ekonomi dan membina kemitraan global.

Pertemuan MCM tahun 2023 berfokus pada kebersamaan mengatasi tantangan ketahanan ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam membangun serta membina kemitraan dengan negara-negara di luar keanggotaan OECD. Pertemuan MCM 2023 mengusung tiga topik utama, yakni:

- Economic Resilient: dalam mendukung kebijakan untuk nilai ekonomi dan pertumbuhan inklusif yang lebih kuat;
- Future Frontiers: dalam mendorong pengembangan teknologi inovatif untuk ekonomi net zero; dan
- Global Partnership: pengembangan komitmen jangka panjang terhadap wilayah IndoPasifik.

Hasil pertemuan MCM 2023 mencakup:

- Penerbitan kerangka kerja baru untuk keterlibatan dengan Indo-Pasifik, serta kemajuan dalam kemitraan dengan Afrika dan akses beberapa negara baru.
- Peluncuran Global Forum on Technology dan peningkatan keanggotaan IFCMA
- Dukungan pasar terbuka melalui “OECD’s Contribution to Promoting Open Markets”.
- Dukungan kesetaraan gender dengan menyetujui “OECD’s Contribution to Promoting Gender Equality”.

v. Pertemuan Tingkat Menteri OECD South East Asia Regional Program (PTM OECD SEARP)

PTM OECD SEARP adalah pertemuan tahunan tingkat menteri antara negara anggota OECD, ASEAN, dan kawasan Pasifik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kebijakan. PTM OECD SEARP 2023 diadakan pada 26–27 Oktober 2023 di Hanoi, Vietnam, dengan tema “Sustainable and Quality Investment: New Momentum for OECD–Southeast Asia Partnership,” yang berfokus pada peluang kerja sama antara OECD dan Asia Tenggara. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pada sesi pertama, Delri menyampaikan intervensi terkait tren investasi global dan peluang investasi berkelanjutan di Asia Tenggara.

- Indonesia akan terus mendorong peningkatan investasi berkelanjutan dan berkualitas, khususnya melalui penguatan dan internasionalisasi UMKM.
- Investasi global harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki aspek keberlanjutan serta mendorong stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara
- Mendorong negara anggota OECD untuk terus mendukung sistem perdagangan dan investasi multilateral yang rules-based.

Pada sesi kedua (Financing the energy transition: where to from here?), Delri menyampaikan beberapa intervensi dengan pesan utama, antara lain:

- Indonesia berkomitmen pada target dekarbonisasi nasional, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan;
- Mendorong forum konsultasi antara pakar terkait kemitraan pendanaan publik-swasta, dengan pendanaan transisi energi dari berbagai sumber, termasuk blended finance;
- Indonesia meluncurkan pasar karbon pada Oktober 2023 untuk mendukung transisi energi dan pembangunan hijau.

Delri berpartisipasi dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Laos, Sekjen OECD, dan Dubes Kanada untuk OECD. Dalam pertemuan dengan Laos, Indonesia mendukung Keketuaan Laos di ASEAN 2024 dan berbagi pengalaman dari Presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023. Dengan Sekjen OECD, Indonesia menyampaikan tiga strategi jangka pendek untuk akses OECD, termasuk pembentukan “Tim Kerja” nasional, memastikan dukungan dari negara anggota OECD, dan sinergi dengan stakeholders domestik. Pada pertemuan dengan Dubes Kanada, Kanada menyambut baik dan mendukung rencana akses Indonesia ke OECD, sementara Indonesia mengapresiasi dukungan tersebut dan menyampaikan upaya reformasi struktural yang telah dilakukan.

vi. Pertemuan The Working Party No. 1 of the Economic Policy Committee

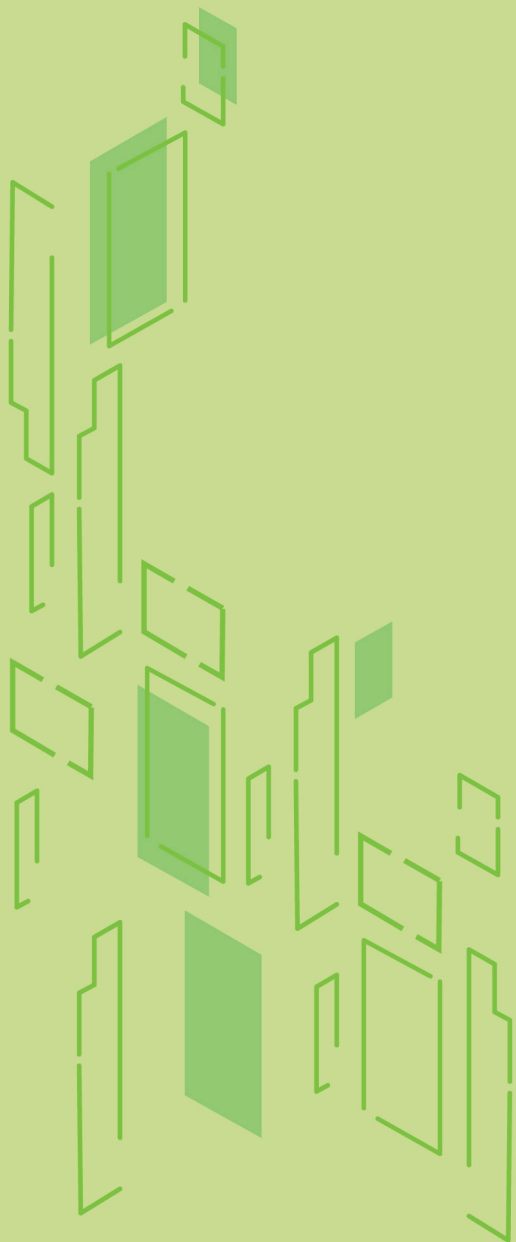
Working Party No. 1 adalah pertemuan rutin tim kerja OECD yang membahas isu-isu penting dan memungkinkan Indonesia untuk mengikuti perkembangan kebijakan di negara-negara OECD serta menyampaikan kebijakan nasional terkait. Pada tahun 2023, topik utama yang dibahas meliputi pertumbuhan hijau, kapasitas finansial perusahaan dalam transisi hijau, serta kebijakan perumahan yang lebih baik. Dua workshop diadakan dengan tema investasi hijau dan dampak pasar tenaga kerja dari ekonomi hijau. Selain

itu, beberapa topik kajian baru seperti IFCMA dan kebijakan industri akan diusulkan. Hasil diskusi ini akan dibawa ke tingkat deputi dan menteri dalam pertemuan OECD berikutnya.

vii. OECD Short-term Economic Prospect (STEP) dan OECD Economic Policy Committee (EPC)

Working Group STEP adalah bagian dari Economic Policy Committee (EPC) yang bertugas menilai situasi dan prospek ekonomi global jangka pendek, serta bertukar perspektif antara delegasi anggota dan nonanggota OECD terkait perkembangan ekonomi terkini. Hasil diskusi STEP akan disampaikan pada pertemuan EPC.

Pertemuan EPC, dihadiri oleh perwakilan negara anggota dan mitra OECD, membahas isu ekonomi global dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan performa ekonomi jangka pendek dan panjang. Beberapa isu utama yang dibahas dalam STEP mencakup perkembangan global, inflasi, perlambatan perdagangan, serta prospek di berbagai wilayah. Sedangkan dalam EPC, topik seperti outlook ekonomi global, kebijakan fiskal, efek kebijakan industri baru, dan perdagangan internasional menjadi fokus utama.





Kerja sama & Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim



Pengembangan *Climate Finance Focal Points (CFFP) Website & Dashboard*

Untuk mencapai komitmen aksi iklim global melalui *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC), Indonesia perlu memaksimalkan pendanaan perubahan iklim dari lembaga multilateral seperti *Green Climate Fund* (GCF), *Global Environment Facility* (GEF), dan *Adaptation Fund* (AF), serta pendanaan bilateral dari donor. Pemerintah Indonesia telah menunjuk *National Designated Authority* (NDA) GCF di Kementerian Keuangan dan *focal point* GEF dan AF di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, telah dibentuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola pendanaan dari berbagai donor, dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mengelola *platform blended finance SDG Indonesia One*.

Sejak pertengahan 2020, Badan Kebijakan Fiskal telah menginisiasi pertemuan koordinasi antar lembaga pengelola dana perubahan iklim (CFFP) untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pendanaan. Pertemuan rutin CFFP diharapkan dapat menjadi *platform* koordinasi, pertukaran informasi, dan sinergi antar lembaga untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim pada sektor prioritas nasional. Pertemuan CFFP menghasilkan kesepakatan, termasuk pengembangan *website* bersama dan *dashboard* pendanaan perubahan iklim yang dikelola oleh masing-masing lembaga, siap untuk dipublikasikan dengan dukungan dari *Global Green Growth Institute* (GGGI).

Penugasan sebagai *National Designated Authority* pada *Green Climate Fund*

Indonesia telah menjalankan dua fase program *Readiness* dan telah memulai fase ketiga yang diimplementasikan bersama dengan *Global Green Growth Institute* (GGGI) sebagai mitra pelaksana program. Sepanjang tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan tugasnya sebagai *National Designated Authority* (NDA) pada *Green Climate Fund* (GCF) di Indonesia melalui beberapa capaian dan kegiatan, antara lain:

Penguatan *Project Pipeline* Nasional

Pada tahun 2023, NDA GCF Indonesia telah menerbitkan tiga surat tidak keberatan (*No Objection Letter/NOL*) sebagai prasyarat pengajuan program/proyek ke GCF. Sesuai dengan prinsip *country ownership* dari GCF, NOL diterbitkan untuk program/proyek yang akan diajukan ke GCF sebagai bukti bahwa program/proyek tersebut dinilai sudah sesuai dengan prioritas nasional negara tersebut.

Peningkatan Koordinasi dengan Entitas Terakreditasi, Kolaborasi dan Efisiensi antar Proyek

Sebagai inisiatif untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi antar proyek, rapat ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 untuk menyampaikan *project pipeline update* dari para Entitas Terakreditasi, *update progress* akreditasi dari calon *Direct Access Entities*, penyampaian rencana kegiatan NDA ke depan. Di antaranya beberapa pertemuan koordinasi, forum pertukaran pengetahuan, serta memperbarui lampiran dari *Country Programme Document* NDA GCF Indonesia sebagai panduan proyek dan program prioritas di Indonesia.

Dukungan terkait Proses Akreditasi dan Re-akreditasi untuk Entitas Terakreditasi Nasional

Terkait perkembangan *pipeline* proyek GCF di Indonesia, nota konsep PT SMI mengenai fasilitas pendanaan iklim untuk mendukung transisi energi telah mendapat masukan awal dari GCF. Dalam proses revisi dan pengembangan PPF, PT SMI mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea, di bawah proyek *Korea Green New Deal Fund* (KGNDP). Pada Oktober 2023, GCF melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dengan fokus pada proyek fasilitas pendanaan untuk energi terbarukan dalam mendukung transisi energi PT SMI.

Asistensi Strategi dan Kebijakan

Dari segi rekomendasi kebijakan, NDA aktif memberi asistensi melalui studi dan penerbitan dokumen relevan untuk para pemangku kepentingan GCF di Indonesia dalam hal inklusivitas *gender* dan sosial, proses akreditasi, identifikasi kebutuhan, dan lainnya. Berikut beberapa dokumen kebijakan dan teknis yang telah disusun oleh NDA:

- a. Kajian rekomendasi kebijakan dan strategi untuk sektor jasa keuangan nasional
- b. Kajian pemilihan sektor prioritas

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Nasional

APBN merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Guna mengukur dan mengoptimalkan dukungan APBN terhadap penanganan perubahan iklim, diterapkan Sistem Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging/CBT*) sejak tahun anggaran 2016. Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan CBT 2023, namun hasilnya baru akan dilaporkan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diterbitkan bulan Mei 2024. Analisis dan laporan yang disusun pada tahun 2023 adalah hasil CBT 2022. CBT merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan perubahan iklim dapat diidentifikasi dan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. Selain itu, penandaan anggaran perubahan iklim bertujuan untuk meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas pengelolaan APBN.

Berdasarkan CBT untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tercatat bahwa penurunan alokasi anggaran APBN pada Kementerian dan Lembaga (K/L) berdampak pada penurunan dana untuk perubahan iklim pada tahun 2022, yang mencapai Rp66,61 triliun. Sesuai dengan prioritas pengembangan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk adaptasi, dengan nilai mencapai Rp42,99 triliun. Alokasi ini terbagi pada sektor air (Rp20,97 triliun), pangan dan pertanian (Rp10,79 triliun), kebencanaan (Rp8,47 triliun), kelautan dan pesisir (Rp2,36 triliun), ekosistem lahan dan kehutanan (Rp368,17 miliar), serta kesehatan (Rp30,19 miliar).

Total realisasi belanja untuk sektor mitigasi perubahan iklim, termasuk belanja *co-benefit*, pada tahun 2022 mencapai Rp23,63 triliun. Belanja terbesar digunakan untuk sektor energi dan transportasi (Rp19,51 triliun), diikuti oleh sektor kehutanan dan lahan (Rp2,29 triliun), sektor limbah (Rp1,31 triliun), sektor pertanian (Rp476,58 miliar), dan Industri Proses dan Penggunaan Akhir (IPPU) (Rp24,26 miliar).

Total belanja negara untuk penanganan perubahan iklim, yang dapat dimanfaatkan sebagai *underlying assets* mencapai Rp44,77 triliun. Potensi ini tersebar di berbagai belanja modal kementerian, seperti Kementerian Perhubungan (Rp6,86 triliun) untuk sektor transportasi berkelanjutan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp1,39 triliun) untuk proyek pengelolaan limbah dan konversi limbah menjadi energi. Potensi adaptasi perubahan iklim terbesar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui belanja pada sektor air, pertanian, kebencanaan, kelautan, dan pesisir, dengan potensi *underlying* sebesar Rp27,06 triliun.

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Daerah

Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga telah melaksanakan kegiatan penandaan anggaran perubahan iklim (*Regional Climate Budget Tagging/RCBT*) dengan tujuan utama untuk (i) mengevaluasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim, baik kegiatan mitigasi maupun adaptasi, (ii) menganalisis aspek penganggaran dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim, dan (iii) menjadi rujukan dalam perencanaan kegiatan yang mendukung aksi penanganan perubahan iklim di daerah dengan dukungan APBD. Selain itu, hasil penandaan ini juga dapat digunakan pula sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim di forum internasional.

Sejak tahun 2020–2022, RCBT telah terlaksana melibatkan partisipasi aktif 20 Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, proses RCBT difokuskan pada dua lokasi uji coba yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil penandaan di dua daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen penanganan perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat telah membaik, yang dapat diamati melalui dua aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran.

Kegiatan penanganan perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2020–2023 didominasi oleh kegiatan adaptasi. Kegiatan ini mendominasi 88% upaya penanganan perubahan iklim Provinsi Sulawesi Selatan secara akumulatif. Sektor yang mendominasi dari kegiatan adaptasi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian dengan kontributor terbesar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Sementara sektor berbasis lahan mendominasi konteks mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, nilai adaptasi mencapai 82.7% dari seluruh upaya penanganan perubahan iklim. Sektor yang mendominasi dari kegiatan adaptasi di daerah tersebut adalah sektor air dari kontributor terbesar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Responsif Gender

Sebagai salah satu tema anggaran, pelaksanaan penandaan anggaran responsif *gender* memperkuat komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan *gender* di berbagai bidang pembangunan, termasuk komitmen untuk memenuhi Tujuan 5 dari SDGs, serta memantau dan mengevaluasi besaran anggaran tahunan untuk upaya mengurangi kesenjangan *gender*.

Badan Kebijakan Fiskal bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong dilakukannya penandaan ganda atau *co-benefit tagging* tematik perubahan iklim dan gender. Buku Pedoman Teknis ini mendukung K/L untuk dapat melakukan identifikasi cepat anggaran mitigasi dan/atau adaptasi yang responsif gender, menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk Rincian Output (RO) program/kegiatan perubahan iklim, serta melengkapi *Gender Budget Statement* (GBS) yang merupakan syarat pelaporan K/L melalui aplikasi KRISNA bagi anggaran responsif *gender*.

Selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal juga menyelenggarakan kegiatan *Climate Gender Fest 2.0* di Yogyakarta pada tanggal 14-15 Desember 2023 yang salah satunya mendiskusikan dampak *gender* terhadap transisi energi dalam mencapai tujuan bersama untuk energi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil di Indonesia.



Kerja Sama Pembiayaan Pelaksanaan Peran sebagai Kantor Gubernur di Lembaga Keuangan Internasional

Pada tahun 2023, Indonesia memperkuat kepemimpinan dalam kerja sama dengan Lembaga Keuangan Internasional (LKI) untuk mendukung ekonomi, pembangunan, dan peran dalam politik luar negeri. LKI diharapkan menyediakan pembiayaan terjangkau, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis, saran kebijakan, serta memobilisasi modal swasta untuk pertumbuhan ekonomi. Dukungan LKI harus sesuai dengan prioritas pembangunan Indonesia (RPJMN/RPJPN).

a. Pembiayaan dengan World Bank Group (WBG)

Kerja sama pembiayaan Indonesia dengan WBG dilakukan melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Development Association (IDA). International Finance Corporation (IFC) juga berkomitmen untuk investasi di sektor swasta, baik asing maupun lokal.

b. Pembiayaan dengan Asian Development Bank (ADB)

Kerja sama pembiayaan Indonesia dengan ADB meliputi pinjaman, hibah, dan bantuan teknis, terutama untuk sektor manajemen publik, pertanian, sumber daya alam, pembangunan pedesaan, dan keuangan. ADB juga sedang memperbarui Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) yang diterbitkan pada 2009. Pada 2023, Indonesia menerbitkan 23 surat tidak keberatan (NOL) terkait dukungan sektor swasta dan bantuan teknis ADB, dengan rincian sebagai berikut:

1. Enam NOL terkait dengan pendanaan sektor swasta
2. Tujuh Belas NOL terkait pemberian bantuan teknis yang bersifat lintas negara (regional).

c. Pembiayaan dengan Islamic Development Bank (IsDB)

Kerja sama pembiayaan antara Pemerintah Indonesia dengan IsDB diantaranya dilaksanakan melalui skema pinjaman (sovereign) dan hibah terencana yang saat ini mencakup 6 kegiatan (di luar pinjaman direct lending) dan terdiri dari 10 skema pinjaman dan 1 hibah. Adapun sektor pembiayaan on-going projects meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, transportasi, dan kesehatan.

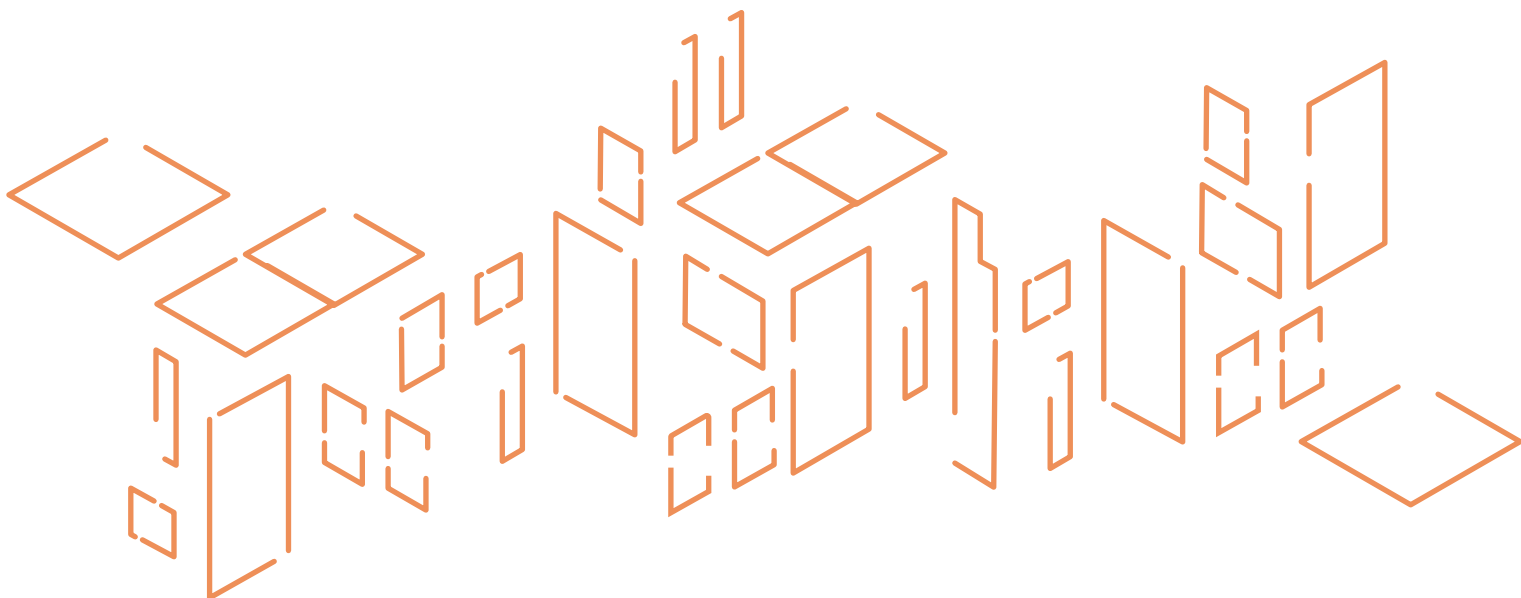
d. Pembiayaan dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia telah menerima berbagai dukungan pembiayaan AIIB. Selain itu, terdapat setidaknya 7 proyek Indonesia yang menunggu persetujuan Board of Directors (BOD) dan Presiden AIIB dan telah berada dalam daftar pipeline projects. Memperkuat komitmennya mengatasi perubahan iklim, AIIB telah meluncurkan Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plan/CAP) perdananya di sela-sela rangkaian The 8th Asian

Infrastructure Investment Bank Annual Meetings 2023. CAP merupakan sebuah tonggak sejarah dalam komitmen berkelanjutan AIIB untuk memerangi perubahan iklim, khususnya terkait transisi energi di Asia.

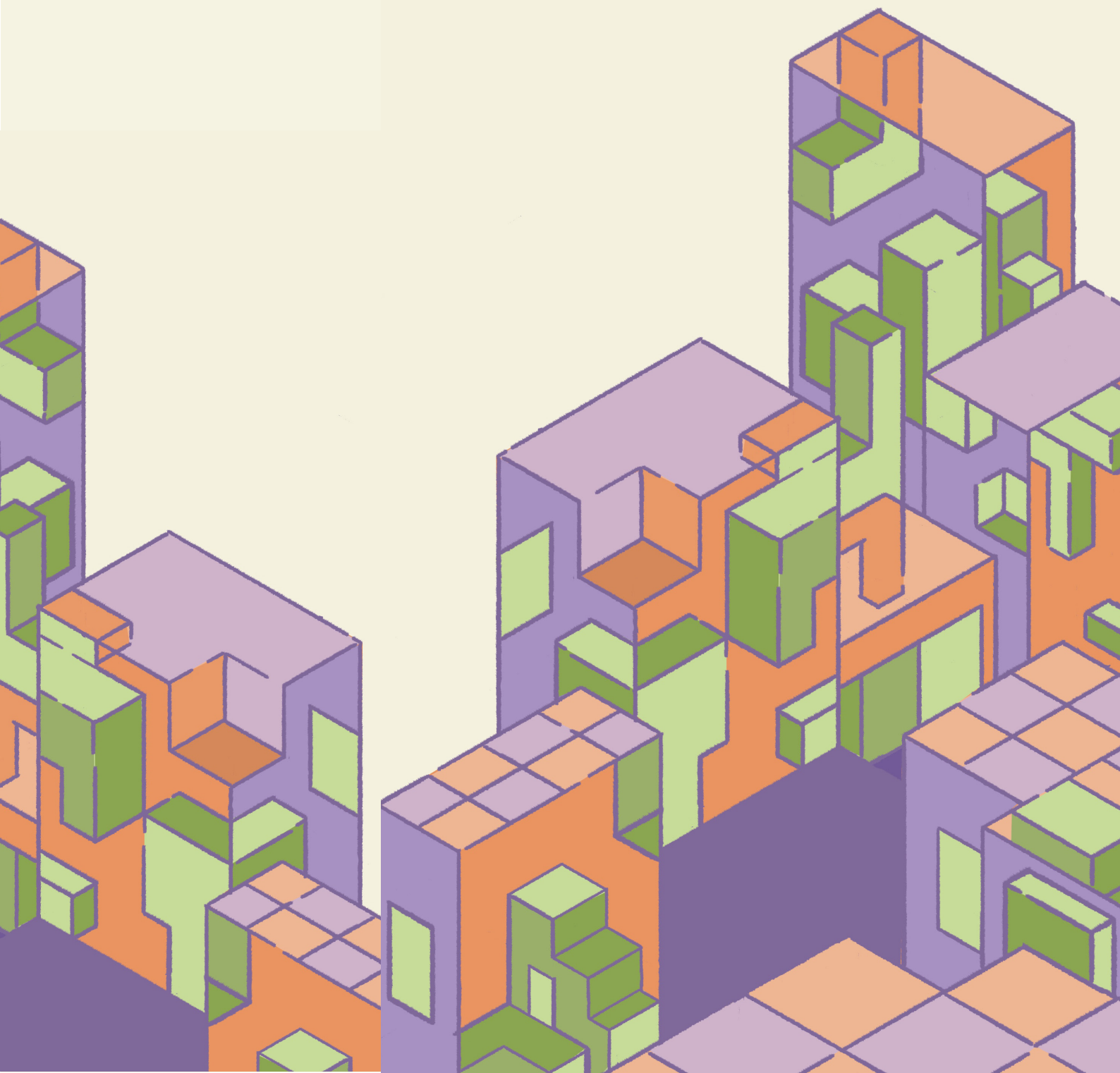
e. Pembiayaan dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD)

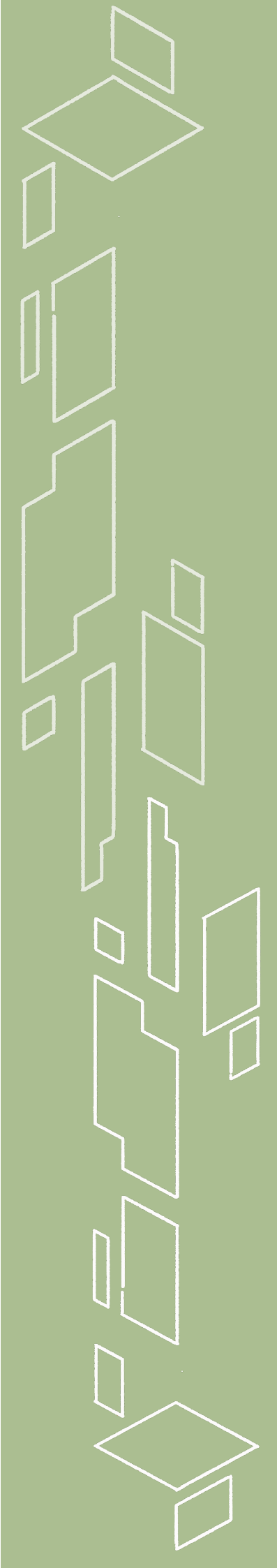
Kerja sama pembiayaan dengan IFAD dilaksanakan untuk proyek-proyek pertanian dengan menyediakan pendanaan dan dukungan teknis. Sampai akhir tahun 2023, terdapat empat proyek IFAD di Indonesia yang dibiayai melalui Replenishment 12 (IFAD 12) dan Replenishment 13 (IFAD 13), dimana IFAD 13 dititikberatkan pada tema Gender, Pemuda, Nutrisi, dan Perubahan Iklim dengan sasaran utama peningkatan ketahanan (resilience) atas kerentanan (fragility).



BAB 3

TRANSFORMASI ORGANISASI





Badan Kebijakan Fiskal terus bertransformasi untuk memperkuat perannya dalam penyusunan kebijakan fiskal Indonesia, antara lain: peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi digital, dan restrukturisasi organisasi. Semuanya ditempuh demi meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas terhadap dinamika ekonomi global dan nasional.

Transformasi Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2023 memasuki tahap implementasi jangka menengah melalui adopsi penuh ketentuan SDM, Probis, dan infrastruktur IT sebagai Sistem Kerja Baru bagian dari budaya organisasi; penyesuaian sistem manajemen konsekuensi bagi pegawai; dan institusionalisasi *knowledge* untuk memfasilitasi *policy learning & traceability* suatu kebijakan.

Implementasi tersebut didukung dengan infrastruktur IT berupa utilisasi sistem informasi internal Badan Kebijakan Fiskal secara penuh; serta implementasi *Activity-Based Workplace* di seluruh unit Badan Kebijakan Fiskal.

Penjabaran lebih lengkap mengenai konsep Target *Program Change Management* 2021–2024 Program Transformasi Organisasi Badan Kebijakan Fiskal dijelaskan dalam gambar berikut.

Jangka Pendek (2021–2022)	Jangka Menengah (s.d 2023)	Jangka Panjang (2024 dst.)
Define	Implement	Sustain & Improve
People 1. Kerangka Konseptual Pengelolaan SDM 2. Perka Manajemen Karir BKF 3. Perka Penilaian Angka Kredit 4. Penguatan Implementasi Pengelolaan Kinerja Pegawai 5. Integrasi PAK & SKP (Tim Penilai Kerja PNS) 6. Mapping Kompetensi Teknis	1. Adopsi penuh ketentuan SDM, Probis, dan Infrastruktur IT sebagai Sistem Kerja Baru sebagai budaya organisasi 2. Penyesuaian sistem manajemen konsekuensi bagi pegawai (otomasi penilaian angka kredit & kinerja pegawai) 3. Institusionalisasi <i>knowledge</i> untuk memfasilitasi <i>policy learning & traceability</i> dari suatu kebijakan	1. Fasilitasi Manajemen SDM dan <i>project management</i> oleh portal fiskal & Sipantau (<i>HR & Organisastional Analytics</i>) 2. Perampingan struktur organisasi lebih lanjut (fungsi <i>supporting & managerial</i>) 3. Peningkatan kualitas proses perumusan rekomendasi kebijakan
Business Process 1. Revisi Perka Mekanisme Kerja 2. Pedoman Penugasan Tim Lintas Pusat 3. Revisi Perka TND		
IT/ Infrastructure 1. Perka Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan di BKF Penggunaan Portal 2. Pembangunan Sistem Informasi untuk mendukung Transformasi (Portal Fiskal+Sipantau) 3. Kerangka Konseptual Implementasi ABW	1. Utilisasi Sistem Informasi Internal BKF secara penuh (Fasilitasi Manajemen Pengetahuan & Kolaborasi) 2. Implementasi <i>Activity Based Workplace</i> di seluruh unit BKF	
Culture 1. Sosialisasi & Asistensi 2. Program Komunikasi Internal 3. Pemanfaatan <i>change agent</i> pada masing- masing Unit Eselon II 4. Merangkul berbagai komunitas di BKF untuk mendorong perubahan 5. Komunikasi & Koordinasi dengan Eksternal BKF (Sekjen, CTO, LAN, LIPI)		
Monitoring and Evaluation 1. Survey Persepsi Pegawai atas Kesehatan Organisasi 2. Evaluasi Kinerja Interim Analis Kebijakan 3. Survey Persepsi JFAK terhadap kinerja individu (<i>self-assess</i>)	Evaluasi Implementasi Organisasi Baru	

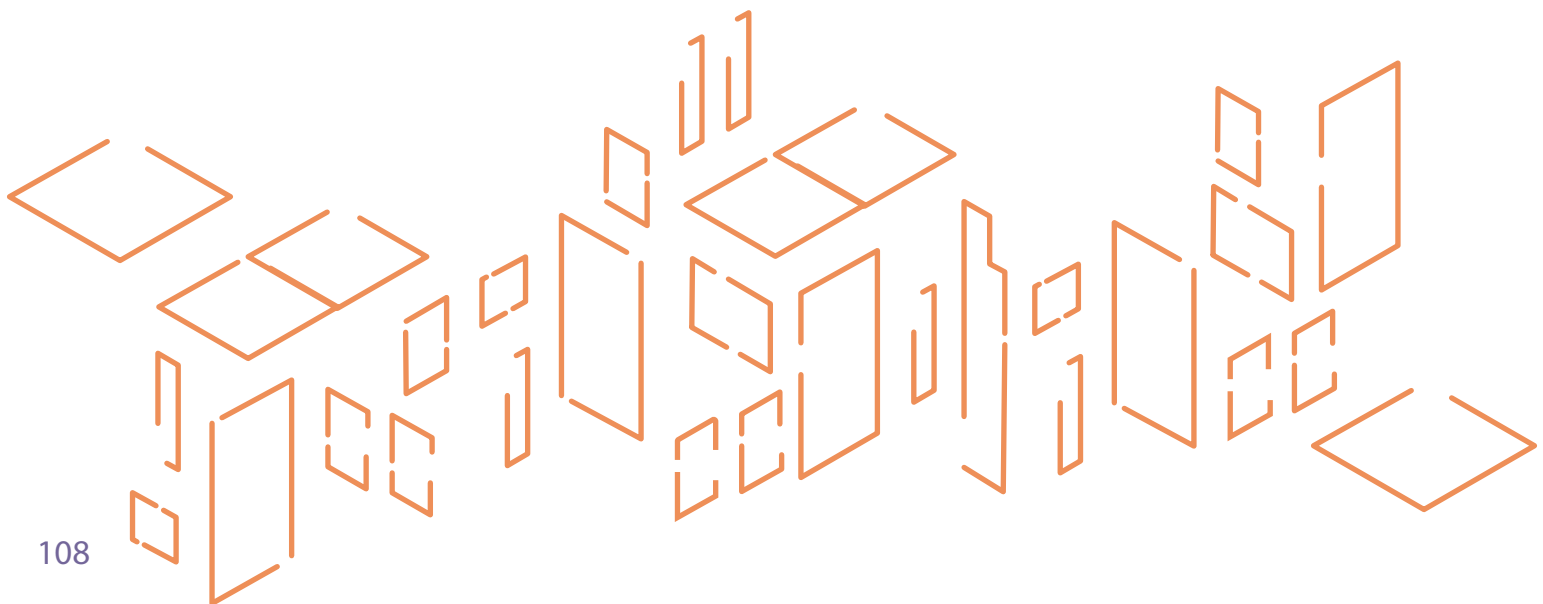
Badan Kebijakan Fiskal sebagai Agregator Nerve System Kementerian Keuangan

Isu strategis dan prioritas Badan Kebijakan Fiskal dalam bidang keorganisasian selama tahun 2023 adalah konsep *Nerve System* Kementerian Keuangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah arahan dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, serta *Central Transformation Office* (CTO) dan Biro Organta. *Nerve system* ini perlu disusun untuk menjalankan seluruh fungsi kebijakan Kementerian Keuangan yang mampu menjawab tantangan saat ini maupun masa depan.

Sesuai arahan Menteri Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dibentuk untuk menjadi *central nerve* yang mampu menghasilkan Kebijakan Fiskal yang teratur, kredibel, berkualitas, serta menjawab tantangan zaman. Oleh sebab itu, sumber daya manusia di Badan Kebijakan Fiskal harus (1) mampu berfikir 10–20 tahun ke depan tentang cara mencapai Indonesia Maju dan tantangan apa saja yang akan muncul serta cara mengatasinya; (2) mampu menjadikan alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagai bagian dari DNA-nya, serta mampu menganalisis bagian dari APBN yang paling *powerful* untuk memperbaiki alokasi, distribusi, dan stabilisasi tersebut, hingga ke tataran praktis; (3) mampu menuangkan kebijakan menjadi langkah-langkah praktis. Oleh karenanya perlu melihat pelaksanaan kebijakan di Unit-unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, agar memiliki *grasp* terhadap perekonomian; serta (4) seluruhnya perlu memahami Makro Ekonomi.

Dalam menerjemahkan arahan Menteri tersebut, serangkaian proses telah dilalui selama tahun 2023 untuk mencari formula dan konsep *Nerve System* yang ideal, baik dari sisi proses bisnis maupun kebutuhan sumber dayanya.

Pada akhirnya, disepakati *Framework Nerve System* sebagaimana ditunjukkan dalam bab ini, yaitu *Nerve System* yang didefinisikan sebagai serangkaian sistem yang saling terkoneksi dan terorkestrasi sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif dan kredibel (berkonsep kuat, implementatif, berdampak efektif dan memiliki tata kelola akuntabel) sehingga mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.



Kebijakan Fiskal – Sektor Keuangan yang Responsif, Antisipatif dan Solutif

Fokus



- Jangka Pendek: Respon cepat atas isu strategis
- Kebijakan jangka menengah, rekomendasi solusi masalah fundamental total fungsi produksi (*labor, capital* dan teknologi)

Area



- APBN sebagai *agent of development* untuk mendukung agenda pembangunan yang efektif (alokasi)
- APBN sebagai instrumen *shock absorber* yang efektif (stabilisasi)
- APBN sebagai instrumen kesejahteraan (distribusi)
- Menjaga agar APBN sehat (*fiscal sustainability*)
- Pengembangan dan penguatan sektor keuangan

Kelembagaan



- Agregator: BKF
- Formulator: sesuai area (DJPPR, DJA, DJPK, DJKN, DJPB, DJBC, DJP)
- SME: Sahli, Stafsus, dan TA

Enabler



- SDM yang kompeten, memiliki pemahaman *best practice* dan model yang baik
- Dengan komposisi anggota tim yang variatif: *aggregate*, detail dan komunikasi publik yang baik
- Data dan info yang *reliable* (update dan valid)

Fokus jangka pendek *Nerve System* adalah respon cepat atas isu strategis. Sementara di jangka menengah, *Nerve System* dapat menghasilkan rekomendasi solusi masalah fundamental total fungsi produksi (*labor, capital* dan teknologi).

Adapun *coverage area* dari *framework* tersebut dijabarkan dalam lima poin, yakni:

- APBN sebagai *agent of development* untuk mendukung agenda pembangunan yang efektif (alokasi)
- APBN sebagai instrumen *shock absorber* yang efektif (stabilisasi),
- APBN sebagai instrumen kesejahteraan (distribusi),
- Menjaga kesehatan APBN (*fiscal sustainability*)
- Pengembangan dan penguatan sektor keuangan

Sementara itu, *enabler* dalam *framework* tersebut adalah sumber daya manusia yang kompeten, dengan komposisi anggota tim yang variatif, serta didukung data dan info yang *reliable* (update dan valid).

Untuk menjalankan *framework* tersebut, Badan Kebijakan Fiskal berperan sebagai *agregator*. Sementara bertindak sebagai *formulator* adalah Unit-Unit Eselon I lain sesuai areanya (DJPPR, DJA, DJPK, DJKN, DJPB, DJBC, DJP). Adapun peran para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan ditunjukkan sebagai *Subject Matter Expert* (SME).

AREA INTERVENSI

Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

APBN SEBAGAI AGENT
OF DEVELOPMENT

APBN SEBAGAI SHOCK
ABSORBER

APBN SEBAGAI
INSTRUMEN
KESEJAHTERAAN

MENJAGA APBN SEHAT/
FISCAL SUSTAINABILITY

PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN

Spirit dalam memformulasikan kebijakan yang

- Feasible terhadap dimensi, ekonomi, fiskal, sosial dan *environmental*
- Berperan sebagai aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan jangka pendek, menengah maupun panjang
- Connecting the dots antara makro ekonomi, makro fiskal dan mikro fiskal atau sektoral termasuk sektor keuangan dengan kebijakan kerja sama global/internasional

FORMULASI KEBIJAKAN

KEBIJAKAN FISKAL dan SEKTOR KEUANGAN
yang RESPONSIF, ANTISIPATIF dan SOLUTIF

Menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan
stabilisasi

KELEMBAGAAN (SUPER TIM SOLID)

- “BERBAGI PERAN YANG KOLABORATIF”
 - BKF sebagai aggregator
 - SAHLI/STAFSUS/TA sebagai SME
 - U.E1 sebagai *formulator*
- Anggota tim dengan kompetensi variatif
 - *Aggregate*, Detail & Komunikasi Publik yang efektif
 - Penguasaan konsepsi, *best practice* & *modelling*
- Data dan Informasi yang *reliable*
 - Otomatisasi *Updating*
 - Validasi Data
 - Model yang kredibel

Milestones dari konsep *Nerve System* direncanakan akan terdiri dari penguatan keorganisasian/tata kelola, penguatan sumber daya manusia, dan penguatan data/informasi sebagai *backbone* untuk proses kajian/analisis.

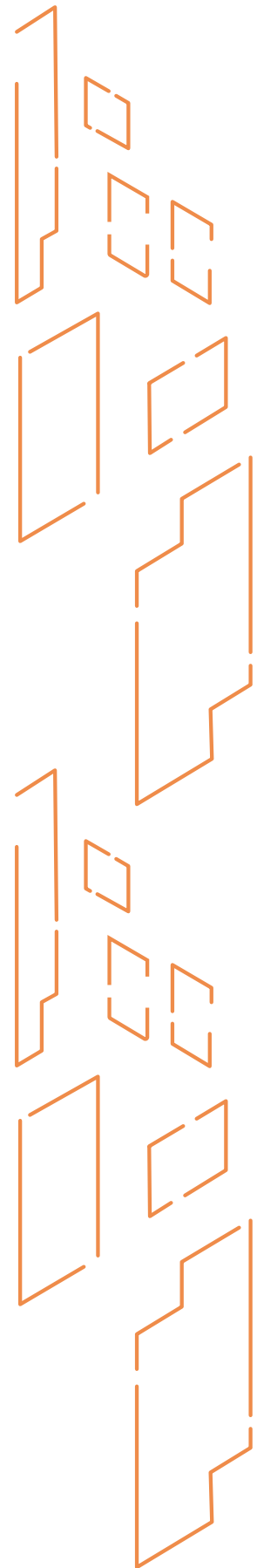
Pengelolaan Kepegawaian sebagai Pendukung Transformasi Organisasi

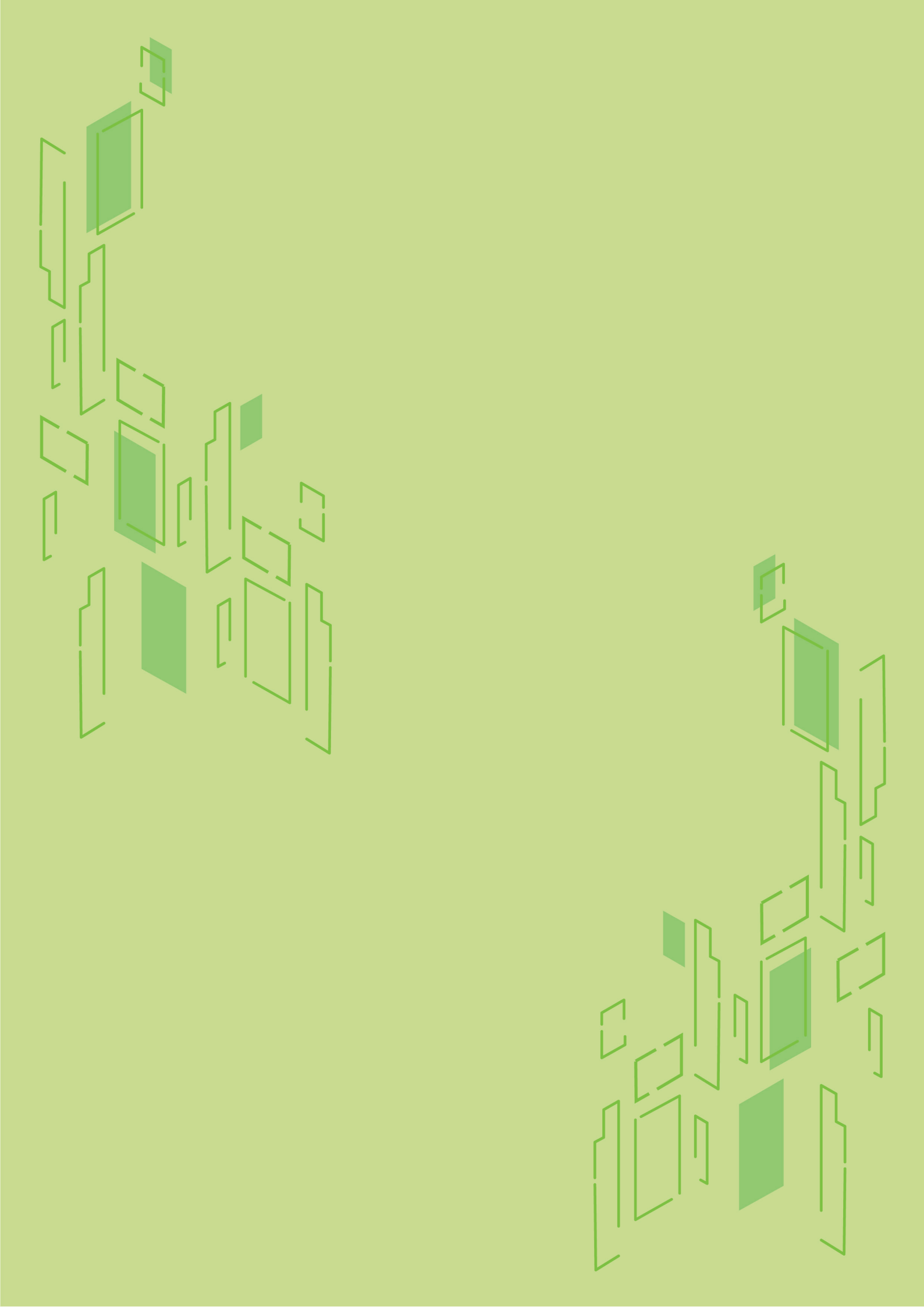
Guna mewujudkan transformasi organisasi yang komprehensif, pengelolaan kepegawaian menjadi salah satu pilar utama yang tak terpisahkan. Selama tahun 2023, kegiatan pengelolaan kepegawaian untuk transformasi organisasi terdiri atas beberapa kegiatan:

- a. Pelaksanaan *assessment* kompetensi teknis.
- b. Pelaksanaan mutasi dan rotasi rutin untuk jabatan fungsional analisis kebijakan.
- c. Advokasi implementasi perubahan kebijakan PERMENPANRB 1/2023 kepada Pembina Kepegawaian Instansi dan Nasional.
- d. Penguatan koordinasi dengan pengelola kinerja unit eselon II melalui Forum Kepegawaian mengenai transisi PERMENPANRB 1/2023 pada Triwulan I 2023.
- e. Penyelesaian penetapan angka kredit integrasi oleh Tim Penilai Instansi dan dukungan penyelesaian penetapan angka kredit integrasi oleh Tim Penilai Pusat.

Pengelolaan Isu Strategis Organisasi

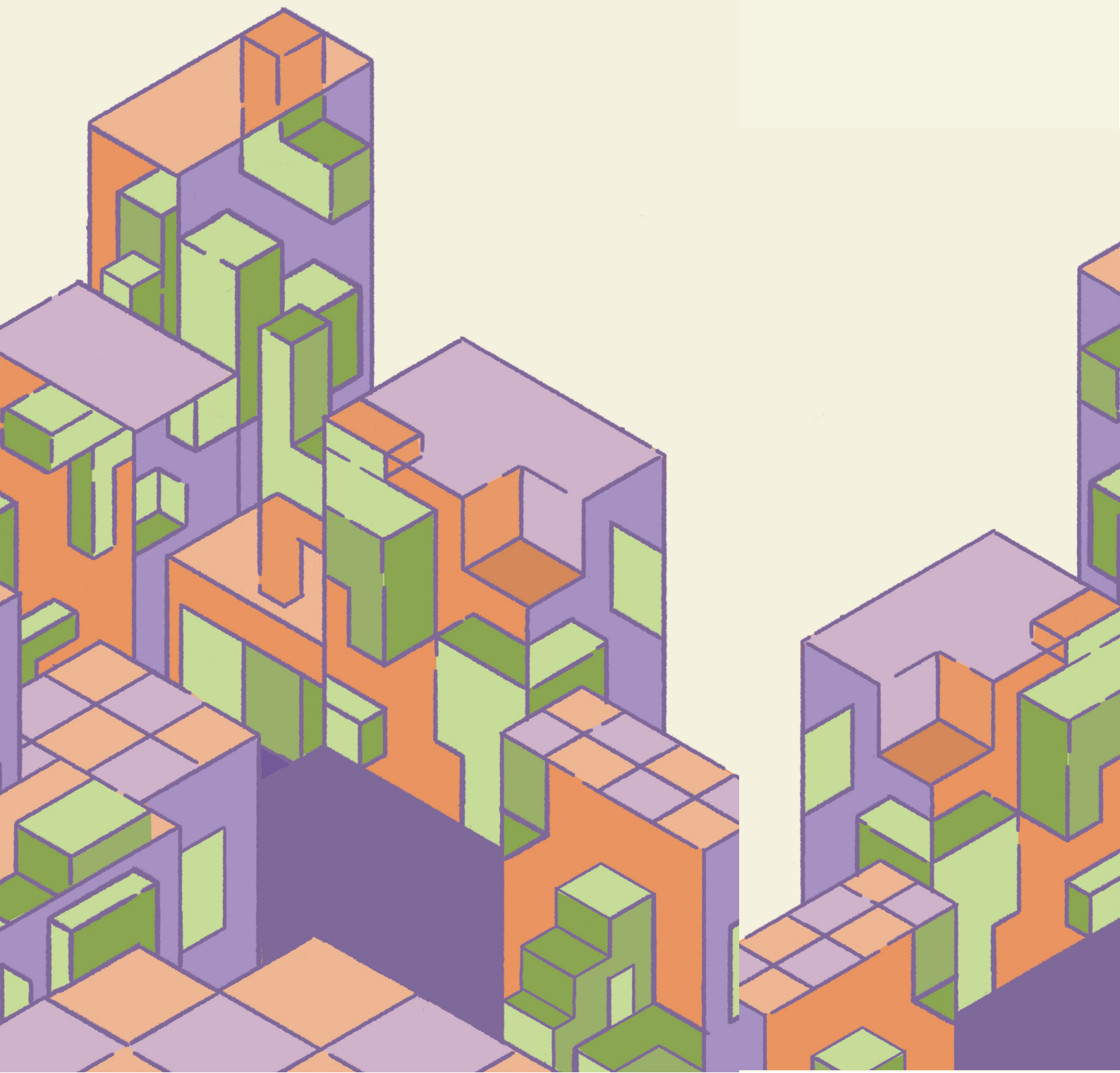
Tahun 2023 menandai beberapa percepatan penyelesaian isu strategis di bidang keorganisasian diantaranya: percepatan digitalisasi Proses Bisnis Operasional (SOP) dengan melakukan migrasi SOP ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Orbus iServer). Selain itu juga dilakukan penyusunan peta jabatan, simplifikasi proses bisnis, dan penyusunan standar pelayanan

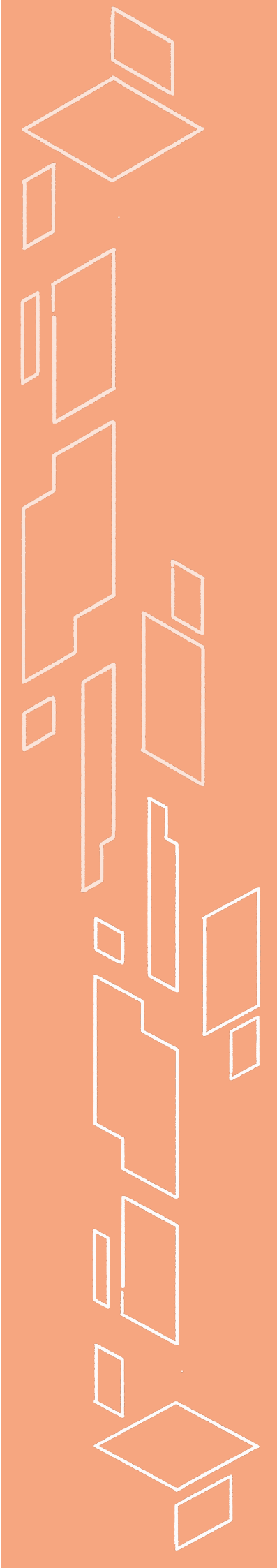




BAB 4

DUKUNGAN KEUANGAN





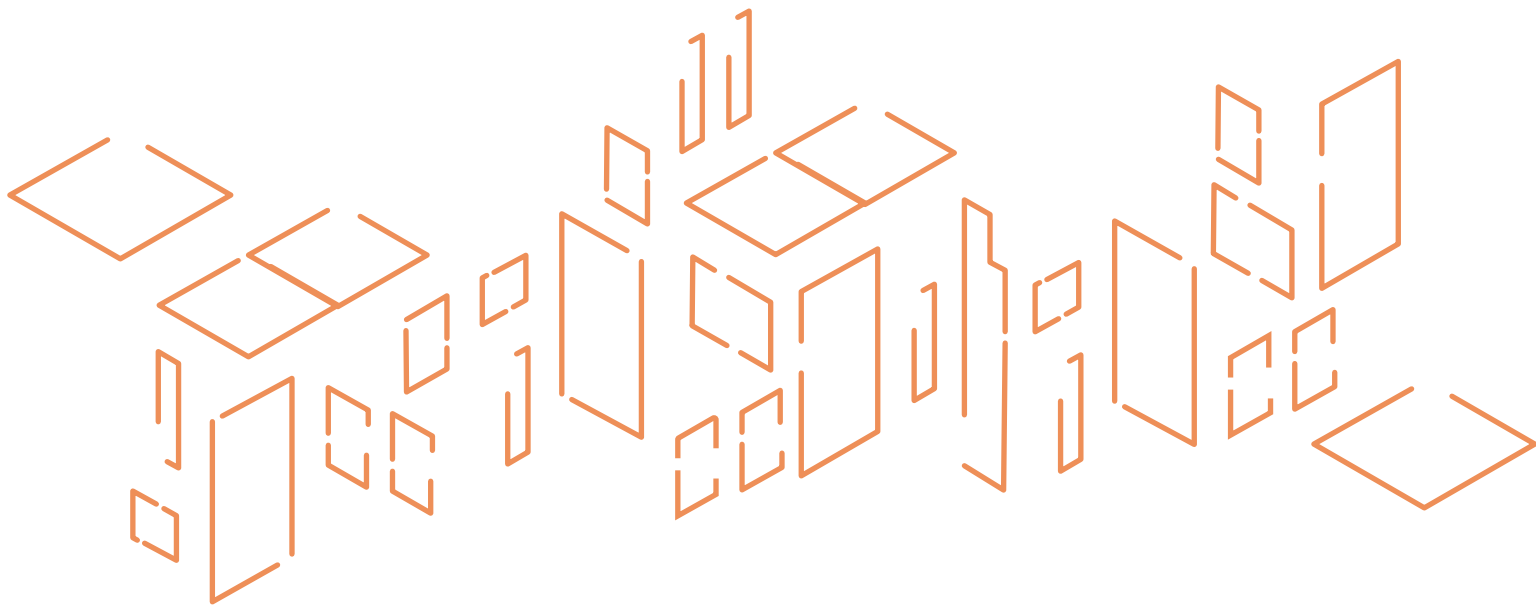
Bab ini merupakan gambaran Dukungan Keuangan yang diperoleh Badan Kebijakan Fiskal untuk menjalankan berbagai program prioritas, melakukan riset dan analisis ekonomi yang mendalam, dukungan manajemen, serta penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu lembaga pemerintah untuk dapat terus menelurkan kebijakan-kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Pada tahun anggaran 2023, realisasi pendapatan negara di Badan Kebijakan Fiskal berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP Lainnya) sebesar Rp5.034.720.960 yang sebagian besarnya bersumber dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp168.415.271.745 atau mencapai 87,32% dari alokasi anggaran sebesar Rp192.868.405.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Badan Kebijakan Fiskal
Per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	-	5,034,720,960	-
Belanja Negara	192,868,405,000	168,415,271,745	87.32%



Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kebijakan Fiskal per Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Program Kebijakan Fiskal			
Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	10,209,178,000	9,938,497,750	97.35%
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	5,928,728,000	5,685,636,278	95.90%
Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	15,489,428,000	15,192,810,717	98.09%
Komunikasi dan Edukasi	111,494,960,000	91.756.821.43	82.30%
Jumlah Belanja Program CE	143,122,294,000	122,574,701,183	85.64%
Program Dukungan Manajemen			
Legislasi dan Litigasi	50,970,000	47,034,500	92.28%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	38,346,977,000	36,695,406,942	95.69%
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1,944,108,000	1,700,660,456	87.48%
Pengelolaan Organisasi dan SDM	9,322,161,000	7,345,946,202	78.80%
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	41,935,000	41,239,000	98.34%
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	39,960,000	33,899,000	84.83%
Jumlah Belanja Program WA	49,746,111,000	45,864,186,100	92.20%
Jumlah	192,868,405,000	168,415,271,745	87.32%

Hibah di Badan Kebijakan Fiskal

Hibah Agence Francaise de Development (AFD)

Badan Kebijakan Fiskal bersama AFD melakukan proyek dalam rangka mendukung reformasi kebijakan fiskal Indonesia. Proyek AFD bertujuan meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dan meningkatkan pertukaran informasi dengan otoritas pajak di Prancis. Beberapa fokus pada proyek ini antara lain adalah:

- a. Mendukung pemerintah RI melakukan perpajakan terhadap ekonomi digital,
- b. Mendukung pemerintah RI mencegah dampak perubahan iklim,
- c. Mendukung pemerintah RI menghitung efek pengeluaran perpajakan terhadap perekonomian nasional,
- d. Mendukung pemerintah RI mengembangkan pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai,
- e. Mendukung pemerintah RI menganalisis *shadow economy* dan *gap* perpajakan,
- f. Memperkuat analisis Badan Kebijakan Fiskal seputar isu perpajakan internasional.

Hibah PROSPERA

Hibah Prospera merupakan hibah dari Pemerintah Australia untuk membantu usaha Pemerintah RI dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan perpajakan. GPF Treasury dan AIPEG menyediakan konsultan untuk memberikan rekomendasi demi memperkuat kebijakan penerimaan dan kapabilitas Badan Kebijakan Fiskal dalam memberikan rekomendasi kebijakan. Konsultan Treasury memberikan *input* pada beberapa bidang perpajakan, seperti analisis perubahan UU PPN, perpajakan internasional, dan dukungan reformasi pajak jangka menengah.

Hibah UNICEF

Badan Kebijakan Fiskal bersama UNICEF berkolaborasi dalam proyek bertajuk *UNICEF Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025* dalam mendukung kebijakan prioritas Indonesia yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Proyek ini akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab dan di bawah koordinasi Bappenas.

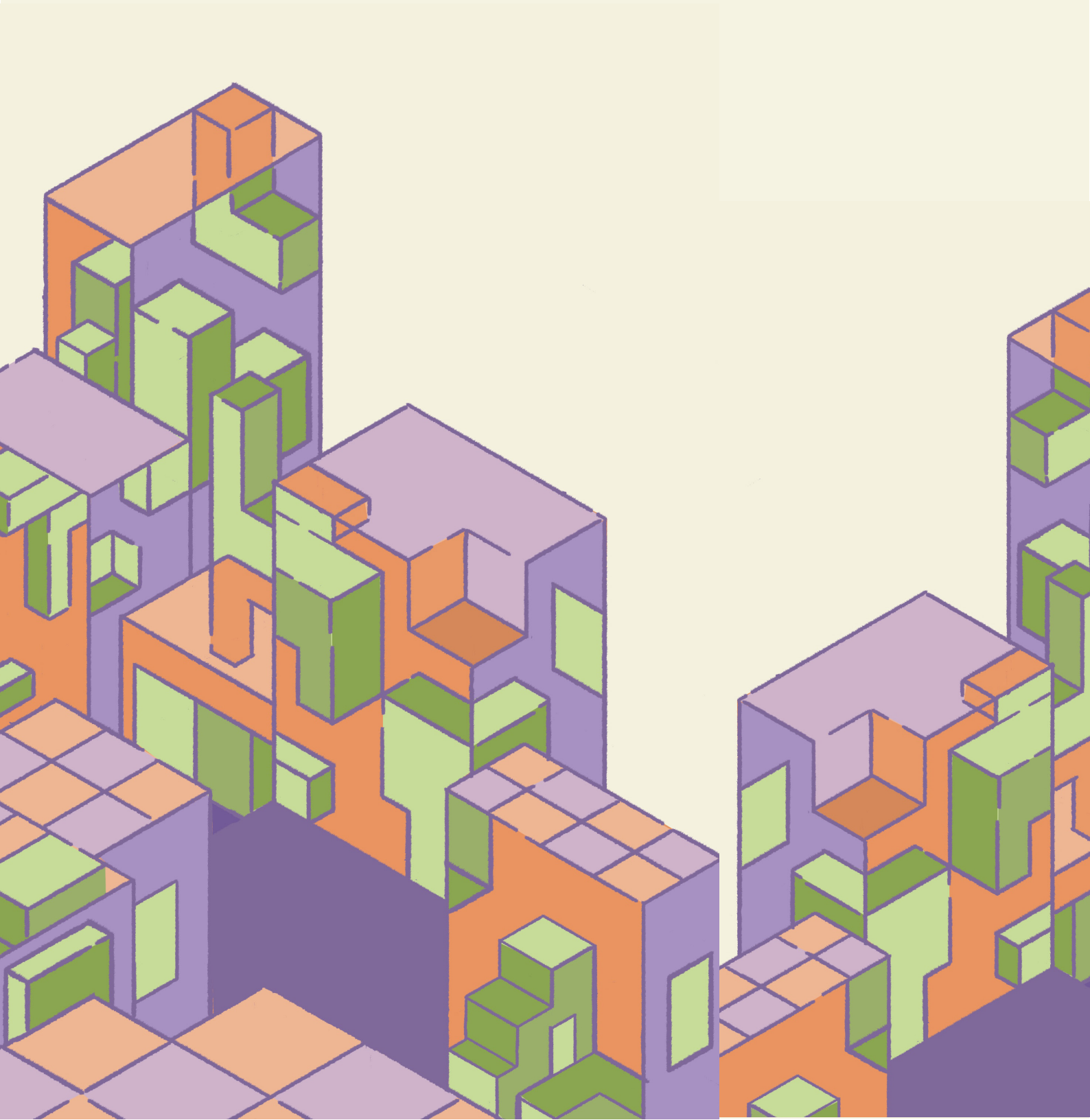
Hibah Domestic Resources Mobilization for Sustainable Development (DRM)

Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dari Jerman pada hibah DRM. Hibah ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas Badan Kebijakan Fiskal dalam perumusan kebijakan fiskal dan analisis dampak kebijakan pemerintah serta mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan subsidi.



BAB 5

KEGIATAN STRATEGIS



JANUARI

Nyibir Fiskal: Optimis Tumbuh di Tengah Gejolak Ekonomi Global

27 Januari 2023



Nyibir Fiskal adalah sebuah format *talkshow* yang diselenggarakan melalui siaran langsung di kanal Instagram @BKFkemenkeu. Menghadirkan narasumber internal Putri Rizki Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Ekonom Fithra Faisal pada 27 Januari 2023, Nyibir Fiskal yang bertajuk Optimis Tumbuh di Tengah Gejolak Ekonomi Global dimoderatori oleh Sri Rejeki Prasasti dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. *Talkshow* ini membahas bagaimana menghadapi gejolak ekonomi serta upaya pemerintah mengantisipasi berbagai tekanan global dan ketidakpastian di tahun 2023.

FEBRUARI

Pertemuan ASEAN+3 Task Force (TF)

Bali, 2-3 Februari 2023



Setelah Presidensi G20 Indonesia berakhir pada tahun 2022 lalu, kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat. Tahun 2023 Indonesia dipercaya memegang Keketuaan pada ASEAN (ASEAN Chairmanship) dan ASEAN+3 (ASEAN serta Tiongkok, Jepang, Korea Selatan) *Co-Chairmanship* bersama Jepang. Mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia masih melanjutkan tema besar Presidensi G20 Indonesia 2022 “Recover Together, Recover Stronger”. Dengan keketuaan ini, Indonesia diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk berperan aktif menawarkan ide dan solusi untuk

memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan. Rangkaian Keketuaan ASEAN di jalur keuangan resmi dimulai dengan diselenggarakannya Pertemuan ASEAN+3 Task Force (TF) yang telah dilaksanakan 2-3 Februari 2023 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini dilakukan secara luring dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi COVID-19 yang cukup baik dan terkendali.

.....

Seminar Aligning Energy Transition with Economic Development

Bali, 9 Februari 2023



Negara-negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan menjadi 23% pada tahun 2025 dan menuju masa depan rendah karbon. Untuk mencapainya, ASEAN menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan investasi untuk transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Seminar yang diadakan membahas mekanisme transisi energi (ETM), dengan pemaparan dari Chitra Priambodo (ADB) mengenai kemitraan dan investasi energi bersih, serta Joko Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal yang membahas ETM di Indonesia. Sesi selanjutnya membahas “*Transition Finance Taxonomy and Standard*” dengan Ephyro Amatong menyoroti kebutuhan transisi yang adil dan Lim Bey An menjelaskan taksonomi ASEAN. Sesi terakhir fokus pada “*Carbon Pricing and Market*,” bersama Joko Tri Haryanto membahas kesenjangan pembiayaan di Indonesia dan Tiza Mafira mempresentasikan perkembangan pasar karbon.

.....

Call for Paper (CoP) Insentif Perpajakan: Inovasi Kebijakan dan Evaluasi Insentif Perpajakan Indonesia

15 Februari–26 Juni 2023

Kegiatan CoP Insentif Perpajakan 2023 “Inovasi Kebijakan dan Evaluasi Insentif Perpajakan Indonesia” sebagai bagian dari program kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal dan German Agency for International Cooperation (GIZ). Rangkaian kegiatan CoP telah dimulai sejak 15 Februari 2023 hingga 26 Juni 2023. Sejumlah 157 artikel diajukan dengan berbagai telaah teoretis dan praktik empiris kebijakan insentif perpajakan di Indonesia selama ini, serta gagasan penyempurnaan



kerangka insentif perpajakan Indonesia di masa mendatang. Seluruh artikel yang masuk kemudian dinilai dari aspek orisinalitas, relevansi tema, kreativitas gagasan, serta implikasi kebijakan. Hasil saringan dewan juri kemudian dipresentasikan pada puncak acara yang bersamaan dengan kegiatan Seminar Insentif Perpajakan pada 26 Juni 2023.

MARET

The 16th WorkGroup ASEAN Forum on Taxation Meeting (AFT) & The 13th ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET)

Bali, 7-9 Maret 2023



Pertemuan Kelompok Kerja AFT ke-16 dibuka oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, dan dipimpin oleh Pande Putu Oka Kusumawardani dari Badan Kebijakan Fiskal sebagai Ketua ASEAN Forum on Taxation 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi ASEAN, Sekretariat ASEAN, serta perwakilan dari OECD dan ADB. Agenda prioritas termasuk mendukung penyelesaian dan peningkatan perjanjian pajak bilateral, meningkatkan efektivitas pertukaran informasi, serta membangun kesadaran tentang isu perpajakan internasional. Prioritas lainnya meliputi penyelesaian database cukai ASEAN, penyempurnaan data cukai produk alkohol, dan peningkatan kapasitas untuk menghadapi isu cukai internasional seperti kesehatan, ekonomi digital, otomotif, rokok elektrik, dan pelunasan cukai.

Rangkaian Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Keuangan-Gubernur Bank Sentral ASEAN 2023

Bali, 28-31 Maret 2023



Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 dimulai dengan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Bali pada 28-31 Maret 2023. Indonesia bertujuan mempromosikan integrasi ekonomi kawasan ASEAN menuju *ASEAN Economic Community (AEC) 2025* yang inklusif dan sejahtera. Deputy Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan melanjutkan komitmen dari Presidensi G20. Pertemuan ini juga mencakup lebih dari 24 sesi, termasuk seminar utama “*Enhancing Policy Calibration for Macro-Financial Resilience*” dan tiga seminar tingkat tinggi lainnya tentang sistem pembayaran digital, inklusi keuangan, dan transisi iklim. Kementerian Keuangan juga mengadakan sembilan acara sampingan, seperti seminar dan workshop tentang inklusi keuangan digital dan pembiayaan transisi di ASEAN.

.....

MEI

The 56th Asian Development Bank Annual Meetings 2023

Jeddah, 14 Mei 2023



Rangkaian pertemuan The 56th Asian Development Bank (ADB) Annual Meetings 2023 pada tanggal

2-5 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan dan dihadiri oleh para *Governors* dan *Alternate Governors* ADB yang berasal dari 68 negara anggota. Pertemuan ini mengambil tema *Rebounding Asia: Recover, Reconnect, and Reform* yang secara umum membahas tantangan ketidakpastian ekonomi global dan peran multilateralisme, evolusi bank pembangunan multilateral (MDBs) dan reformasi ADB, serta evaluasi strategi ADB 2030 untuk dapat menyesuaikan dengan tantangan terkini yang dihadapi oleh negara anggota. Salah satu pandangan Menteri Keuangan yang dapat digarisbawahi dalam rangkaian pertemuan tersebut diantaranya apresiasi kepada ADB dan ADB Institute dalam mendukung berbagai capaian Presidensi G20 Indonesia sehingga menegaskan pentingnya kebijakan yang berlandaskan pada riset baik pada level global, regional, maupun nasional. Menteri Keuangan juga mendorong agar G20 dan G7 dapat bekerja sama dengan lebih banyak negara selatan untuk mendapatkan sudut pandang lebih komprehensif dalam menentukan kebijakan global.

Sidang Tahunan Islamic Development Bank 2023

Jeddah, 14 Mei 2023



Sebagai pendiri Islamic Development Bank (IsDB) sejak 1974 dan negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memperkuat perannya dalam kemaslahatan umat dan komunitas global. Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan saham di IsDB dari posisi ke-12 menjadi ke-3, yang disetujui pada Sidang Tahunan IsDB di Jeddah pada Mei 2023. Dengan peningkatan saham ini, Indonesia kini menjadi pemegang saham terbesar ketiga setelah Arab Saudi dan Libya, mengalahkan negara-negara seperti Iran dan Nigeria. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan arah pembangunan global dan meningkatkan keterlibatan dalam operasional IsDB, serta berkontribusi pada kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota, terutama yang berpendapatan rendah dan komunitas Muslim.

Diseminasi Analisis Anggaran untuk Anak (*Children Budget Analysis*)

Jakarta, 25 Mei 2023



Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Fiskal, UNICEF Indonesia, dan LPEM UI melanjutkan kerja sama mereka dengan mengadakan kajian “Analisis Anggaran untuk Anak”. Kajian ini memperluas cakupan dari studi sebelumnya pada tahun 2020, dengan fokus pada belanja anggaran anak di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, melibatkan tujuh Kementerian/Lembaga serta lima pemerintah daerah tingkat provinsi. Hasil kajian dipresentasikan pada acara diseminasi yang diadakan pada 25 Mei 2023 di Aula Badan Kebijakan Fiskal. Acara ini dihadiri oleh 157 peserta dari berbagai instansi pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pemaparan hasil kajian oleh tim LPEM UI dan Mokoro, diikuti oleh diskusi panel yang dimoderatori oleh Ali Moechtar dari UNICEF Indonesia, membahas pentingnya penganggaran untuk anak.

Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD)

Jakarta, 29 Mei 2023



Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) adalah acara rutin sejak 2007 yang dilaksanakan oleh ANU Indonesia Project dan Kementerian Keuangan Indonesia. Pada tahun 2023, HLPD dimulai dengan dua sesi “Pre-heating” daring pada Februari dan Maret, dan sesi plenary

diadakan pada 29 Mei 2023 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Duta Besar Australia untuk Indonesia, dan Menteri Keuangan Indonesia, serta dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dan akademisi dari kedua negara. HLPD 2023 membahas dua topik utama: Koordinasi Kebijakan dan Transformasi Ekonomi, dengan sesi dipimpin oleh para ahli dari ANU dan Universitas Indonesia. *Output* utama adalah komunikasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 31 Mei 2023.

JUNI

Pengesahan KEM-PPKF antara Kementerian Keuangan dan DPR

Jakarta, 7 Juni 2023



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan lainnya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF Tahun 2024. Pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan acuan dalam

Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di tahun 2024. Dilihat dari perdagangan dunia, juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% di tahun 2024. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan sedikit lebih baik pada tahun 2024. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang daya saing produk ekspor Indonesia.

Sosialisasi Kebijakan Rumah Umum Bebas PPN untuk Mendukung Ketersediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Jakarta, 21 Juni 2023

Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan sosialisasi mengenai kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah umum guna mendukung ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sosialisasi ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dan melibatkan narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah, melalui PMK 60/PMK.010/2023, menerapkan pembebasan PPN sebesar 11% untuk rumah tapak dan rumah susun untuk mendukung



target RPJMN 2020-2024, yakni peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Selain itu, fasilitas fiskal lainnya seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) juga disinergikan dengan Tapera. PMK ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan rumah serta memastikan keberlanjutan program, dengan target penyediaan 230.000 unit rumah untuk MBR.

Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) Presidensi G20 India Jakarta, 22 Juni 2023



Presidensi G20 India menggelar pertemuan ke-3 *Joint Finance and Health Task Force* (JFHTF) secara *hybrid* di Jakarta. Berperan sebagai *Co-Chair* dari Kementerian Keuangan Indonesia, Made Arya Wijaya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara. Hadir memberikan Pidato Pembuka antara lain: Menteri Keuangan India Manicka Raj, Menteri Keuangan Italia Riccardo

Barbieri Hermitte, serta Executive Head JFHTF Bruce Aylward. Acara ini terdiri dari tiga sesi: (I) Penyusunan Koordinasi Keuangan-Kesehatan; (II) Pemahaman lebih baik dan mitigasi risiko ekonomi serta kerentanan dari pandemi; (III) Kesiapan perbaikan untuk intervensi respon pandemi berskala besar. Di akhir acara, tak lupa diselenggarakan sesi Outlook: Langkah Ke Depan JFHTF dan pidato penutup dari para perwakilan Kementerian Kesehatan India, Italia, dan Indonesia. Survei JFHTF menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya kolaborasi yang tepat waktu, terkoordinasi dengan baik, dan kaya informasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan merupakan bagian integral dari mitigasi krisis kesehatan yang sangat efektif.

JULI

Family Day BKF

Jakarta, 7 Juli 2023



Family Day BKF adalah solusi baru yang ditawarkan Duta Transformasi Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal dalam proyek perubahan Program Penguatan Nilai Integritas dan Budaya Anti Suap di Badan Kebijakan Fiskal. Salah satu fokus utama dari program ini adalah membangun integritas sejak dini yang dituangkan dalam kegiatan *Family Day* BKF. Kegiatan yang diselenggarakan pada Jumat, 7 Juli 2023 ini diikuti oleh pegawai beserta pasangan dan anak usia s.d. 15 tahun, bertujuan untuk mengenalkan Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan yang meliputi (i) Jalan pagi seputar Komplek Kementerian Keuangan, (ii) Pengenalan Tugas & Fungsi BKF serta Nilai Integritas & Budaya Anti Suap, (iii) Kunjungan ke tempat kerja, dan (iv) *Fun Activity* (*Workshop* melukis, *Fun Games*, Mewarnai, Pojok Baca). “Membangun Integritas Sejak Dini” menjadi pilot project untuk Badan Kebijakan Fiskal khususnya Sekretariat BKF untuk dapat menanamkan nilai integritas dan budaya anti suap sedini mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan.

Seminar Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana (DRFI) dan Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) di Indonesia

Yogyakarta, 10 Juli 2023



Rangkaian acara pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) dibuka oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiyos Santoso. Indonesia, yang mengalami kerugian Rp22,8 triliun per tahun akibat bencana alam (2000–2016), mengadakan seminar ini untuk membahas penerapan strategi *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) dan sinerginya dengan peta jalan *Adaptive Social Protection* (ASP). Tujuan seminar adalah melindungi negara dan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, serta meningkatkan kapasitas pendanaan bencana melalui alternatif sumber pembiayaan di luar APBN dan asuransi.

Pemerintah sedang mengembangkan instrumen strategi PARB, yang dirancang sebagai dana fleksibel dan berkelanjutan untuk pembiayaan bencana. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyelesaikan adopsi kebijakan ASP untuk mengintegrasikan perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen risiko bencana. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dan telah menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam pembelajaran pendanaan risiko bencana dan perlindungan sosial adaptif, baik di tingkat regional maupun global.

Economic and Financial Dialogue (EFD) Indonesia-India

Gandhinagar, 16 Juli 2023

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, memperkuat kerja sama bilateral dengan membentuk Dialog Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan (*Economic and Financial Dialogue/EFD*) di Gandhinagar, Gujarat, India. Pengumuman ini dilakukan setelah pertemuan bilateral dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 di bawah Presidensi India. Sri Mulyani menekankan kesamaan dan sejarah panjang antara kedua negara, yang dimulai dari perdagangan rempah-rempah dan barang lainnya sejak abad ke-13. Saat ini, Indonesia dan India memiliki struktur ekonomi yang serupa,



dengan pertumbuhan sektor manufaktur dan teknologi yang signifikan. Diskusi bilateral juga mencakup upaya memperkuat perdagangan, investasi, serta kolaborasi dalam isu pembangunan, perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat.

AGUSTUS

The 17th WorkGroup ASEAN Forum on Taxation Meeting (AFT) & The 14th ASEAN Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET)

Yogyakarta, 1-2 Agustus 2023



Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal, Pande Putu Oka Kusumawardani, yang juga Ketua ASEAN Forum on Taxation (AFT) 2023, memimpin pertemuan kelompok kerja AFT ke-17 dan SF-ET ke-14. Dalam pertemuan AFT ke-17, delegasi membahas tantangan kebijakan perpajakan di kawasan, termasuk: (1) Membangun dan memperkuat jaringan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) intrakawasan melalui pengenalan BEPS MLI (*Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS*); (2) Memperbaiki implementasi pertukaran informasi perpajakan sesuai dengan standar internasional. (3) Meningkatkan kemudahan layanan administrasi perpajakan bagi investor dengan mendorong sistem online untuk pengajuan keringanan pajak dan restitusi pajak. Dalam pertemuan SF-ET, dibahas upaya melengkapi pertukaran informasi/data untuk mendukung kerja sama dalam kebijakan cukai, termasuk cukai rokok dan minuman alkohol. Diskusi juga mencakup cukai minuman berpemanis dan produk tembakau baru, seperti rokok elektrik.

Kelas Simulasi APBN “Makin Dekat dengan Uang Kita”

23 Agustus–27 September 2023



Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Kelas Simulasi APBN bertajuk “Makin Dekat Dengan Uang Kita” untuk mempertajam pemahaman kebijakan fiskal terutama dalam proses penyusunan postur APBN dan PKAPBN. Acara ini diharapkan dapat memberikan informasi kunci bagi civitas akademika terkait pentingnya kebijakan fiskal dalam proses penyusunan APBN. Kegiatan ini diselenggarakan pada 16 universitas, sukses menjaring sekitar 1.550 mahasiswa yang terbagi dalam 62 kelas dari barat hingga timur Indonesia: PKN STAN (Tangerang Selatan), UNRAM (Mataram), UNSRAT (Manado), UNIBRAW (Malang), UNNES (Semarang), UNS (Solo), UNDANA (Kupang), UNRI (Pekanbaru), UNUD (Denpasar), UNPAD (Bandung), UNM (Makassar), USU (Medan), UNAIR (Surabaya), UNILA (Lampung), UGM (Yogyakarta), dan UNKHAIR (Ternate).

The 7th Annual Islamic Finance Conference (AIFC)

Jakarta, 29–30 Agustus 2023

Gelaran seminar internasional AIFC ke-7 tahun 2023 mengusung tema “Islamic Finance Role for Tackling Global Uncertainty Through Sustainable and Inclusive Halal Economy and Structural Reform.” Seminar AIFC ke-7 diselenggarakan pada tanggal 29–30 Agustus 2023 secara *hybrid* terbatas berlokasi di Hotel Aryaduta, Jakarta. Penyelenggaraan AIFC ke-7 merupakan *side event* kegiatan ASEAN di Indonesia. Seminar internasional AIFC adalah acara tahunan *flagship* Kementerian



Keuangan yang mempertemukan para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas berbagai masalah di sektor keuangan, ekonomi, dan pembangunan Islam yang kritis, khususnya untuk Indonesia. Selain itu, AIFC bertujuan sebagai ajang diskusi dan pertukaran gagasan serta informasi baru di kalangan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

Sebelumnya, AIFC diselenggarakan di Jakarta (2016), Yogyakarta (2017), Makassar (2018), Surabaya (2019), serta secara daring (2021 dan 2022). Seminar atau konferensi internasional AIFC juga mempunyai *side event* berupa *Call for Paper* yang bertujuan untuk mengumpulkan makalah-makalah berkualitas tinggi, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan pembuat kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penyelenggaraan CFP AIFC 2023 dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Penyelenggaraan AIFC ke-7 dilakukan dengan konsep dua *Guest Lecture* dan tiga *Panel Session*.

SEPTEMBER

Ultimate Talks: Pembiayaan Perubahan Iklim untuk Mendorong Aksi Global untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Jakarta, 5 September 2023



Perubahan iklim adalah isu global mendesak yang memerlukan tindakan segera. Dampak seperti gelombang panas ekstrem di Amerika Utara dan Eropa menunjukkan peningkatan suhu permukaan

bumi. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebutnya sebagai era “pendidihan global”. Guna meningkatkan kesadaran, Badan Kebijakan Fiskal mengadakan Ultimate Talks ke-9 pada 5 September 2023 dengan tema “Pembiayaan Perubahan Iklim untuk Mendorong Aksi Global Untuk Masa Depan Yang Berkelanjutan”. Narasumber yang hadir adalah Gerry Pramudya Sulaiman, Vidya Fauzianti, dan Al Nuriza Rahmadania.

Perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi ekosistem tetapi juga ekonomi. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian ekonomi antara 0,66–3,45% dari PDB pada 2030. Sebagai respons, pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui *Enhanced Nationally-Determined Contributions* (EMBC), dengan target pengurangan 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Indonesia, yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, berkomitmen untuk meningkatkan adaptasi melalui *Nationally-Determined Contributions* (NDC) yang diperbarui dan membutuhkan kolaborasi global serta pembiayaan yang memaGuna

Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) Kementerian Keuangan 2023

Surabaya, 7 September 2023



Seminar Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LiKe IT) 2023 merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kementerian Keuangan didukung oleh LPS dan Universitas Airlangga menyelenggarakan LIKE IT di Surabaya (6–7 September 2023) dengan tema “Generasi Muda Indonesia Cerdas Berwirausaha dan Berinvestasi.”

Tujuan seminar ini adalah mendorong generasi muda untuk menjadi investor di pasar keuangan dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Pemerintah dan otoritas telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengembangan instrumen investasi inovatif, perluasan akses melalui teknologi, dan penguatan koordinasi antarotoritas. Reformasi sektor keuangan juga telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan (P2SK)

Gowa, 11 September 2023

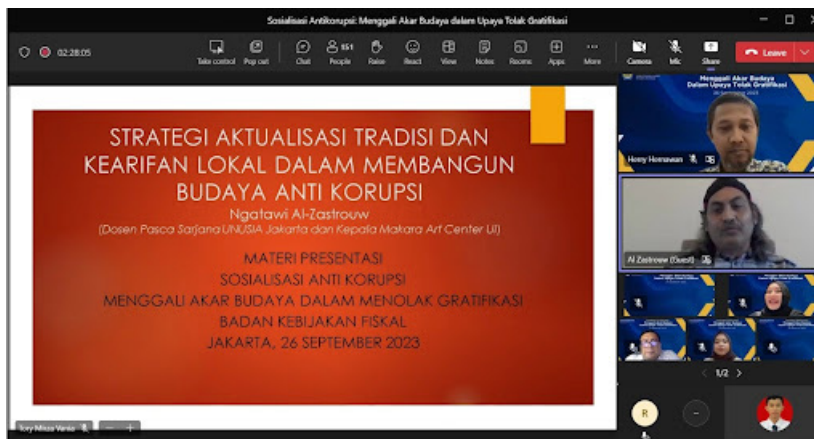


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komisi XI DPR RI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan (P2SK) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Acara yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pihak tentang Undang-undang P2SK dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi sektor jasa keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Hadir sebagai pembicara pada acara ini yaitu Amir Uskara (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI), Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, OJK), Lana Sulistyaningsih (Wakil Ketua Dewan Komisiner, LPS), Rizal Ramadhani (Deputi Komisiner Hukum dan Penyelidikan, OJK), Arief Wibisono (Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal/Sekretaris KSSK), dan Solikhin M. Juhro (Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia).

Sosialisasi Antikorupsi: Menggali Akar Budaya dalam Upaya Tolak Gratifikasi

26 September 2023

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, BKF melaksanakan berbagai program pengendalian gratifikasi secara berkala, salah satunya dengan menyampaikan penegasan komitmen antikorupsi dari pimpinan BKF yang disaksikan oleh pegawai Kementerian Keuangan serta stakeholders, rekanan, dan mitra BKF, dalam berbagai forum internalisasi, seperti: (i) Sosialisasi Antikorupsi bagi para pegawai BKF dengan mengangkat tema Tolak Gratifikasi dengan Kenali, Waspada, dan Laporkan, pada 11 Agustus 2023 secara daring; (ii) Sosialisasi Antikorupsi bagi stakeholders, rekanan, dan mitra BKF dengan mengangkat tema



Menggali Akar Budaya dalam Upaya Tolak Gratifikasi pada 26 September 2023 secara daring; dan (iii) Webinar Penguatan Komitmen Integritas (Road to Hakordia 2023) dengan mengangkat tema Membangun Integritas Menuai Kebahagiaan, pada 28 November 2023 secara daring.

OKTOBER

Employee Wellbeing Webinar: Personal Resilience

5 Oktober 2023



Salah satu indikator utama kesehatan mental yang baik adalah kemahiran seorang pegawai dalam mengelola resiliensi dirinya. Dimana resiliensi diri tiap pegawai di sebuah instansi ini akan sangat berpengaruh pada resiliensi instansi itu sendiri. Bagaimana resiliensi perilaku, sumber resiliensi, dan kemampuan resiliensi membentuk respon resiliensi dan berdampak pada pertumbuhan organisasi. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan *Employee Wellbeing Webinar* yang bertemakan *Personal Resilience* pada 5 Oktober 2023 secara daring. Webinar yang menghadirkan dr. Elvine Gunawan, Sp. KJ sebagai narasumber utama dihadiri oleh lebih dari 60 orang pegawai Badan Kebijakan Fiskal.

Sidang Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank)

Maroko, 9-15 Oktober 2023



Rangkaian pertemuan tahunan para Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) tahun 2023 diselenggarakan di Marrakesh, Maroko. Pertemuan yang diselenggarakan pada 9-15 Oktober 2023 ini dihadiri para gubernur IMF dan World Bank dari 190 negara anggota. Sidang tahunan kali ini mengusung tema “*Global Action, Global Impact*”. Tema tersebut dipandang tepat dengan kondisi saat ini, ketika diperlukan tindakan bersama secara global untuk menghadapi berbagai tantangan, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi berdampak ganda dan inklusif. Dalam kesempatan kali ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rangkaian pertemuan tahunan tersebut. Sidang tahunan merupakan agenda rutin yang mempertemukan para Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan dan Pembangunan, Anggota Parlemen, Eksekutif Sektor Swasta, Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian global, termasuk prospek ekonomi dunia, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan efektivitas bantuan. Dalam agenda sidang tahunan turut diselenggarakan seminar, dialog, konferensi pers, dan agenda lainnya yang berfokus pada ekonomi global, pembangunan internasional, dan sistem keuangan dunia.

Pertemuan dengan OECD Council

Paris, 10 Oktober 2023

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan the *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) Council khususnya dalam sesi ‘*Update on Indonesia’s Request to Start the OECD Accession Process*’ yang diselenggarakan di Kantor Pusat OECD pada 10 Oktober 2023. Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi menyampaikan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD pada tanggal 14 Juli 2023 lalu. Keanggotaan



Indonesia dalam OECD diharapkan dapat mendukung keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang semakin berdaya tahan (*resilient*), berkelanjutan, inklusif, dan dapat menunjang upaya mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Intensi Indonesia ini disambut baik melalui surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD dan dilanjutkan dengan kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 10 Agustus 2023.

.....

1st International Tax Forum (ITF) – Navigating International Tax Dynamics: Bridging the Two Pillars and Strengthening the Anti-Avoidance Rules
Bali, 24-26 Oktober 2023



ITF merupakan forum untuk melaksanakan diskusi kebijakan perpajakan terkini, menggalang rekomendasi dari para ahli dan masukan dari publik terkait. ITF 2023 mengusung tema “*Navigating International Tax Dynamics: Bridging the Two Pillars and Strengthening the Anti-Avoidance Rules*”. Agenda ITF 2023 secara umum membahas terkait dengan solusi dua pilar dan berlangsung selama 3 hari yang terdiri dari 5 sesi acara. Kelima sesi tersebut secara berturut-turut adalah: *Pillar Two Implementation and Update*, *Focus Group Discussion on the Implementation of Pillar Two in Indonesia*, *Recent Update on Tax Treaty*, *The New Indonesia’s Anti-Avoidance Rules*, dan *International Tax Workshop*. ITF melibatkan narasumber ahli perpajakan luar negeri dan dalam negeri, akademisi,

serta praktisi. Adapun peserta dari ITF berasal dari berbagai kalangan, antara lain: Wajib Pajak, Konsultan Pajak, Asosiasi, Akademisi, Pegawai Kemenkeu, dan Pegawai Kementerian terkait.

NOVEMBER

Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 (IICSFE 2023)

Jakarta, 8 November 2023



Konferensi ini, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), dan didukung oleh UNDP, GiZ, dan CPI, bertujuan untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan dan transisi di Indonesia. Dengan tema “*Accelerating the Development of Transition Finance*,” IICSFE 2023 fokus pada percepatan peralihan menuju ekonomi yang lebih hijau. Konferensi ini terdiri dari empat sesi diskusi yang mencakup topik seperti taksonomi hijau, pajak dan bursa karbon, instrumen keuangan, serta kebijakan pendukung.

Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang keuangan berkelanjutan dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk mendorong investasi berkelanjutan. Inisiatif kebijakan Indonesia seperti pembaruan taksonomi hijau dan pemberlakuan harga karbon mencerminkan tekad pemerintah untuk mendorong perubahan yang terarah. IICSFE 2023 juga menawarkan solusi inovatif untuk tantangan pendanaan transisi.

Diseminasi Kajian Analisis Dampak Insentif Perpajakan Sektor Perumahan terhadap Perekonomian Indonesia

Surakarta, 14 November 2023



Diseminasi kajian prioritas nasional ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari pengampu kepentingan sebelum kajian ini resmi diterbitkan. Acara diseminasi tersebut bertujuan untuk membuka ruang diskusi bagi para pengampu kepentingan atas analisis dan hasil temuan yang sudah dilakukan, dengan basis temuan studi dan observasi lanjutan. Harapannya akan diperoleh strategi rumusan kebijakan perpajakan dan pendapatan negara lainnya yang memiliki *multiplier effect* signifikan bagi sektor perumahan di Indonesia.

.....

Sosialisasi Kebijakan Fiskal bersama Mahasiswa Bandung

16 November 2023



Badan Kebijakan Fiskal menggelar Sosialisasi Kebijakan Fiskal 2024 kepada mahasiswa dari universitas di sekitar wilayah Bandung yang bertujuan untuk mensosialisasikan perkembangan ekonomi terkini dan kebijakan fiskal tahun 2024. Acara ini digelar secara langsung di Bandung dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Wahyu Septia Wijayanti, Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan Muhammad Olgiano

Palioriski, Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan APBN dari Badan Kebijakan Fiskal. Acara ini dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai Universitas di Bandung. Dalam acara ini dibahas terkait kondisi perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta arah kebijakan APBN 2024.

.....

Knowledge Sharing dan Workshop Series on Multidimensional Poverty

Agustus–November 2023



Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi inklusif. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan FEB UI menyelenggarakan “*Knowledge Sharing dan Workshop Series on Multidimensional Poverty*” pada tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai kemiskinan multidimensi, (2) Menganalisis berbagai deprivasi dalam dimensi penting seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, (3) Mengidentifikasi kelompok rentan dalam kemiskinan multidimensi untuk desain intervensi yang efektif, (4) Menyediakan input berbasis bukti untuk formulasi kebijakan alokasi anggaran.

Kegiatan terdiri dari enam *workshop* yang dilaksanakan secara hybrid dari Agustus hingga November 2023 di Badan Kebijakan Fiskal. Narasumber meliputi Putu Geniki Lavinia Natih (FEB UI), Bappenas, dan BPS, sementara peserta berasal dari berbagai instansi terkait seperti Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Sosial. *Workshop* mencakup tinjauan tentang pencapaian SDGs di Indonesia, metode pengukuran kemiskinan multidimensi seperti *Capability Approach* dan Alkire Foster, serta analisis data Susenas. Peserta juga mengisi kuesioner anonim *online* untuk mengidentifikasi area kunci deprivasi.

DESEMBER

Fiscal Day 2023

Bali, 6 Desember 2023

100 pemuda yang terdiri dari ASN dan Mahasiswa Bali berdiskusi mengenai isu-isu kebijakan terkini dalam acara *Fiscal Day 2023*. Acara yang digelar pada Rabu, 6 Desember 2023 di Bali merupakan event tahunan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman anak muda khususnya ASN terkait penyusunan kebijakan fiskal. Membuka acara, Kepala Pusat Kebijakan APBN Wahyu Utomo menyampaikan bahwa tema *Fiscal Day* “Bergegas Menuju Indonesia Emas” bermakna bahwa kita harus bergerak dan berbenah melalui terobosan



dan lompatan menuju arah Indonesia yang lebih baik. Wahyu juga mengimbau agar peserta aktif dalam sesi diskusi dan dapat menyampaikan gagasan pemikiran yang konstruktif, *out of the box*, dan inovatif. *Fiscal Day* ini terdiri dari dua sesi besar, yaitu diskusi grup “Bergegas Menuju Indonesia Emas” dan *talkshow* dengan tema “Literasi Keuangan Menuju Kebebasan Keuangan”. Pada sesi diskusi, peserta berkesempatan menyampaikan ide dan gagasannya secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sempat hadir dalam acara tersebut.

The 12th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED)

Bali, 6 – 7 Desember 2023



Annual International Economic Development and Public Policy (AIFED) 2023 diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal di Bali pada 6–7 Desember 2023 dengan tema “*Fragmented World: Recalibrating Development Strategies.*” Konferensi ini bertujuan untuk membahas isu-isu geopolitik, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi serta dampaknya terhadap geoekonomi dunia. Acara dimulai dengan sambutan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, dan keynote speech dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menyoroti pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Selanjutnya, Prof. Barry Eichengreen dari UC-Berkeley menyampaikan *keynote lecture* tentang rekonfigurasi globalisasi yang mempengaruhi perdagangan dan keuangan internasional, serta potensi peluang bagi negara-negara Asia Tenggara. Konferensi ini terdiri dari empat sesi panel yang membahas topik seperti perkembangan lanskap geoekonomi terkini, perubahan Iklim dan transisi energi, ekonomi digital, serta kalibrasi kebijakan dalam menghadapi tantangan dan peluang. Diskusi panel dihadiri oleh para ahli dari berbagai institusi, termasuk World Bank, Stanford University, dan Lowy Institute, dengan fokus pada pengembangan strategi yang adaptif terhadap tantangan global saat ini.

Climate Gender Fest 2.0

Yogyakarta, 14-15 Desember 2023

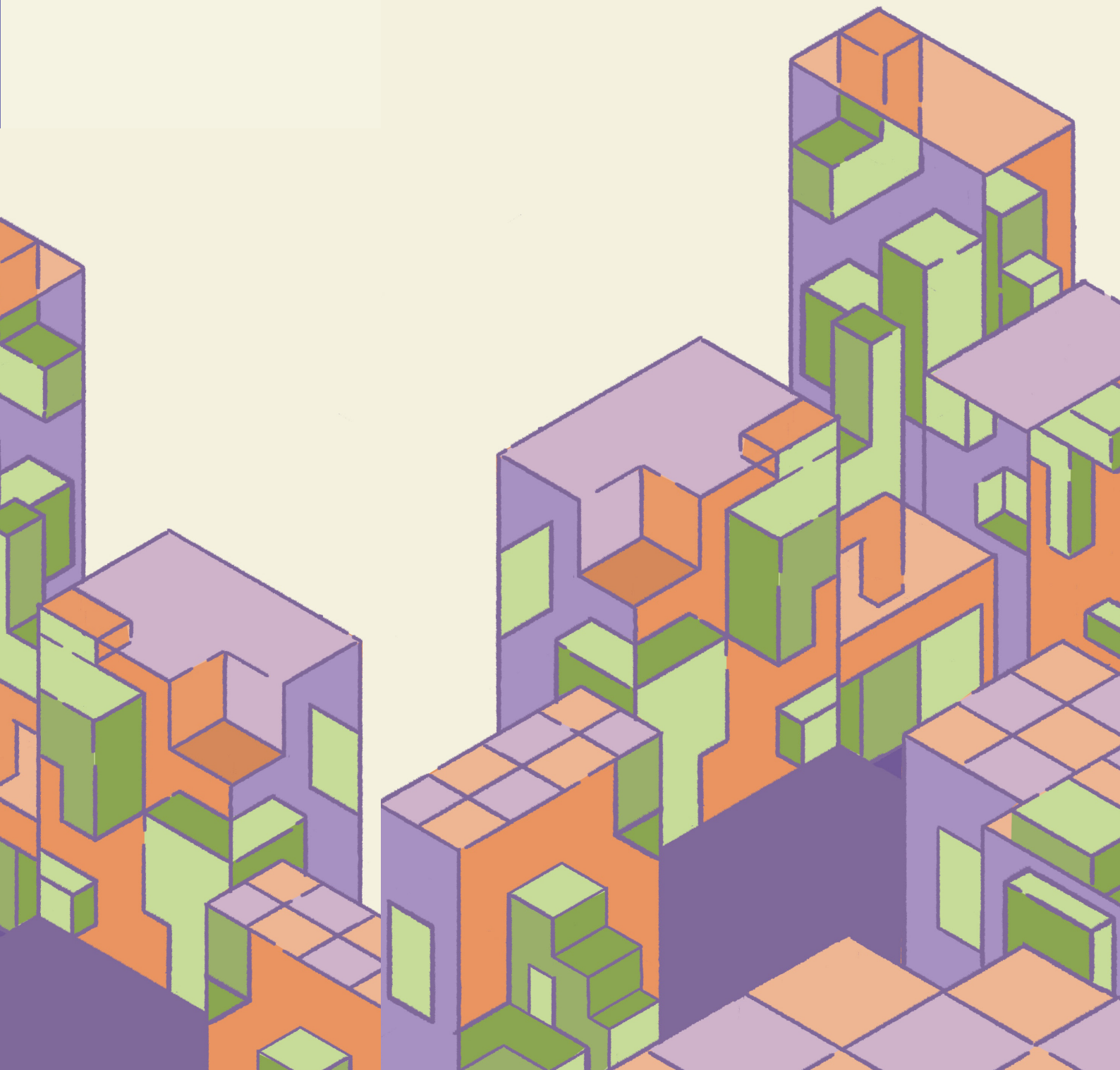


Acara yang berlangsung selama dua hari ini dimulai dengan diskusi antara Badan Kebijakan Fiskal, USAID *Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience* (SINAR), dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengenai pembiayaan dan implementasi transisi energi. DIY, yang mendukung transisi energi melalui Perda No. 15/2018, memiliki potensi besar dalam proyek Energi Baru Terbarukan (EBT). Diskusi ini menghadirkan narasumber seperti Yustina Ika Kurniawati dari Dinas PUP-ESDM, Eko Nur Prihandoko dari Badan Kebijakan Fiskal, dan Puti Faraniza dari PT SMI.

Hari kedua diadakan seminar dengan tema “Menuju Transisi Energi yang Inklusif dan Berkeadilan,” yang membahas PMK 103/2023 tentang dukungan fiskal untuk percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Seminar ini juga mengeksplorasi dampak gender dalam transisi energi untuk mencapai tujuan energi yang berkelanjutan dan adil. Acara yang diorganisasi oleh Badan Kebijakan Fiskal, UGM, USAID SINAR, dan GIZ ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai latar belakang, dengan panelis termasuk Chaerani Rachmatullah, Britney Melloy, Hasruf Hanif, dan Dr. Akhmad Akbar.

BAB 6

Publikasi

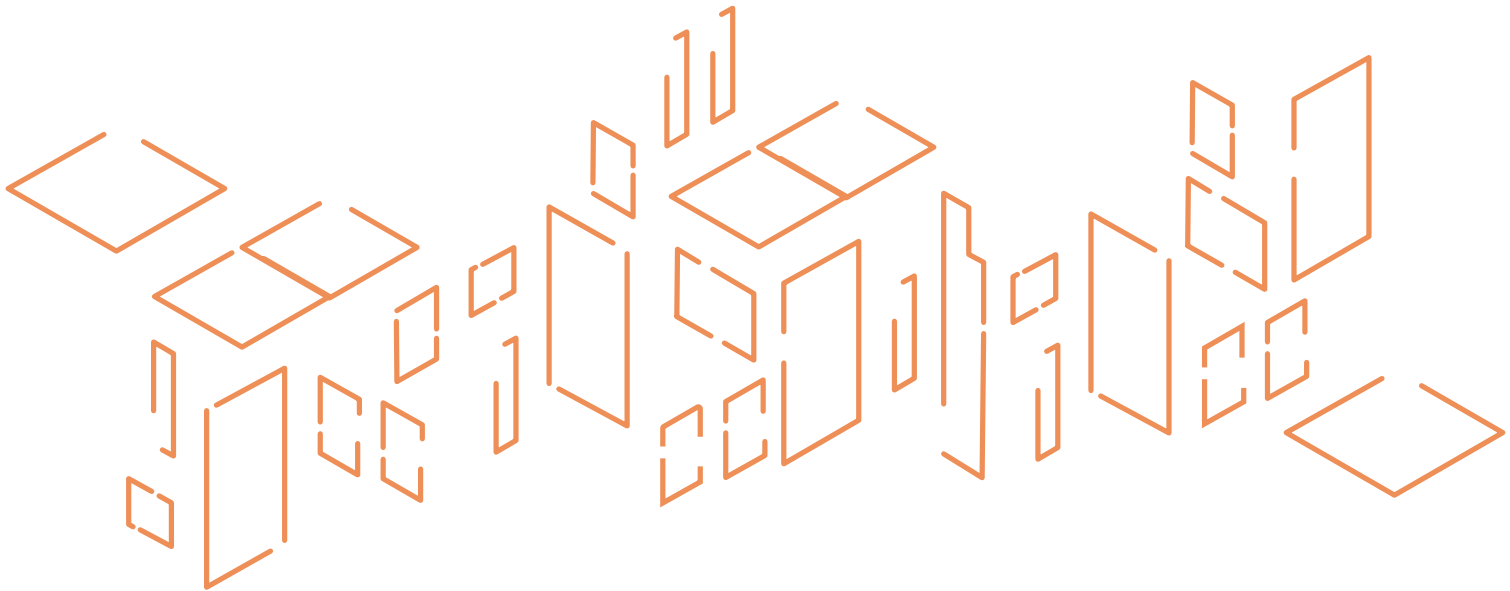


KEM & PPKF 2024



Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahan, dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Di tengah berbagai guncangan besar yang melanda perekonomian global, Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan segenap lapisan masyarakat berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat pada masa pandemi, serta terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural.

fiskal.id/KEM-PPKF2024



Laporan Belanja Perpajakan 2022 (Buku 1 & 2)



Laporan Belanja Perpajakan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal, khususnya yang terkait dengan insentif perpajakan. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya fiskal. Pada tanggal 9 Oktober 2023, *The Council on Economic Policies* (CEP) dan *The German Institute of Development and Sustainability* (IDOS) meluncurkan *Global Tax Expenditures Transparency Index* (GTETI). Berdasarkan publikasi tersebut Laporan Belanja Perpajakan Indonesia menempati peringkat 1 di ASEAN dalam indeks transparansi tersebut. Secara global, Indonesia menempati peringkat terbaik ke 8 di antara negara anggota G20 dan terbaik ke 15 di dunia di atas Inggris, Jepang dan India.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan belanja perpajakan yang terarah dan terukur. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, mendukung pemulihan sektor kesehatan, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian, termasuk investasi, riset, pengembangan SDM, dan UMKM. Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 tercatat sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional.

fiskal.id/TER2022



Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemicu ruang diskusi yang luas bagi publik, baik dalam hal pemanfaatan maupun pemberian masukan bagi perbaikan kinerja kebijakan. Selain itu, masyarakat luas dan dunia usaha dapat turut mengawasi pemanfaatan berbagai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan Pemerintah.

Laporan Perkembangan Ekonomi & Keuangan

Laporan ini merupakan sintesis berita dan rilis data perekonomian terkini. Isu yang diangkat disertai dengan analisis singkat secara periodik. Laporan Ekonomi & Keuangan Harian berisikan berita ekonomi global dan domestik, dilengkapi dengan data bursa saham, valas, serta komoditas lainnya. Semuanya tersaji sebanyak satu halaman saja.

Adapun Laporan Ekonomi & Keuangan Mingguan bersifat lebih komprehensif disertai tajuk mingguan yang merupakan analisis resmi serta sikap Badan Kebijakan Fiskal sebagai *think tank* kebijakan Kementerian Keuangan. Di awal media juga disertai dengan *highlight* minggu ini sebagai ikhtisar Laporan Ekonomi & Keuangan Harian di pekan itu. Terakhir, Laporan Ekonomi & Keuangan Bulanan yang merupakan ‘mata dan telinga’ Anda akan situasi serta dinamika ekonomi-keuangan global maupun domestik selama satu bulan penuh.

Laporan Keuangan Harian

[illegible]

fiskal.id/LEKharian



Laporan Keuangan Mingguan

[illegible]fiskal.id/LEKmingguan

Laporan KeuanganBulanan



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR

LAPORAN DISKUSI DAN KESIMPULAN

KINERJA EKONOMI MASUK TERANGKA DI TENGAH VOLATILITAS GLOBAL

Agustus 2024

TREKANDAS GOSWAMI

- Kinerja makroprudensial global pada 2024 memuncak karena ketidakpastian dan perubahan situasi ekonomi.
- Kondisi keuangan negara semakin memburuk, terutama untuk kondisi ekspansi pasar Agustus 2021.
- Peningkatan tenaga kerja global pada masa transisi pandemi.
- Inflasi dan harga komoditas Indonesia pada 2024 kembali memuncak kembali.
- Pergerakan pasar keuangan global semakin memburuk.
- Rerent Indonesia turun, 50,9% (dari pada 2024), 52,9%, akibat ketidakpastian dan perubahan situasi ekonomi.
- Prospek perekonomian global pada masa transisi pandemi pada kondisi dan kondisi saat ini.

Jenis dan bentuk data yang digunakan pada bulan Juli 2024. Jenis dan bentuk data yang digunakan pada bulan Juli 2024 meliputi: *Primary Market Index (PMI)* Indonesia dan *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia. *Primary Market Index (PMI)* Indonesia adalah indikator yang mengukur aktivitas ekonomi di sektor manufaktur, perdagangan, jasa, dan jasa, yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi. *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia adalah indikator yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. *Primary Market Index (PMI)* Indonesia dan *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan inflasi. *Primary Market Index (PMI)* Indonesia dan *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan inflasi. *Primary Market Index (PMI)* Indonesia dan *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Jenis dan bentuk data yang digunakan pada bulan Juli 2024. Jenis dan bentuk data yang digunakan pada bulan Juli 2024 meliputi: *Primary Market Index (PMI)* Indonesia dan *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia. *Primary Market Index (PMI)* Indonesia adalah indikator yang mengukur aktivitas ekonomi di sektor manufaktur, perdagangan, jasa, dan jasa, yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi. *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia adalah indikator yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. *Primary Market Index (PMI)* Indonesia dan *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan inflasi. *Primary Market Index (PMI)* Indonesia dan *Consumer Price Index (CPI)* Indonesia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

fiskal.id/LEKbulanan

Monitoring Ekonomi & Keuangan Bilateral



Laporan mingguan mengenai kondisi ekonomi dan keuangan negara mitra utama Indonesia. Berisikan isu-isu ekonomi dan keuangan negara mitra utama, terutama yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

fiskal.id/MEKbilateral



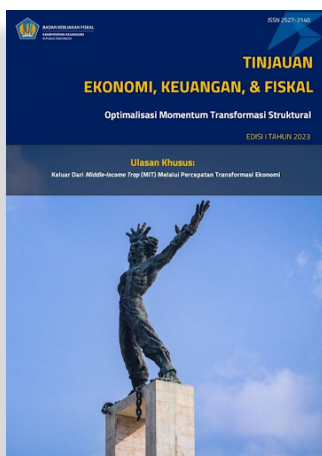
Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal

Sebagai komitmen untuk memberikan informasi sekaligus menjalin komunikasi dengan masyarakat Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerbitkan publikasi Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF) serta diseminasi TEKF. TEKF merupakan tinjauan yang berisi perkembangan ekonomi, sektor keuangan dan kebijakan fiskal yang dipublikasikan secara triwulanan.

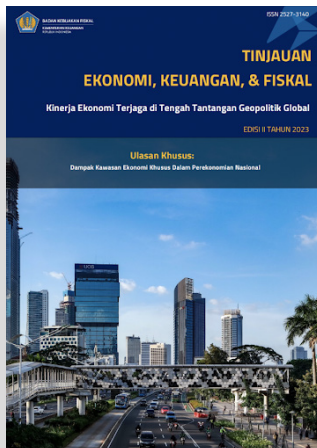
fiskal.id/TEKF2023



Sepanjang tahun 2023, TEKF telah diterbitkan sebanyak empat kali sebagaimana berikut:



TEKF edisi I Tahun 2023 mengambil tema “Optimalisasi Momentum Transformasi” dan menghadirkan ulasan khusus yaitu “Keluar Dari *Middle-Income Trap* (MIT) Melalui Percepatan Transformasi Ekonomi”.



TEKF edisi II Tahun 2023 ini mengambil tema “Kinerja Ekonomi Terjaga di Tengah Tantangan Geopolitik Global” dan menghadirkan ulasan khusus yaitu “Dampak Kawasan Ekonomi Khusus dalam Perekonomian Nasional”.



TEKF edisi III Tahun 2023 ini mengambil tema “Mendorong Penguatan Ekonomi, Mewaspada Perlambatan Global” dan menghadirkan ulasan khusus yaitu “Jalan Panjang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor”.



TEKF edisi IV Tahun 2023 ini mengambil tema “Menavigasi Gejolak Pasar Keuangan Global” dan menghadirkan dua ulasan khusus yaitu “Gejolak Pasar Keuangan Global dan Efeknya terhadap Sektor Keuangan Indonesia” dan “Perekonomian Tiongkok di Tengah Pusaran Geofragmentasi Dunia”.

Warta Fiskal

fiskal.id/WartaFiskal2023

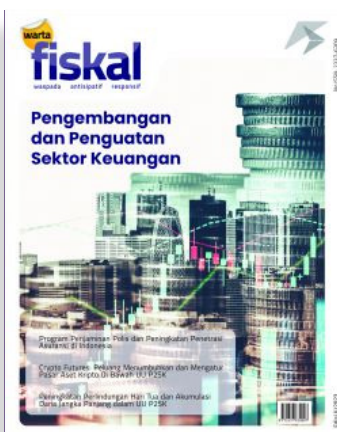
Majalah terbitan per kuartal Badan Kebijakan Fiskal yang menghadirkan berbagai tulisan semi populer terkait isu ekonomi, fiskal, sektor keuangan, dll. yang mudah dipahami seluruh kalangan. Rubrik-rubrik ringan dan kuis juga selalu melengkapi di setiap edisi.

Sepanjang tahun 2023, Warta Fiskal telah diterbitkan sebanyak empat kali sebagaimana berikut:



Edisi I: 2023, Optimis & Waspada

Mengelola ekonomi mirip dengan mengelola kehidupan. Dalam tekanan sebesar apapun, manusia harus optimis untuk tidak saja bisa bertahan hidup, tetapi juga bisa tumbuh dan sehat. Orang yang pesimis akan mengundang hadirnya penyakit dan bahkan bisa mempercepat kematian. Optimis adalah sebuah pengharapan dan kepercayaan, bahwa tujuan yang direncanakannya akan berhasil pada kemudian hari. Demikian juga Bangsa. Bangsa yang optimis adalah bangsa yang hidup dengan penuh semangat untuk meraih tujuan atau cita-citanya.



Edisi II: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pada beberapa bulan terakhir, sektor perbankan global mengalami guncangan cukup besar akibat permasalahan yang menimpa Silicon Valley Bank (SVB). Berdasarkan profil kegiatan usaha, SVB merupakan salah satu bank yang menjadi ujung tombak pembiayaan bisnis *start up* di Amerika Serikat. Dikutip dari berita CNN pada tanggal 13 Maret 2023, sejak 2011, SVB dipimpin oleh Greg Becker. Di bawah kepemimpinannya, SVB menjalankan empat bisnis utama yang melayani sektor inovasi, yakni perbankan komersial global, modal ventura dan investasi kredit, perbankan swasta dan manajemen kekayaan, dan perbankan investasi.



Edisi III: Transformasi Ekonomi (APBN 2024)

Dari sudut pandang perjalanan pembangunan ekonomi, Indonesia masih menghadapi tantangan perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*). Perlu keajaiban ekonomi (*economic miracle*) dan keajaiban politik (*political miracle*) yang terkonsolidasi saling memengaruhi untuk membawa Indonesia bisa keluar dari *middle income trap* dan memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Perilaku ekonomi mempengaruhi perilaku politik, dan sebaliknya perilaku politik mempengaruhi perilaku ekonomi. Tarik menarik dua model perilaku ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bangsa ini keluar dari *middle income trap*.



Edisi IV: Hasil Nyata ASEAN Chairmanship Indonesia

Perhimpunan negara negara Asia Tenggara atau The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lalu, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Viet Nam pada 28 Juli 1995, Laos PDR dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada 30 April 1999. Indonesia juga memiliki nilai sejarah yang penting dalam konteks ASEAN karena KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali, pada 23-24 Februari 1976.

Buku Perjalanan Transformasi Badan Kebijakan Fiskal: Cipta, Cita, dan Asa



Herry Hernawan (Tahun: 2023)

Keberadaan sebuah *think tank* dalam pemerintahan menjadi semakin krusial di tengah berbagai risiko dan ketidakpastian dalam perekonomian yang menimbulkan kompleksitas kebijakan yang semakin tinggi. *Think tank* tersebut berperan penting dalam melakukan analisis dan memberikan *tailored policy advice* yang berkualitas tinggi secara cepat dan efektif dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan yang semakin bersifat multi dimensi.

fiskal.id/Buku17thBKF



Buku Inovasi Kebijakan dan Evaluasi Insentif Perpajakan Indonesia



Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar bagi sektor keuangan di hampir seluruh negara di dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. Indonesia kembali bangkit dari keterpurukannya yang terlihat dari keberhasilan dalam mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi di atas 5% melalui program pemulihan ekonomi nasional, menurunnya tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan. Keberhasilan tersebut juga berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia. Peran perpajakan menjadi instrumen fiskal yang sangat penting untuk optimalisasi pendapatan, pengaturan, redistribusi pendapatan, serta peningkatan daya saing. Dengan

pentingnya peran pajak dalam keberhasilan Indonesia maka menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pencapaian perpajakan di tahun 2024 ini.

Buku ini membahas upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan pencapaian perpajakan di tahun 2024, seperti risiko dari perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama, perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrial, serta ekonomi hijau. Salah satu upaya pemerintah tersebut ialah melalui insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta mengakselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Pada buku ini terdapat 9 artikel yang membahas terkait isu-isu insentif perpajakan.

fiskal.id/InsentifPerpajakanIndonesia



Tulisan Pegawai

Selama tahun 2023, tulisan pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang telah terbit di jurnal, media massa atau publikasi lainnya tercatat sebanyak 66 Artikel yang ditulis oleh 38 orang penulis.

no	Nama Penulis	Jurnal/Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
1	Abrian Duta Firmansyah	Harian Ekonomi Neraca	Dana Pandemi Kontribusi Indonesia untuk Dunia	4 Januari 2023
2	Abdurohman & Risyaf Fahreza	Harian Kontan	Terobosan Fiskal Automatic Stabilizer	5 Januari 2023
3	Milson Febriyadi	Investor Daily	Belanja Perpajakan, Booster Pemulihan Ekonomi	7 Januari 2023
4	Apri Sya'bani	The Jakarta Post	Embracing Digital Finance Innovation	11 Januari 2023
5	Mahpud Sujai	The Jakarta Post	Why Sustainable Finance Matters	20 Januari 2023
6	Apri Sya'bani	Kompas	Penegakan Hukum Sektor Keuangan	23 Januari 2023
7	Mahpud Sujai	Harian Kontan	Optimalisasi DHE bagi Perekonomian	27 Januari 2023
8	Ferry Afi Andi	Kumparan.com	Konsolidasi Pajak dan Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat	6 Februari 2023
9	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Inflasi Terjaga, Perekonomian Kuat	7 Februari 2023
10	Mahpud Sujai	Kompas.id	Peningkatan Investasi. Nilai atau Kualitas	8 Februari 2023
11	Adelia Pratiwi	The Jakarta Post	Economic Recovery and Export Revenue Retention Policy	13 Februari 2023
12	Apri Sya'bani	The Jakarta Post	The Independence of BI and Financial Sector Authorities	17 Februari 2023

no	Nama Penulis	Jurnal/Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
13	Yanuar Wahyu Widiyanto	The Jakarta Post	ASEAN Needs Tax Treaty Networks to Boost Tax Certainty	27 Februari 2023
14	Mahpud Sujai	Hijauku.com	Transisi Energi Menuju Net Zero Emission (NZE) 2050	7 Maret 2023
15	Adi Budiarmo & Ilham Rahmansyah	Investor Daily	Penguatan Kawasan ASEAN Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan Digital UMKM	8 Maret 2023
16	Apri Sya'bani	The Jakarta Post	Why Additional Tier 1 Contingent Convertible Bonds Matter to Bank	27 Maret 2023
17	Adelia Pratiwi	The Jakarta Post	Provisions for Impairment Losses Offer a Buffer to Banks	28 Maret 2023
18	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Strategi Penguatan Sektor Pertanian untuk Masa Depan Bangsa	31 Maret 2023
19	Devi Yanti Br. Bangun	Harian Ekonomi Neraca	Dana Pandemi, Kontribusi Indonesia untuk Dunia	1 April 2023
20	Rosyid Bagus Ginanjar Habibi	detiknews	Peluang Ekonomi Sepak Bola yang Hilang	4 April 2023
21	Rosyid Bagus Ginanjar Habibi	detiknews	Terima Kasih Banyak, Pahlawan Pajak!	10 April 2023
22	Nella Sri Hendriyetty	Bisnis Indonesia	Sektor Keuangan & ASEAN 2023	13 April 2023
23	Rosyid Bagus Ginanjar Habibi	detiknews	Miskomunikasi Pajak Soimah	18 April 2023
24	Rosyid Bagus Ginanjar Habibi	The Jakarta Post	Optimizing Zakat to Reduce the Tax Burden	28 April 2023

no	Nama Penulis	Jurnal/Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
25	Bramantiyo	Harian Ekonomi Neraca	Menggali Potensi Penerimaan via Skema LVC di IKN	4 Mei 2023
26	Rosyid Bagus Ginanjar Habibi	detiknews	Porsi APBN Infrastruktur Jalan Lampung	10 Mei 2023
27	Enrico David Tarigan	Harian Ekonomi Neraca	Mengokohkan Perekonomian ASEAN melalui Inklusi Keuangan Digital	15 Mei 2023
28	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	Mencermati KEM-PPKF 2024	24 Mei 2023
29	Astrid Wiyanti	Investor Daily	Penguatan Arsitektur Kesehatan Asean	31 Mei 2023
30	Widiyanto	Investor Daily	The Power of ASEAN	5 Juni 2023
31	Mahpud Sujai	Harian Kontan	Perekonomian Nasional di Tahun Politik	15 Juni 2023
32	Nopriyanto Hady Suhanda	The Jakarta Post	Addressing Inequality and Urban Segregation in Jakarta	17 Juni 2023
33	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Alokasi Anggaran untuk Pemerataan Pembangunan Wilayah	20 Juni 2023
34	Pipin Prasetyono	detiknews	Mengapa Harus Berpegang pada Fiscal Rule	5 Juli 2023
35	Bhayu Purnomo	The Jakarta Post	Debt as Development Tools	7 Juli 2023
36	Mahpud Sujai	detiknews	Geliat Sektor Properti bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	10 Juli 2023
37	Bhayu Purnomo	Bisnis Indonesia	Kemampuan Adaptasi Perlinsos	21 Juli 2023
38	Abdul Aziz	Investor Daily	Pembiayaan Alternatif Infrastruktur ASEAN	24 Juli 2023

no	Nama Penulis	Jurnal/Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
39	Mochamad Bara Ampera & Adelia Pratiwi	The Jakarta Post	Stronger Regulation for Repatriation of Export Earnings	24 Juli 2023
40	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Transformasi Ekonomi, Terobosan di Akhir Pemerintahan Jokowi	25 Juli 2023
41	Mahpud Sujai	Hijauku.com	Pengolahan Air Limbah Modern dan Terpadu Belajar dari Osaka	25 Juli 2023
42	Mahpud Sujai	Harian Kontan	Mekanisme Hedging & Transformasi Hijau	2 Agustus 2023
43	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	Arsitektur RAPBN 2024	21 Agustus 2023
44	Abdurohman	The Jakarta Post	A Decade of Jokowi's Budgetary and Economic Policy	24 Agustus 2023
45	Bhayu Purnomo	Bisnis.id	Titik Labuh RI dalam Ketidakpastian Global	25 Agustus 2023
46	Yuventus Effendi	Bulletin of Indonesian Economic Studies	Prospects of Energy Transition In Indonesia	25 Agustus 2023
47	Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Hilirisasi dan Revitalisasi Sektor Pertanian untuk Ketahanan Ekonomi Nasional	28 Agustus 2023
48	Wahyu Septia Wijayanti	jakartaglobe.id	A Journey Towards Indonesia's Higher Economic Growth	28 Agustus 2023
49	Rosyid Bagus Ginanjar Habibi	detiknews	Buah Manis Pajak Digital	28 Agustus 2023
50	Mohammad Yoga Pratama	Investor Daily	Pembiayaan Iklim dan Strategi Sektor Energi AIIB	5 September 23
51	Abdurohman & Risya Fahreza	The Jakarta Post	2024 Budget Key Milestone to Escape Indonesias Middle-Income Trap	5 September 23
52	Chandra Kusuma	The Jakarta Post	Linking Health and Economic Growth	25 September 23

no	Nama Penulis	Jurnal/Media Massa	Judul Publikasi	Tanggal Publikasi
53	Bhayu Purnomo	Investor Daily	New Playbook untuk Ekonomi Indonesia	26 September 23
54	Lalu Muhammad Azmi Prasetya & Mahpud Sujai	Harian Ekonomi Neraca	Transformasi Ekonomi Melalui Kebijakan Hilirisasi	9 Oktober 2023
55	Adelia Pratiwi	Bisnis Indonesia	Mengurai Kredit Macet UMKM	12 Oktober 2023
56	Retno Maruti & Andriansyah	www.lowyinstitute.org	Indonesia and its bid for OECD membership	17 Oktober 2023
57	Mohammad Zainul Abidin	Kompas	Perubahan Iklim dan Perlindungan Sosial	17 Oktober 2023
58	Rizki Zul Arfandi	Investor Daily	Revitalisasi Indonesia sebagai Kekuatan Industri Manufaktur	18 Oktober 2023
59	Widiyanto	Investor Daily	Ekonomi Biru, The Game Changer bagi Asean	26 Oktober 2023
60	Wantrijan Naibaho	Bisnis Indonesia	Rumah Layak Warga Miskin	15 November 2023
61	Chandra Kusuma	The Jakarta Post	Reinforcing Indonesias G20 Priorities	16 November 2023
62	Wahyu Utomo	Investor Daily	Paket Hemat, Stimulus Kuat untuk Jaga Stabilitas Ekonomi	16 November 2023
63	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	APBN 2024 Fondasi Menuju Indonesia Maju 2045	20 November 2023
64	Mahpud Sujai	Investor Daily	Menurunkan Biaya Modal, Mendorong Investasi Hijau	28 November 2023
65	Mohammad Yoga Pratama	Harian Kontan	Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan	2 Desember 2023
66	Dwika Darinda	Business Perspective Journal UTB	Perhitungan Sederhana Nilai Tukar Riil Rupiah dan Keseimbangannya	27 Desember 2023



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta
Pusat-10710
Telp. +62 21 348 33486



fiskal.kemenkeu.go.id



humas.bkf@kemenkeu.go.id



[bkfkemenkeu](https://www.facebook.com/bkfkemenkeu)



[@BKFkemenkeu](https://www.instagram.com/BKFkemenkeu)



[@BKFkemenkeu](https://twitter.com/BKFkemenkeu)



[bkfkemenkeuRI](https://www.youtube.com/bkfkemenkeuRI)



[bkfkemenkeu](https://www.linkedin.com/company/bkfkemenkeu)

